



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**WILAYAH BEBAN TANGGUNGAN DI PULAU JAWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sains**

**MENTARI DC BANGUN**

**0706265642**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**DEPARTEMEN GEOGRAFI**

**DEPOK**

**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Mentari DC Bangun**

**NPM : 0706265642**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 4 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Mentari DC Bangun  
NPM : 0706265642  
Program Studi : Geografi  
Judul Skripsi : Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Cholifah Bahaudin, MA (.....)  
Pembimbing 1 : Dra. M.H. Dewi Susilowati, MS (.....)  
Pembimbing 2 : Dra. Tuty Handayani, MS (.....)  
Penguji 1 : Drs. Frans THR Sitanala, M.Si (.....)  
Penguji 2 : Adi Wibowo, S.Si, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 4 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sains Jurusan Geografi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Dra. M.H. Dewi Susilowati, MS dan Dra. Tuty Handayani, MS selaku pembimbing skripsi. Atas do'a, saran, bimbingan, perhatian, waktu, dorongan semangat serta kritik yang membangun, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Frans THR Sitanala, M.S dan Adi Wibowo, S.Si, M.Si sebagai tim penguji. Atas saran, bimbingan, dan kritik yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Cholifah Bahauddin, MA selaku ketua sidang hasil penelitian. Atas saran, masukan, bimbingan, perhatian, waktu, serta kritik yang membangun, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr.rer.nat Eko Kusratmoko selaku Ketua Departemen Geografi. Atas saran, bimbingan dan kritik yang membangun sehingga saya bisa memiliki gelar sarjana.
5. Dra. Ratna Saraswati, MS selaku Pembimbing Akademik. Atas dorongan semangat, perhatian dan kasih yang ibu berikan kepada saya. Tanpa ibu, mungkin sekarang saya masih menjadi “siswa” bukan sebagai “mahasiswa”.
6. Drs. Sobirin, M.Si selaku Koordinator Pendidikan Departemen Geografi. Atas dorongan semangat, optimisme, saran, bimbingan dan

perhatian yang bapak berikan sehingga saya bisa menjalani serangkaian tes dengan lebih tegar dan kuat.

7. Drs. Hendry Ch. Bangun selaku ayah dan teman tempat saya berbagi cerita dan keluh kesah. Atas perhatian, dukungan, waktu, semangat, dan cinta yang selalu engkau curahkan, doa yang selalu dipanjatkan demi kelancaran skripsi dan untuk segala hal yang terbaik bagi saya. Terima kasih pa, karena selalu hadir ketika riri sangat membutuhkan perhatian.
8. Alm. Azwina Aziz Miraza selaku ibu, teman, guru, inspirasi, dan panutan saya. Beliau selalu hadir untuk menyemangati dan mendukung saya meskipun tidak dalam wujud yang nyata. Terima kasih ma, karena selalu hadir ketika riri sangat membutuhkan mama. Kata-kata yang selalu beliau ucapkan tidak pernah saya lupakan. Seperti yang selalu beliau tuliskan dalam setiap bukunya :  
“Gunakanlah sepatumu untuk berjalan dan boneka dalam genggamannya adalah harapan sebab pertarungan itu, Nak. Seperti boneka yang kau genggam”
9. Cendera RA Bangun, S.Sos dan Kartika PP Bangun sebagai penyemangat tiada henti, yang selalu menghibur, mengerti, dan memberikan perhatian yang tidak terbatas. Untuk seluruh keluarga Bangun dan Miraza, terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan untuk saya. Tanpa kalian semua, saya pasti tidak bisa menempuh ini semua.
10. Bambang Marhaendra Djaja, M.E. yang telah menjadi tempat saya bertanya dan berdiskusi dalam memahami makna geografi lebih dalam.
11. Alfanza Andromeda yang senantiasa membantu saya dalam mengerjakan peta-peta, selalu menyemangati ketika saya merasa putus asa, selalu menghibur ketika saya merasa sedih atau terpuruk, dan selalu berdoa untuk segala hal yang terbaik bagi saya.
12. Ryan Saputra, S. Si yang senantiasa membantu, mengajari, dan membuat saya paham dalam menggunakan SPSS.
13. Tyas, Fitria, Ajeng, Eva, Shella, Sinta, Mila, Bandu, kak Dini, Dito, Hilman, dan Jefri. Terima kasih atas segala momen-momen

kebersamaan yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Segala cerita, tawa, tangis dan dukungan yang selalu mengisi hari-hari kita selama 2 semester terakhir ini. Semoga persahabatan kita lebih abadi dibandingkan apapun. Untuk seluruh mahasiswa/i Geografi angkatan 2007 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kenangan tidak akan terlupakan.

14. Kepada seluruh dosen dan pegawai Departemen Geografi yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Atas perhatian, kontribusi dan bantuannya selama ini.
15. Kepada Bapak Toha dan Bapak Madsufi selaku Sekretaris Desa Rancateureup dan Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Atas kesediaannya dalam meluangkan waktu untuk saya wawancara. Serta kepada pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang turut membantu sehingga pelaksanaan survey penelitian saya berjalan dengan lancar.
16. Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua waktu serta bantuan tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Penulis juga berharap agar Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan para pembaca dapat mengembangkan tulisan dan penelitian ini agar bisa lebih berguna bagi Bangsa dan Negara Indonesia di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan selamat membaca dan mempelajari skripsi ini.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mentari D.C. Bangun  
NPM : 0706265642  
Departemen : Geografi  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa**

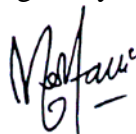
beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 4 Juli 2011

Yang menyatakan



(Mentari DC Bangun)

## ABSTRAK

Nama : Mentari DC Bangun  
Program Studi : Geografi  
Judul : Wilayah beban Tanggungan di Pulau Jawa

Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia sehingga rentan dalam isu kesejahteraan. Dalam hal ini, digunakan angka beban tanggungan yang merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran wilayah beban tanggungan dan hubungannya dengan faktor demografi dan ekonomi. Metode yang digunakan adalah analisis spasial dan analisis statistik. Hasil penelitian yang diperoleh wilayah beban tanggungan di Pulau Jawa bervariasi dimana beban tanggungan tinggi cenderung mengelompok di Pulau Jawa bagian barat daya dan wilayah beban tanggungan rendah cenderung mengelompok di Pulau Jawa bagian barat laut. Angka beban tanggungan tinggi didominasi oleh kabupaten, sedangkan untuk beban tanggungan rendah didominasi oleh tingkat kota. Adapun faktor yang memiliki hubungan dengan angka beban tanggungan pada tingkat kota adalah angka produk domestik regional bruto dan angka kematian kasar, sedangkan untuk tingkat kabupaten adalah angka migrasi keluar dan angka migrasi bersih.

Kata Kunci:

Wilayah Beban Tanggungan, Faktor Demografi, Faktor Ekonomi

xx + 84 halaman, 21 gambar, 66 tabel, 11 peta

Daftar Pustaka: 39 (1977-2010)



## **ABSTRACT**

*Name : Mentari DC Bangun  
Study Program : Geografi  
Title : The Region of Dependency Ratio on Java Island*

*Java Island is the island with most populated people in Indonesia, thus make this island susceptible to social welfare issue. In this case, Dependency Ratio is been using as one of indicator to determine the level of welfare. The purpose of this research is to know how the spread of Dependency Ratio Region on Java Island and its correlation with demography and economy. The methods are using spatial and statistic analysis. The result of this research is that the Region of Dependency Ratio on Java Island is variated, where the high Dependency Ratio Region is mostly clustered in southwest of Java Island while the low Dependency Ratio Region is dominated in northwest of Java Island. The result make us know that the high Dependency Ratio is dominated by the regencies while low Dependency Ratio is dominated by the cities. The factors that correlate with the levels of Dependency Ratio in cities are Gross Regional Domestic Product and Crude Death Rate while in regencies are Out Migration and Netto Migration.*

*Keywords:  
Dependency ratio region, Demography, Economy  
xx + 84 pages, 21 pictures, 66 tables, 11 maps  
Bibliography: 39 (1977-2010)*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	vii
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Daftar Lampiran Foto	xviii
Daftar Lampiran Peta	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah	3
1.3 Hipotesis	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Batasan Penelitian	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>6</b>
2.1 Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> )	6
2.2 Kematian ( <i>Mortalitas</i> )	6
2.3 Kelahiran ( <i>Fertilitas</i> )	7
2.4 Migrasi	8
2.5 Produk Domestik Regional Bruto	12
2.6 Penggunaan Lahan	15
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>17</b>
3.1 Kerangka Penelitian	17
3.2 Daerah Penelitian	19

3.3 Variabel Penelitian .....	19
3.4 Pengumpulan Data .....	19
3.5 Pengolahan Data .....	20
3.6 Analisis Data .. ..	21
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PULAU JAWA .....</b>	<b>22</b>
4.1 Letak .....	22
4.2 Pembagian Administrasi .....	22
4.3 Penduduk .....	23
4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	23
4.3.2 Kematian .....	24
4.3.3 Kelahiran .....	25
4.3.4 Migrasi .....	26
4.4 Produk Domestik Regional Bruto .....	26
4.5 Penggunaan Lahan .....	27
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
5.1 Hasil .....	30
5.1.1 Wilayah Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) .....	30
5.1.2 Angka Kematian Kasar ( <i>Crude Death Rate</i> ) .....	33
5.1.3 Angka Kelahiran Kasar ( <i>Crude Birth Rate</i> ) .....	34
5.1.4 Angka Migrasi ( <i>Out Migration, In Migration and Netto Migration</i> ) ...	36
A. Migrasi Keluar ( <i>Out Migration</i> ) .....	36
B. Migrasi Masuk ( <i>In Migration</i> ) .....	38
C. Migrasi Bersih ( <i>Netto Migration</i> ) .....	40
5.2 Pembahasan .....	42
5.2.1 Korelasi antara <i>Dependency Ratio</i> dengan Angka Kematian Kasar ...	42
A. Kota di Pulau Jawa .....	43
B. Kabupaten di Pulau Jawa .....	45
5.2.2 Korelasi antara <i>Dependency Ratio</i> dengan Angka Kelahiran Kasar ....	47
A. Kota di Pulau Jawa .....	48
B. Kabupaten di Pulau Jawa .....	50
5.2.3 Korelasi antara <i>Dependency Ratio</i> dengan Angka Migrasi Keluar .....	53
A. Kota di Pulau Jawa .....	54

B. Kabupaten di Pulau Jawa	56
5.2.4 Korelasi antara <i>Dependency Ratio</i> dengan Angka Migrasi Masuk	59
A. Kota di Pulau Jawa	60
B. Kabupaten di Pulau Jawa	62
5.2.5 Korelasi antara <i>Dependency Ratio</i> dengan Angka Migrasi Bersih	65
A. Kota di Pulau Jawa	66
B. Kabupaten di Pulau Jawa	68
5.2.6 Korelasi antara <i>Dependency Ratio</i> dengan Produk Domestik Regional Bruto	71
A. Kota di Pulau Jawa	72
B. Kabupaten di Pulau Jawa	74
5.3 Analisis hubungan wilayah beban tanggungan dengan faktor demografi dan ekonomi	77
5.4 Uji Hipotesis	78
BAB VI KESIMPULAN	81
Daftar Pustaka	82
Lampiran	
Lampiran Foto	
Lampiran Peta	

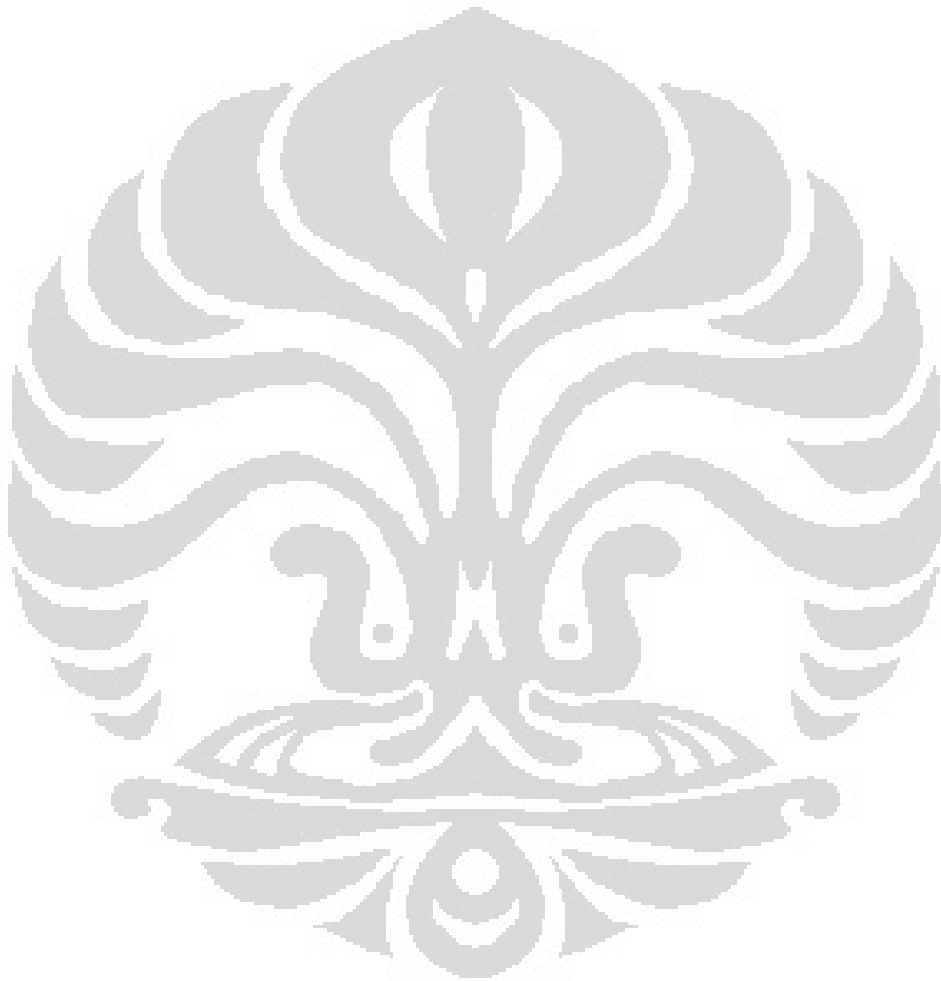
## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Hasil Overlay Angka Kematian Kasar dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kabupaten Dan Kota (%) .....	43
Tabel 5.2 Hasil Overlay Angka Kematian Kasar dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kota (%) .....	44
Tabel 5.3 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Angka Kematian Kasar ( <i>Crude Death Rate</i> ) pada kota .....	44
Tabel 5.4 Hasil Overlay Angka Kematian Kasar dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kabupaten (%) .....	47
Tabel 5.5 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Angka Kematian Kasar ( <i>Crude Death Rate</i> ) pada kabupaten .....	47
Tabel 5.6 Hasil Overlay Angka Kelahiran Kasar dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kabupaten Dan Kota (%) .....	48
Tabel 5.7 Hasil Overlay Angka Kelahiran Kasar dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kota (%) .....	50
Tabel 5.8 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Angka Kelahiran Kasar ( <i>Crude Birth Rate</i> ) pada kota .....	50
Tabel 5.9 Hasil Overlay Angka Kelahiran Kasar dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kabupaten (%) .....	53
Tabel 5.10 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Angka Kelahiran Kasar ( <i>Crude Birth Rate</i> ) pada kabupaten .....	53
Tabel 5.11 Hasil Overlay Angka Migrasi Keluar dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kabupaten Dan Kota (%) .....	54
Tabel 5.12 Hasil Overlay Angka Migrasi Keluar dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kota (%) .....	56
Tabel 5.13 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Angka Migrasi Keluar ( <i>Out Migration</i> ) pada kota .....	56
Tabel 5.14 Hasil Overlay Angka Migrasi Keluar dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kabupaten (%) .....	59
Tabel 5.15 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Angka Migrasi Keluar ( <i>Out Migration</i> ) pada kabupaten .....	59

Tabel 5.16 Hasil Overlay Angka Migrasi Masuk dengan Angka Beban Tanggungun Tingkat Kabupaten Dan Kota (%) .....	60
Tabel 5.17 Hasil Overlay Angka Migrasi Masuk dengan Angka Beban Tanggungun Tingkat Kota (%) .....	61
Tabel 5.18 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Angka Migrasi Masuk ( <i>In Migration</i> ) pada kota .....	62
Tabel 5.19 Hasil Overlay Angka Migrasi Masuk dengan Angka Beban Tanggungun Tingkat Kabupaten (%) .....	64
Tabel 5.20 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Angka Migrasi Masuk ( <i>In Migration</i> ) pada kabupaten .....	64
Tabel 5.21 Hasil Overlay Angka Migrasi Bersih dengan Angka Beban Tanggungun Tingkat Kabupaten Dan Kota (%) .....	65
Tabel 5.22 Hasil Overlay Angka Migrasi Bersih dengan Angka Beban Tanggungun Tingkat Kota (%) .....	67
Tabel 5.23 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Angka Migrasi Bersih ( <i>Netto Migration</i> ) pada kota .....	67
Tabel 5.24 Hasil Overlay Angka Migrasi Bersih dengan Angka Beban Tanggungun Tingkat Kabupaten (%) .....	70
Tabel 5.25 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Angka Migrasi Bersih ( <i>Netto Migration</i> ) pada kabupaten .....	70
Tabel 5.26 Hasil Overlay Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kabupaten dan Kota (%) .....	72
Tabel 5.27 Hasil Overlay Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kota (%) .....	73
Tabel 5.28 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 pada kota .....	74
Tabel 5.29 Hasil Overlay Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 dengan Angka Beban Tanggungan Tingkat Kota (%) .....	77
Tabel 5.30 Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) dengan Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 pada kota .....	77
Tabel 5.31 Persamaan dan Perbedaan Kelurahan Rancateureup dan Kelurahan Sukamaju .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian .....	18
--------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 3 Jumlah Kejadian Kematian Menurut Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 4 Jumlah Kejadian Kematian Menurut Kota di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 5 Jumlah Kejadian Kelahiran Menurut Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 6 Jumlah Kejadian Kelahiran Menurut Kota di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 7 Jumlah Kejadian Migrasi Keluar dan Masuk Menurut Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 8 Jumlah Kejadian Migrasi Keluar dan Masuk Menurut Kota di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 9 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 Menurut Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 10 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 Menurut Kota di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 11 Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) Menurut Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 12 Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) Menurut Kota di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 13 Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) Menurut Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 14 Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) Menurut Kota di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 15 Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) Menurut Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2005
- Tabel 16 Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) Menurut Kota di Pulau Jawa Tahun 2005



Tabel 17 Angka Migrasi Keluar, Masuk, dan Bersih (*Out Migration, In Migration, and Netto Migration*) Menurut Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2005

Tabel 18 Angka Migrasi Keluar, Masuk, dan Bersih (*Out Migration, In Migration, and Netto Migration*) Menurut Kota di Pulau Jawa Tahun 2005

Tabel 19 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Kelompok Umur Spesifik dan Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2005

Tabel 20 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Kelompok Umur Spesifik dan Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2009

Tabel 21 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Kelompok Umur Spesifik dan Angka Beban Tanggungan di Kecamatan Labuan Tahun 2009



## DAFTAR LAMPIRAN FOTO

- Gambar 1 Perbatasan Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang
- Gambar 2 Kantor Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang
- Gambar 3 Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang
- Gambar 4 Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang 2
- Gambar 5 Kondisi Jalan dan Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang
- Gambar 6 Kondisi Jalan dan Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang 2
- Gambar 7 Bersama Bpk Toha (Sekretaris Desa) di depan Kantor Kepala Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang
- Gambar 8 Struktur Organisasi Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang
- Gambar 9 Permukiman di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang
- Gambar 10 Permukiman di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang 2
- Gambar 11 Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang 3
- Gambar 12 Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang 4
- Gambar 13 Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang 5
- Gambar 14 Kantor Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang
- Gambar 15 Bersama Bpk Madsufi (Sekretaris Desa) di depan Kantor Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang

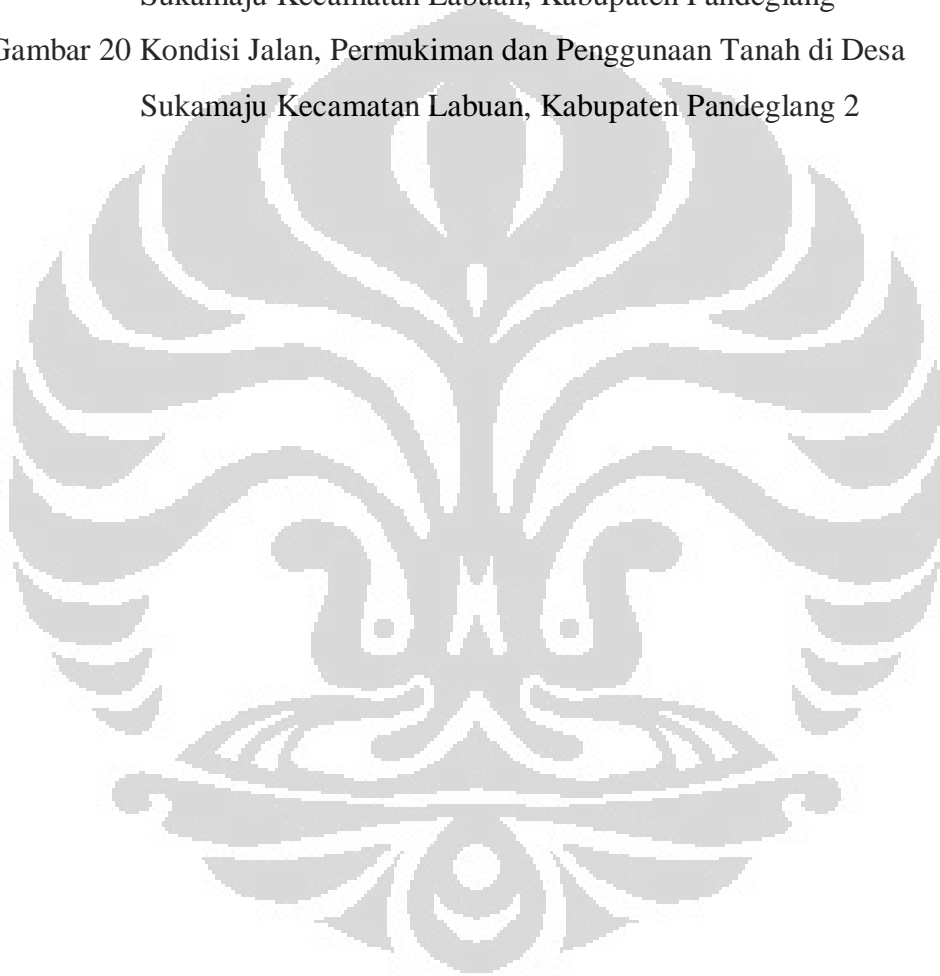
Gambar 16 Struktur Organisasi Desa Sukamaju Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Pandeglang

Gambar 17 Sketsa Peta Desa Sukamaju di Kantor Desa Sukamaju  
Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang

Gambar 18 Penggunaan Tanah di Desa Sukamaju Kecamatan  
Labuan, Kabupaten Pandeglang

Gambar 19 Kondisi Jalan, Permukiman dan Penggunaan Tanah di Desa  
Sukamaju Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang

Gambar 20 Kondisi Jalan, Permukiman dan Penggunaan Tanah di Desa  
Sukamaju Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang 2



## DAFTAR LAMPIRAN PETA

Peta 1	Peta Adminstrasi Pulau Jawa
Peta 2	Peta Wilayah Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa Tahun 2005
Peta 3	Peta Penggunaan Tanah di Pulau Jawa Tahun 2005
Peta 4	Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa Tahun 2005
Peta 5	Peta Wilayah Kematian Kasar di Pulau Jawa Tahun 2005
Peta 6	Peta Wilayah Kelahiran Kasar di Pulau Jawa Tahun 2005
Peta 7	Peta Wilayah Migrasi Keluar di Pulau Jawa Tahun 2005
Peta 8	Peta Wilayah Migrasi Masuk di Pulau Jawa Tahun 2005
Peta 9	Peta Wilayah Migrasi Bersih di Pulau Jawa Tahun 2005
Peta 10	Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Labuan
Peta 11	Peta Penggunaan Tanah dan Titik Survey Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, yaitu sebesar 58,51% atau sejumlah 130.004.539 jiwa dari 222.192.000 jiwa dengan total luas wilayah hanya 7% dari luas wilayah Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena Pulau Jawa memiliki faktor penarik yang lebih dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Faktor penariknya antara lain adalah kesempatan kerja yang lebih banyak, pendapatan yang lebih tinggi serta fasilitas sosial ekonomi yang lebih baik (Jayadinata, 1999).

Dalam Geografi Penduduk (*Population Geography*), angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) digunakan sebagai alat untuk mengukur tekanan penduduk. Angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara usia produktif dan non-produktif sedangkan tekanan penduduk adalah indeks yang digunakan untuk menghitung dampak penduduk terhadap suatu lahan. Semakin besar jumlah penduduk semakin besar pula kebutuhan akan sumberdaya, sehingga tekanan terhadap sumberdaya juga meningkat. Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Salah satu permasalahan kependudukan yang akan timbul akibat ledakan penduduk adalah permasalahan permukiman, lapangan kerja, pendidikan, pangan dan gizi, kesehatan dan mutu lingkungan (kesejahteraan).

Pada saat ini, dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat disertai dengan tingginya angka kelahiran dan meningkatnya angka pengangguran, dapat dipastikan bahwa seratus orang penduduk dengan usia produktif (umur 15 tahun hingga umur 64 tahun) mampu menanggung beban hidup 59 orang dengan usia non-produktif pada daerah perdesaan.

Dengan beban tanggungan yang tinggi, maka untuk bisa mencapai tingkat kesejahteraan akan sulit dilakukan. Hal ini bisa terjadi karena tidak tercukupinya kebutuhan hidup mendasar bagi orang yang ditanggung maupun yang menanggungnya.

Peningkatan jumlah penduduk di Pulau Jawa dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat kita lihat melalui angka beban tanggungan di Pulau Jawa. Angka ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dilihat dari banyaknya penduduk usia non-produktif yang dapat ditanggung oleh satu penduduk usia produktif. Semakin rendah angka beban tanggungan, maka semakin sedikit penduduk usia non-produktif yang ditanggung oleh satu penduduk produktif dalam satu wilayah dimana artinya masyarakat pada wilayah tersebut bisa dikatakan lebih sejahtera dibandingkan dengan wilayah lain.

Pada tahun 2006, komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda atau belum produktif (0-14 tahun) sebesar 28,26%, penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 66,71%, dan penduduk yang berusia tua atau sudah tidak produktif lagi ( $\geq 65$  tahun) sebesar 5,03%. Dengan demikian maka Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) penduduk Indonesia pada saat itu adalah sebesar 49,90%. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2005 yang memiliki Angka Beban Tanggungan sebesar 50,81%. Berdasarkan tipe daerah, angka beban tanggungan pada tahun 2006 di pedesaan sebesar 53,61% dan 45,35% untuk daerah perkotaan. (Departemen Kesehatan RI, 2006)

Pada tahun 2007, komposisi penduduk Pulau Jawa menurut kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda atau belum produktif (0-14 tahun) sebesar 25,45%, penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,77%, dan penduduk yang berusia tua atau sudah tidak produktif lagi ( $\geq 65$  tahun) sebesar 5,78%. Dengan demikian maka Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) penduduk Pulau Jawa pada saat itu adalah sebesar 45,41%. Angka ini mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2006 yang memiliki Angka Beban Tanggungan sebesar 47,71%. (Departemen Kesehatan RI, 2007)

## 1.2 Masalah

Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2005, wilayah beban tanggungan di Pulau Jawa bervariasi, sehingga muncul pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah persebaran wilayah beban tanggungan dan hubungannya dengan faktor demografi dan ekonomi?

## 1.3 Hipotesis

Untuk dapat memperoleh pemecahan dari masalah di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho : tidak terdapat hubungan antara variabel kelahiran, kematian, migrasi, produk domestik regional bruto, penggunaan lahan dengan angka beban tanggungan

Hi : terdapat hubungan antara variabel kelahiran, kematian, migrasi, produk domestik regional bruto, penggunaan lahan dengan angka beban tanggungan

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran wilayah beban tanggungan yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji faktor – faktor yang memiliki hubungan dengan angka beban tanggungan baik secara demografi (seperti kelahiran, kematian, migrasi) dan ekonomi (seperti produk domestik regional bruto, penggunaan lahan).

## 1.5 Batasan Penelitian

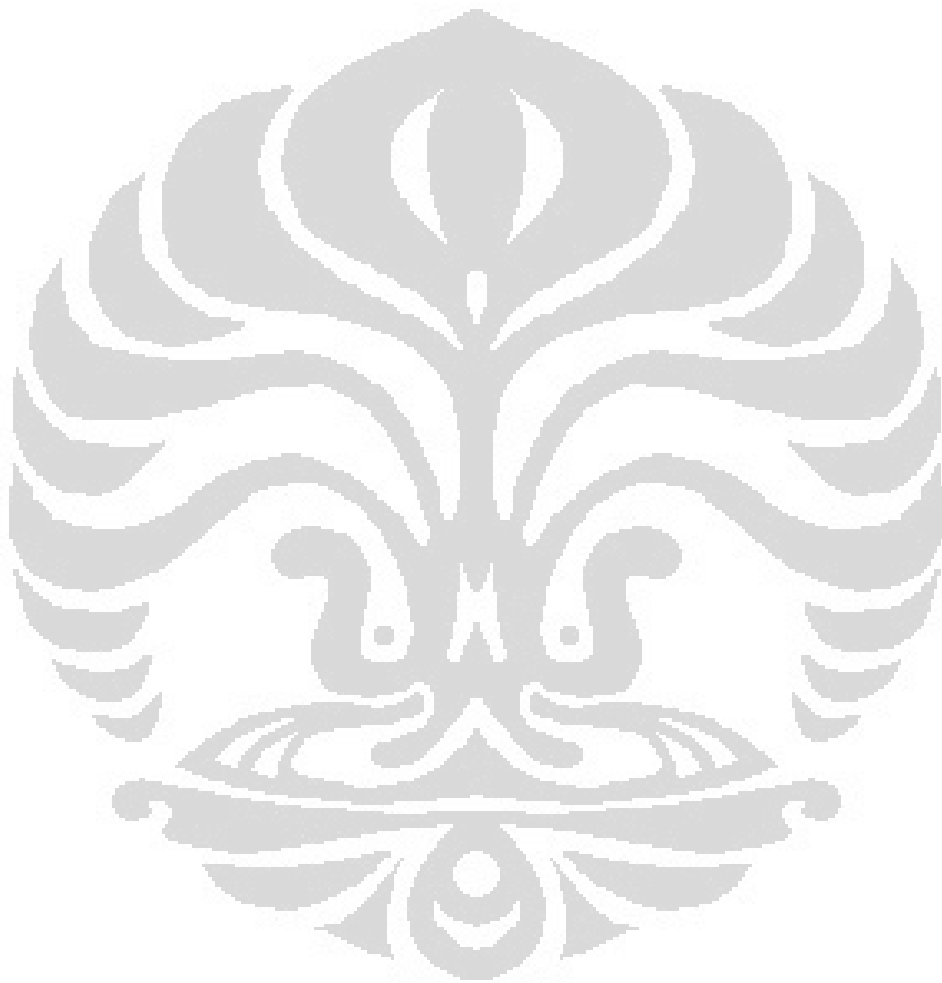
- Angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak

produktif (berumur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15 – 64 tahun) (*Glosarium Data dan Informasi Kesehatan, 2006*). Penduduk non - produktif menurut Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang berpotensi sebagai beban, sedangkan yang dimaksud dengan penduduk yang produktif adalah penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan. Usia produktif yang dimaksud adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Angka beban tanggungan yang dimaksud merupakan angka beban tanggungan hidup.

- Angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) adalah banyaknya kematian selama satu tahun tiap seribu penduduk. (*Lembaga Demografi FEUI, 2007*).
- Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) adalah jumlah kelahiran selama satu tahun tiap seribu penduduk. (*Lembaga Demografi FEUI, 2007*).
- Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. (*Lembaga Demografi FEUI, 2007*).
- Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. (*Badan Pusat Statistik, 2010*). Angka yang digunakan merupakan angka produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2000.
- Tanah (*land*) adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tata guna tanah (*land use*) adalah pengaturan penggunaan tanah. Kajiannya meliputi penggunaan permukaan bumi di daratan dan di lautan karena tanah dianggap mewakili samudera dan laut serta daratan yang tidak dihuni dan dimiliki oleh



perseorangan atau lembaga melainkan oleh seluruh umat manusia.  
(Jayadinata, 1999)



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)

Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya penduduk golongan usia produktif (umur 15 – 64 tahun). Adapun rumus angka beban tanggungan hidup adalah sebagai berikut.

$$\text{Angka Beban Tanggungan} = \frac{P(0-14) + P(65+)}{P(15-64)} \times k$$

Dimana P adalah jumlah penduduk usia tertentu dan k adalah konstanta yang biasanya merupakan kasus kontrol yaitu 100(%). Angka ini dapat menggambarkan jumlah penduduk yang harus ditanggung oleh 100 orang penduduk produktif. Angka beban tanggungan penduduk Indonesia pada tahun 1971 adalah 87, hal ini berarti bahwa tiap 100 orang penduduk yang produktif harus menanggung 87 orang yang tidak produktif. (*Lembaga Demografi FEUI, 2007*)

#### 2.2 Kematian (*Mortalitas*)

Berdasarkan teori Transisi Demografi, apabila suatu wilayah memiliki angka kematian dan kelahiran yang tinggi maka dapat dipastikan wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif (masuk ke dalam kelompok umur median) yang lebih rendah dimana akan mengakibatkan *dependency ratio* tinggi. Apabila suatu wilayah memiliki angka kematian dan kelahiran yang rendah, maka dapat dipastikan *dependency rationya* juga rendah.

Menurut *United Nation* dan *World Health Organization*, kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

- Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*)

Angka kematian kasar adalah jumlah kematian pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Secara konvensional, angka kematian untuk 1000 orang dapat dinyatakan dalam rumus

$$\text{Angka Kematian Kasar} = \frac{D}{P} \times k$$

Dimana D adalah jumlah kematian dan P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dalam penelitian ini, angka D atau jumlah kematian yang digunakan merupakan banyaknya kejadian kematian yang dialami oleh satu keluarga selama kurun waktu satu tahun yang lalu. Dengan asumsi bahwa pada setiap kejadian (kematian) yang dialami terdiri dari satu orang karena apabila menggunakan data jumlah kematian yang dilaporkan pada tingkat kabupaten/kota dikhawatirkan tidak semua keluarga yang mengalami akan melaporkan kejadian kematian tersebut. (*Lembaga Demografi FEUI, 2007*)

### 2.3 Kelahiran (*Fertilitas*)

Berdasarkan teori Transisi Demografi, apabila suatu wilayah terdapat tingkat kelahiran tinggi maka sudah dapat dipastikan bahwa wilayah tersebut akan memiliki *dependency ratio* yang tinggi pula. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk sehingga umur median rendah atau bahkan sangat rendah (berada pada kelompok umur tidak produktif) dan menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah dengan angka beban tanggungan tertinggi seperti yang terjadi pada Sri Lanka, Brazil dan Meksiko.

Menurut *United Nation* dan *World Health Organization*, lahir hidup adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

- Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)

Angka kelahiran kasar adalah jumlah kelahiran selama satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Secara konvensional, angka kematian untuk 1000 orang dapat dinyatakan dalam rumus

$$\text{Angka Kelahiran Kasar} = \frac{B}{P} \times k$$

Dimana B adalah jumlah kelahiran dan P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dalam penelitian ini, angka P atau jumlah kelahiran yang digunakan merupakan banyaknya kejadian kelahiran yang dialami oleh satu keluarga selama kurun waktu satu tahun yang lalu. Dengan asumsi bahwa pada setiap kejadian (kelahiran) yang dialami terdiri dari satu orang karena apabila menggunakan data jumlah kelahiran yang dilaporkan pada tingkat kabupaten/kota dikhawatirkan tidak semua keluarga yang mengalami kejadian kelahiran akan melaporkan kejadian tersebut. (*Lembaga Demografi FEUI, 2007*)

## 2.4 Migrasi

Migrasi umumnya terjadi pada kelompok umur-umur dewasa atau pada usia produktif. Dengan tingginya angka migrasi pada suatu wilayah, maka akan mempengaruhi jumlah penduduk usia produktif dan tentunya akan memberikan dampak pada *dependency ratio* di wilayah tersebut. Pada wilayah dengan angka migrasi keluar tinggi, maka jumlah penduduk usia produktif berkurang dan mengakibatkan angka beban tanggungan menjadi relatif lebih tinggi. Pada wilayah dengan angka migrasi masuk tinggi, maka jumlah penduduk usia produktif akan bertambah dan mengakibatkan angka beban tanggungan menjadi relatif lebih rendah.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Ada dua dimensi penting yang perlu ditinjau dalam penelaahan migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi daerah. Untuk dimensi waktu, ukuran yang pasti tidak ada karena sulit menentukan beberapa lama seseorang pindah tempat tinggal untuk dapat dianggap sebagai seorang migrasi, tetapi biasanya digunakan definisi yang digunakan dalam sensus penduduk.

Untuk dimensi daerah secara garis besarnya dibedakan menjadi perpindahan antar negara yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain atau disebut Migrasi Internasional. Sedangkan perpindahan yang terjadi dalam satu negara, misalnya antarpropinsi disebut dengan Migrasi Intern. Perpindahan lokal, yaitu perpindahan dari satu alamat ke alamat lain dari satu kota ke kota lain tapi masih dalam batas bagian dalam suatu negara misalnya dalam satu propinsi. Batasan Unit Wilayah bagi migrasi di Indonesia menurut Sensus 1961, Sensus 1971 dan Sensus 1980 adalah propinsi.

Penyebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia, dalam hal ini Pulau Jawa, membuat dua hal yang berlawanan terjadi. Pulau Jawa mempunyai sumber daya manusia yang berlebih dan kekurangan sumber daya alam, sedangkan wilayah di luar Pulau Jawa mempunyai kekurangan sumber daya manusia dan berlebihan sumber daya alam. Sebagian besar dari penduduk Pulau Jawa tinggal di wilayah pedesaan, maka masalah tersebut terasa sekali karena penduduknya sebagian besar bertani.

Pada beberapa wilayah di luar Pulau Jawa, karena kekurangan tenaga kerja (akibat dari penduduk yang jarang), maka sumber daya alam yang berlimpah sukar untuk dikembangkan. Wilayah yang berpotensi tinggi tetap tidak dapat berkembang, jika tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup.

Masalah di atas seringkali menjadi faktor pendorong bagi penduduk usia muda untuk meninggalkan daerah asalnya. Faktor pendorong (*push*

*factor*) dapat berupa pengangguran, pelayanan sosial ekonomi yang buruk, kekurangan kebebasan pribadi, diskriminasi dan sebagainya. Sebagian dari mereka pindah ke tempat yang lebih menarik (*pull factor*) yang memiliki kesempatan kerja lebih banyak, pendapatan yang lebih tinggi, fasilitas sosial ekonomi yang lebih baik, harapan masa depan, kebebasan pribadi yang lebih besar dan sebagainya. Alasan untuk pindah ke tempat lain dapat bersifat sosial, misalnya keamanan atau bersifat ekonomi.

Taft dan Robins dalam Jayadinata mengungkapkan lima hal sebagai alasan berpindah (migrasi) yang bersifat ekonomi, yakni:

- a. Untuk menghindarkan diri dari kemiskinan;
- b. Berusaha untuk mempertahankan standar hidupnya dan jika mungkin untuk meningkatkannya;
- c. Tidak puas karena pendapatannya menurun, jika dibandingkan dengan orang – orang lain;
- d. Walaupun di tempat asalnya seseorang dapat memnuhi kebutuhan pokok, tetapi ia tertarik oleh kesenangan material di tempat lain;
- e. Dorongan bagi bermigrasi yang bersifat ekonomi yang kuat (terjadi di beberapa wilayah, dimana kekayaan kebendaan dihargai secara positif)

(Jayadinata, 1999)

#### - Angka Migrasi Keluar (*Out Migration*)

Migrasi masuk adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (*area of origin*). Angka ini menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 orang penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun.

$$\text{Angka Migrasi Keluar} = \frac{O}{P} \times k$$

Dimana O adalah jumlah migrasi keluar dan P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dalam penelitian ini, angka O atau jumlah migrasi keluar yang digunakan merupakan banyaknya

kejadian pindah keluar yang dialami oleh satu keluarga selama kurun waktu satu tahun yang lalu. Dengan asumsi bahwa pada setiap kejadian (pindah keluar) yang dialami terdiri dari satu orang karena apabila menggunakan data jumlah pindah keluar yang terlapor pada tingkat kabupaten/kota dikhawatirkan tidak semua keluarga yang mengalami akan melaporkan kejadian tersebut.

- Angka Migrasi Masuk (*In Migration*)

Migrasi masuk adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (*area of destination*). Angka ini menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 orang penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

$$\text{Angka Migrasi Masuk} = \frac{I}{P} \times k$$

Dimana I adalah jumlah migrasi masuk dan P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dalam penelitian ini, angka I atau jumlah migrasi masuk yang digunakan merupakan banyaknya kejadian pindah masuk yang dialami oleh satu keluarga selama kurun waktu satu tahun yang lalu. Dengan asumsi bahwa pada setiap kejadian (pindah masuk) yang dialami terdiri dari satu orang karena apabila menggunakan data jumlah pindah masuk yang terlapor pada tingkat kabupaten/kota dikhawatirkan tidak semua keluarga yang mengalami akan melaporkan kejadian tersebut.

- Angka Migrasi Bersih (*Netto Migration*)

Migrasi bersih atau neto adalah yaitu selisih banyaknya migran masuk dan keluar ke dan dari suatu kabupaten atau kota. Angka ini menunjukkan banyaknya selisih antara migran yang masuk dan migran yang keluar per 1000 orang penduduk suatu daerah dalam waktu satu tahun.

$$\text{Angka Migrasi Bersih} = \frac{I - O}{P} \times k$$

Dimana I adalah jumlah migrasi masuk, O adalah jumlah migrasi keluar dan P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dalam penelitian ini, angka I atau jumlah migrasi masuk yang digunakan merupakan banyaknya kejadian pindah masuk yang dialami oleh satu keluarga selama kurun waktu satu tahun yang lalu. Sedangkan angka O atau jumlah migrasi keluar yang digunakan merupakan banyaknya kejadian pindah keluar yang dialami oleh satu keluarga selama kurun waktu satu tahun yang lalu. Dengan asumsi bahwa pada setiap kejadian (pindah masuk maupun keluar) yang dialami terdiri dari satu orang karena apabila menggunakan data jumlah pindah masuk yang terlapor pada tingkat kabupaten/kota dikhawatirkan tidak semua keluarga yang mengalami akan melaporkan kejadian tersebut. (*Lembaga Demografi FEUI, 2007*)

## **2.5 Produk Domestik Regional Bruto**

Doubleday dalam Iskandar (1977) mengemukakan bahwa menurut hukum penduduk, kenaikan kemakmuran akan mengakibatkan turunnya daya reproduktivitas manusia. Dikatakan pula bahwa golongan masyarakat yang berpendapatan rendah seringkali berkeluarga besar, sedangkan golongan orang yang berkedudukan baik (lebih sejahtera) menunjukkan keluarga kecil dan bahkan menjadi lebih kecil sehingga terkadang tidak mempunyai keturunan lagi.

Kegiatan ekonomi suatu daerah secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat yang diindikasikan dengan produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Produk domestik regional bruto juga merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian di suatu daerah,



dimana produk domestik regional bruto disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai produk domestik regional bruto harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas sembilan sektor ekonomi. Struktur ekonomi sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh sektor ekonomi terhadap pembentukan produk domestik regional bruto pada daerah tertentu. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu (*time series*) maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Terdapat kecenderungan bahwa setiap tahun telah terjadi pergeseran antar sektor ekonomi, dan pergeseran tersebut diakibatkan adanya perkembangan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi.

Selain itu, produk domestik regional bruto merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu ada beberapa konsep definisi untuk dapat mempermudah pengguna yang perlu diketahui :

➤ **Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Pasar**

Produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian didalam suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dimaksud dengan nilai tambah adalah selisih nilai produksi dengan biaya antara.

➤ **Pendapatan Regional**

Produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi dalam proses produksi, tidak seluruhnya menjadi milik suatu daerah/wilayah karena termasuk pendapatan penduduk wilayah lain. Sebaliknya produk domestik regional neto tersebut harus pula ditambah dengan pendapatan yang diperoleh daerah lain. Bila pendapatan penduduk yang masuk dan keluar dapat dicatat dengan pendapatan neto antar wilayah/daerah didapatkan pendapatan regional (produk regional bruto). Karena sulitnya memperoleh data pendapatan masuk dan keluar suatu wilayah maka produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor diasumsikan sama dengan pendapatan regional atau pendapatan neto ( $\text{Pendapatan Masuk} = \text{Pendapatan Keluar} = 0$ ).

➤ **Pendapatan Regional Perkapita**

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Pendapatan perkapita tersebut diperoleh dengan membagi pendapatan regional/produk regional neto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

➤ **Produk Domestik dan Produk Regional**

Didalam literatur ekonomi terdapat perbedaan pengertian produk domestik dengan produk regional. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian kegiatan produksi yang dilakukan disuatu daerah, beberapa faktor produksinya berasal dari wilayah/ daerah lain seperti tenaga kerja, mesin dan modal. Dengan demikian nilai produksi di wilayah atau domestik tidak sama dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Akhirnya timbullah perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Produk regional merupakan produk domestik ditambah pendapatan yang mengalir kedalam wilayah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan yang mengalir keluar wilayah sehingga dapat dikatakan produk regional merupakan produk yang betul-betul dihasilkan oleh

faktor-faktor produksi yang dimiliki penduduk dalam wilayah yang bersangkutan.

➤ **Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan**

Pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga berlaku yang telah dikurangi dengan perkembangan inflasi dikenal dengan pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga konstan. Dalam penelitian ini, angka pendapatan domestik regional bruto yang digunakan merupakan angka pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2000. Penggunaan angka ini dimaksudkan agar terdapat penyamaan dasar pendapatan karena sama-sama mengacu pada tahun dasar, yakni tahun 2000. (Rahardja, 2008)

## 2.6 Penggunaan Tanah

Dikemukakan oleh Giyarsih (2000) dalam hasil studinya bahwa terdapat empat faktor yang terbukti secara sangat meyakinkan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan yakni, kepemilikan barang-barang rumah tangga, kepemilikan dan kualitas rumah, ketenagakerjaan dan produktivitas tanah. Dalam faktor produktivitas lahan, salah satu indikator yang digunakan oleh Giyarsih (2000) adalah proporsi tanah pertanian per luas wilayah.

Tanah (*land*) adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tata guna tanah (*land use*) adalah pengaturan penggunaan tanah. Kajiannya meliputi penggunaan permukaan bumi di daratan dan di lautan karena tanah dianggap mewakili samudera dan laut serta daratan yang tidak dihuni dan dimiliki oleh perseorangan atau lembaga melainkan oleh seluruh umat manusia. (Jayadinata, 1999)

Penggunaan tanah di wilayah perdesaan umumnya digunakan untuk sektor pertanian, perkebunan dan perikanan (kegiatan ekonomi ekstraktif dan reproduktif). Sedangkan penggunaan tanah di wilayah perkotaan umumnya merupakan peruntukan bagi sektor industri dan jasa (kegiatan industri fasilitatif). Selain kedua hal tersebut, penggunaan tanah di wilayah

perdesaan dan perkotaan meliputi sosial-ekonomi, yakni permukiman, pendidikan, pemerintahan, jasa kesehatan, dan lain-lain.

Wilayah yang lebih luas terdiri atas perdesaan dan beberapa kota, yang secara administratif dapat disebut sebagai kabupaten. Sebagai suatu kesatuan, penggunaan tanah di wilayah perdesaan dan perkotaan akan saling berkaitan. Dalam hal ini, penggunaan tanah meliputi transportasi, irigasi, sanitasi, rekreasi dan telekomunikasi.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Penelitian

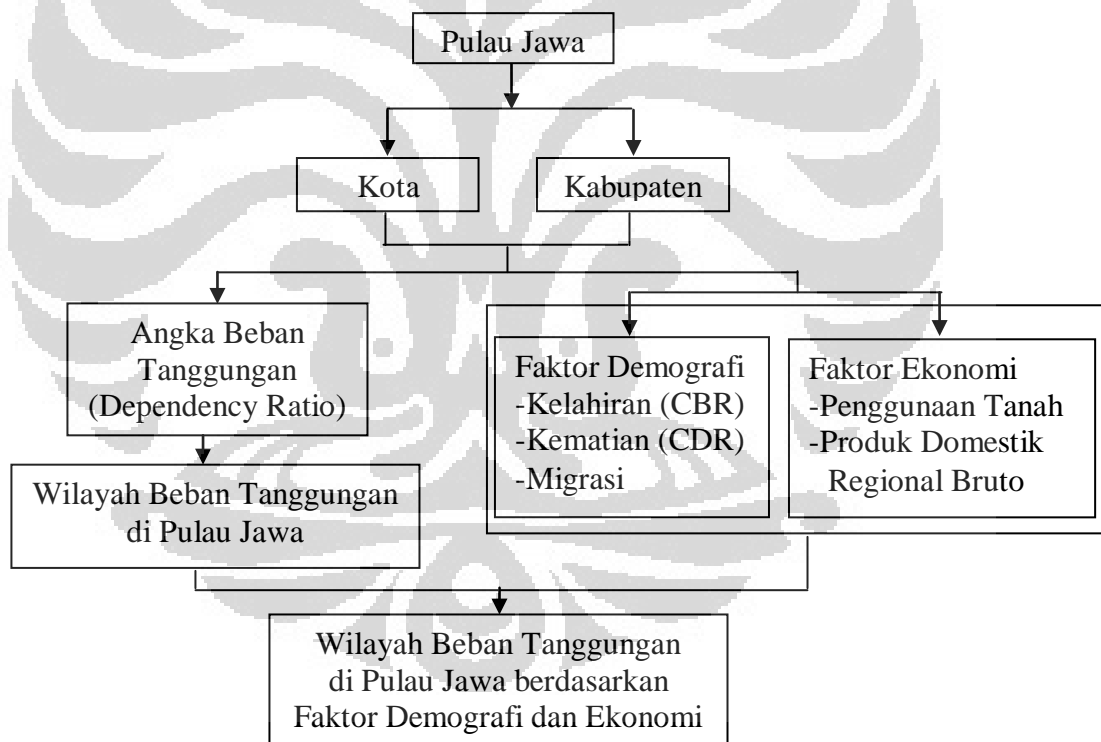
Teori transisi demografi merupakan teori yang menerangkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi (kelahiran dan kematian tinggi) ke tingkat pertumbuhan rendah (kelahiran dan kematian rendah). Berdasarkan teori ini, dapat kita lihat bahwa hal yang paling mempengaruhi kenaikan maupun penurunan jumlah penduduk merupakan kelahiran dan kematian. Pada wilayah yang memiliki angka kelahiran dan kematian yang tinggi dapat dipastikan memiliki jumlah penduduk dengan umur median (usia produktif) yang lebih rendah, dimana akan mengakibatkan tingginya rasio beban tanggungan. Pada wilayah yang memiliki angka kelahiran dan kematian yang rendah, karakteristik penduduk wilayah ini adalah jumlah penduduk dengan umur median tinggi, sehingga angka beban tanggungan menjadi rendah.

Pada struktur umur penduduk, salah satu hal yang mempengaruhi perubahannya selain kelahiran dan kematian adalah migrasi. Menurut Pola Migrasi, migrasi biasanya terjadi pada kelompok umur dewasa (usia produktif). Jika migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar, maka akan terjadi kenaikan jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut. Hal ini akan berpengaruh terhadap angka beban tanggungan.

Dalam Geografi Penduduk (*Population Geography*), angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) digunakan sebagai alat untuk mengukur tekanan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk semakin besar pula kebutuhan akan sumberdaya, sehingga tekanan terhadap sumberdaya juga meningkat. Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Salah satu permasalahan kependudukan yang akan timbul akibat ledakan penduduk adalah permasalahan permukiman, lapangan kerja,

pendidikan, pangan dan gizi, kesehatan dan mutu lingkungan (kesejahteraan).

Dalam buku Teori-Teori Kependudukan (*Iskandar, 1977*), Doubleday mengemukakan bahwa menurut hukum penduduk, kenaikan kemakmuran akan mengakibatkan turunnya daya reproduktivitas manusia. Dikatakan pula bahwa golongan masyarakat yang berpendapatan rendah seringkali berkeluarga besar, sedangkan golongan orang yang berkedudukan baik (lebih sejahtera) menunjukkan keluarga kecil dan bahkan menjadi lebih kecil sehingga terkadang tidak mempunyai keturunan lagi. Jika pendapatan lebih tinggi, maka daya reproduktivitas menurun sehingga jumlah penduduk pada kelompok umur muda akan rendah sehingga angka beban tanggungan menjadi rendah.



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

Pulau Jawa terdiri atas 110 daerah administrasi yakni 78 kabupaten dan 32 kota. Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, maka didapat angka beban tanggungan dimana akan membentuk wilayah beban tanggungan di pulau ini. Berdasarkan data kelahiran; kematian;

migrasi; penggunaan tanah; dan produk domestik regional bruto, maka didapatkan wilayah kematian kasar; wilayah kelahiran kasar; wilayah migrasi (keluar, masuk, dan bersih); dan wilayah produk domestik regional bruto yang dianalisis secara spasial dan statistik dengan wilayah beban tanggungan sehingga didapat wilayah beban tanggungan di Pulau Jawa berdasarkan faktor demografi dan ekonomi (Gambar 3.1).

### **3.2 Daerah Penelitian**

Daerah penelitian meliputi Pulau Jawa yang terdiri atas 78 kabupaten dan 32 kota. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiap kota dan kabupaten di Pulau Jawa berdasarkan wilayah administrasinya.

### **3.3 Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang mempengaruhi angka beban tanggungan. Variabel yang digunakan yaitu jumlah penduduk menurut kelompok umur, angka kematian kasar, angka kelahiran kasar, angka migrasi keluar Pulau Jawa, angka migrasi masuk Pulau Jawa, angka migrasi bersih Pulau Jawa, jumlah produk regional domestik bruto dan jenis penggunaan tanah Pulau Jawa.

### **3.4 Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini diperlukan data jumlah penduduk menurut kelompok umur, angka kematian kasar, angka kelahiran kasar, angka migrasi neto dan jenis penggunaan tanah. Data tersebut diperoleh dari instansi-instansi terkait yaitu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pertanahan Nasional. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan angka beban tanggungan antar kabupaten, antar kota dan antar kabupaten-kota.

Jenis data sekunder meliputi :

- a. Peta administrasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- b. Data kematian, kelahiran, migrasi dan pendapatan domestik regional bruto dari Badan Pusat statistik.
- c. Data Penggunaan Tanah dan data fisik wilayah Pulau Jawa dari Badan Pertanahan Nasional.
- d. Menentukan tempat tujuan survey dengan mempertimbangkan klasifikasi angka beban tanggungan (masuk dalam klasifikasi beban tanggungan tinggi) dan keanomalian tempat (misal: variabel-variabel hampir tidak mempengaruhi angka beban tanggungan di kabupaten/kota tersebut). Kemudian unit analisis diperkecil menjadi tingkat kecamatan (memiliki angka beban tanggungan yang paling tinggi) dan unit analisis diperkecil lagi menjadi tingkat kelurahan atau desa dengan angka beban tanggungan paling tinggi.
- e. Data – data penunjang lainnya dari Badan Pusat Statistik.

### 3.5 Pengolahan Data

- a. Menentukan angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) tingkat kota dan kabupaten dengan cara mengklasifikasikan menjadi tiga kelas yakni tinggi, sedang dan rendah. Adapun data yang akan digunakan merupakan hasil pembulatan.

Yang sebelumnya dihitung dengan rumus :

$$\text{Angka Beban Tanggungan} = \frac{\text{penduduk usia non - produktif}}{\text{penduduk usia produktif}} \times 100$$

- b. Data kematian, kelahiran, migrasi masuk dan keluar dan pendapatan domestik regional bruto konstan yang diperoleh kemudian dihitung dan diklasifikasikan untuk pembuatan peta dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan distribusi data. Adapun data yang akan digunakan merupakan hasil pembulatan.
- c. Membuat peta-peta pendukung analisis seperti peta wilayah kematian kasar Pulau Jawa, peta wilayah kelahiran kasar Pulau Jawa, peta



wilayah migrasi penduduk Pulau Jawa, peta wilayah produk domestik regional bruto Pulau Jawa dan peta penggunaan tanah Pulau Jawa dengan menggunakan program Arc.view GIS 3.3.

- d. Melakukan Uji statistik yaitu dengan menggunakan program SPSS.

### 3.6 Analisis Data

Dari data yang telah diolah kemudian dilakukan analisis dengan cara :

1. Analisis Spasial (Keruangan) yaitu dengan cara membandingkan peta wilayah beban tanggungan dengan peta wilayah kematian kasar Pulau Jawa, peta wilayah kelahiran kasar Pulau Jawa, peta wilayah migrasi penduduk Pulau Jawa, peta wilayah produk domestik regional bruto Pulau Jawa dan peta penggunaan tanah Pulau Jawa.
2. Analisis Statistik dengan menggunakan metode *Pearson Product Moment* untuk mengetahui hubungan antara angka beban tanggungan dengan variabel yang mempengaruhi angka beban tanggungan seperti jumlah kematian kasar, jumlah kelahiran kasar, jumlah migrasi menuju Pulau Jawa, jumlah produk domestik regional bruto dan jenis penggunaan tanah di Pulau Jawa.

Rumusnya adalah :

$$r_{XY} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan :

$r_{XY}$  = Besaran korelasi

Y = Angka beban tanggungan

X = Kelahiran, kematian, migrasi, produk domestik regional bruto, penggunaan tanah.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PULAU JAWA**

#### **4.1 Letak**

Pulau Jawa terletak di antara 105°12' Bujur Timur hingga 114°36' Bujur Timur dan 5°52'12" Lintang Selatan hingga 8°46'48" Lintang Selatan. Secara geografis, Pulau Jawa terletak di dalam rangkaian kepulauan dengan Pulau Sumatera di sebelah barat laut dan Pulau Bali di sebelah timur. Di sebelah timur laut Pulau ini terletak Pulau Kalimantan. Pulau ini juga berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Sunda di sebelah barat, Samudera Hindia di sebelah selatan dan Selat Bali di sebelah timur.

#### **4.2 Pembagian Administrasi**

Pulau Jawa saat ini terbagi menjadi enam provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Pulau ini terbagi atas 117 daerah administrasi yakni, 83 kabupaten dan 34 kota. Berikut merupakan perincian jumlah kabupaten dan kota di Pulau Jawa.

Menurut perkembangan sejarah, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama dibentuk di Indonesia, terdiri atas 16 kabupaten dan 9 kota. Provinsi Banten merupakan hasil pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000, memiliki enam daerah administrasi yang terdiri dari empat kabupaten dan dua kota. Provinsi DKI Jakarta memiliki enam daerah administrasi yang terdiri atas satu kabupaten dan lima kota. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan enam kota. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, administrasinya terdiri atas empat kabupaten dan satu kota. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas di antara enam provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, terbagi

menjadi 38 daerah administrasi yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. (untuk seluruh nama daerah administrasi, dapat dilihat pada lampiran tabel 1 dan tabel 2)

Meskipun total keseluruhan daerah administrasi di Pulau Jawa terdiri atas 83 kabupaten dan 34 kota, namun tidak semuanya masuk dalam wilayah penelitian. Adapun daerah yang tidak masuk dalam wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Alasan tidak dimasukkannya kelima kabupaten yang telah disebutkan ke dalam wilayah penelitian adalah karena kelima kabupaten tersebut berada di luar wilayah Pulau Jawa. Oleh karena data yang digunakan adalah data pada tahun 2005, maka kedua kota yang telah disebutkan tidak dimasukkan ke dalam wilayah penelitian karena kedua kota tersebut baru mengalami pemekaran pada kurun tahun 2007-2008. Dapat dilihat pada lampiran **peta 1** dengan judul Administrasi Pulau Jawa.

### **4.3 Penduduk**

#### **4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Berdasarkan hasil pengolahan data survey penduduk antar sensus pada tahun 2005 (SUPAS 2005) oleh Badan Pusat Statistik, berikut merupakan jumlah penduduk menurut kelompok umur yang ada di Pulau Jawa. Data akan digambarkan secara umum dan dapat dilihat pada lampiran (**tabel 1** dan **tabel 2**).

Di Pulau Jawa, jumlah penduduk pada setiap kelompok umur yang tertinggi didominasi oleh tingkat kabupaten dan yang terendah didominasi oleh tingkat kota.

Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk kelompok umur 0 hingga 15 tahun tertinggi yakni 1.315.628 jiwa. Untuk daerah dengan jumlah terendah pada kelompok umur yang sama terdapat di Kabupaten Kulonprogo yang memiliki total 91.005 jiwa. Untuk jumlah penduduk kelompok umur 15 hingga 64 tahun yang

tertinggi di Pulau Jawa terdapat di Kabupaten Bandung dengan total 2.621.001 jiwa. Pada kelompok usia produktif, jumlah penduduk terendah terdapat di Kabupaten Kulonprogo. Untuk jumlah penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas tertinggi di pulau ini terdapat di Kabupaten Malang yang mencapai 161.505 jiwa. Pada kelompok usia yang sama, Kabupaten Batang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terendah yakni 29.157 jiwa.

Pada tingkat kota, Kota Jakarta Timur merupakan daerah dengan jumlah penduduk kelompok umur 0 hingga 15 tahun tertinggi dengan total 584.409 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk dengan kelompok umur 0 hingga 15 tahun yang terendah terdapat di Kota Mojokerto dengan jumlah 26.005 jiwa. Pada kelompok usia produktif, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk tertinggi yang hampir mencapai dua juta jiwa dan daerah yang memiliki jumlah penduduk terendah pada kelompok umur yang sama adalah Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk hanya sekitar 79 ribu jiwa. Selain memiliki jumlah penduduk usia produktif tertinggi, Kota Surabaya juga memiliki jumlah penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas tertinggi dengan jumlah 121.667 jiwa. Untuk kelompok umur yang sama, Kota Mojokerto merupakan daerah dengan jumlah penduduk terendah yakni 6.308 jiwa.

#### **4.3.2 Kematian**

Menurut hasil pengolahan data survey penduduk antar sensus pada tahun 2005 (SUPAS 2005) oleh Badan Pusat Statistik, berikut merupakan deskripsi secara umum mengenai banyaknya jiwa yang mengalami kejadian kematian selama tahun 2005 di Pulau Jawa. Data akan digambarkan secara menyeluruh dan dapat dilihat pada tabel-tabel (**tabel 3** hingga **tabel 4**) yang disertakan pada lampiran.

Berdasarkan data SUPAS 2005 tersebut, jumlah kejadian kematian tertinggi di Pulau Jawa terdapat di Kabupaten Bogor dengan kejadian dialami oleh 21.269 jiwa. Sedangkan untuk jumlah kejadian kematian paling

rendah terdapat di Kota Magelang dengan total kematian dialami oleh 312 jiwa.

Pada tingkat kabupaten, jumlah kejadian kematian paling rendah terjadi di Kabupaten Madiun dengan total kejadian 1.070 jiwa mengalami kematian. Pada tingkat kota, Kota Surabaya menjadi kota yang memiliki jumlah kejadian kematian tertinggi dengan kejadian kematian dialami oleh 13.676 jiwa di kota ini.

### **4.3.3 Kelahiran**

Menurut hasil pengolahan data survey penduduk antar sensus pada tahun 2005 (SUPAS 2005) oleh Badan Pusat Statistik, berikut jumlah penduduk yang mengalami kejadian kelahiran selama tahun 2005 yang terdapat di Pulau Jawa. Data akan digambarkan secara umum dan dapat dilihat pada lampiran (**tabel 5** hingga **tabel 6**).

Kejadian kelahiran tertinggi di Pulau Jawa berdasarkan data SUPAS 2005 terjadi di Kabupaten Bogor dengan jumlah kejadian mencapai 96.519 jiwa. Selain itu, terdapat pula beberapa kabupaten dengan kejadian kelahiran yang tinggi, termasuk di antaranya adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Cianjur menempati peringkat tertinggi kedua, ketiga dan keempat dengan jumlah kejadian berturut-turut sebanyak 66.254 jiwa, 54.999 jiwa dan 48.009 jiwa. Bertolak belakang dengan kelima kabupaten di atas, Kabupaten Magetan mengalami kejadian kelahiran paling rendah pada tingkat kabupaten yakni dengan jumlah kelahiran dialami hanya terdapat 5.580 jiwa yang lahir.

Dengan jumlah kejadian kelahiran sebanyak 68.021 jiwa, Kota Surabaya menjadi daerah yang tertinggi kejadian kelahirannya di tingkat kota. Untuk kejadian yang sama, Kota Blitar memiliki angka kejadian kelahiran paling rendah di Pulau Jawa, yakni terjadi kelahiran sejumlah 1.530 jiwa saja.

#### **4.3.4 Migrasi**

Menurut hasil pengolahan data survey penduduk antar sensus pada tahun 2005 (SUPAS 2005) oleh Badan Pusat Statistik, berikut jumlah keluarga yang mengalami kejadian pindah atau migrasi (baik masuk maupun keluar) selama kurun waktu satu tahun dihitung dari waktu pelaksanaan SUPAS 2005 yang terdapat di Pulau Jawa. Data akan digambarkan secara umum dan dapat dilihat pada lampiran (**tabel 7** hingga **tabel 8**).

Berdasarkan data hasil SUPAS 2005 tersebut, daerah dengan jumlah kejadian migrasi tertinggi di Pulau Jawa adalah Kabupaten Cilacap dengan total kejadian 47.959 jiwa yang mengalami kejadian migrasi keluar dan 18.740 jiwa yang mengalami kejadian migrasi masuk. Kabupaten Temanggung menjadi daerah dengan jumlah kejadian migrasi masuk paling rendah di Pulau Jawa, yakni hanya terdapat 277 jiwa yang mengalami kejadian tersebut. Sedangkan untuk daerah dengan jumlah kejadian migrasi keluar paling rendah pada tingkat kabupaten terdapat pada Kabupaten Situbondo dengan jumlah 1.370 jiwa yang mengalami pindah keluar.

Kota Bandung merupakan daerah dengan kejadian migrasi keluar paling tinggi pada tingkat kota, yang ditunjukkan dengan jumlah kejadian migrasi keluar sebanyak 21.743 jiwa. Sedangkan untuk kejadian migrasi masuk tertinggi pada tingkat kota terdapat di Kota Jakarta Timur yang jumlah kejadiannya mencapai 16.611 jiwa yang mengalami. Untuk kejadian migrasi keluar terendah di Pulau Jawa terdapat di Kota Mojokerto dengan jumlah 499 jiwa saja yang mengalami kejadian tersebut. Untuk kejadian migrasi masuk terendah pada tingkat kota terdapat di Kota Magelang dengan jumlah 348 jiwa yang mengalami pindah masuk.

#### **4.4 Produk Domestik Regional Bruto**

Menurut data Badan Pusat Statistik yang diambil dari buku yang berjudul Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2004-2008, berikut adalah jumlah Produk Domestik Regional Bruto pada

tahun 2005 di Pulau Jawa. Data tersebut akan digambarkan secara umum dan dapat dilihat pada lampiran (**tabel 9** hingga **tabel 10** dan **peta 2**).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, daerah dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 tertinggi di Pulau Jawa terdapat pada Kota Jakarta Pusat dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto mencapai hampir tujuh puluh enam trilyun rupiah sedangkan untuk jumlah Produk Domestik Regional Bruto konstan menurut tahun 2000 yang paling rendah terdapat di Kota Blitar dengan jumlah 574 milyar rupiah. Setelah Kota Blitar, terdapat Kota Banjar di peringkat kedua terendah dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto konstan menurut tahun 2000 sebesar 588 milyar rupiah. Selain Kota Jakarta Pusat, kota-kota lain yang jumlah Produk Domestik Regional Bruto konstan menurut tahun 2000 juga termasuk tinggi adalah Kota Surabaya dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto konstan menurut tahun 2000 hampir mencapai enam puluh trilyun rupiah dan Kota Tangerang dengan jumlah mencapai lebih dari dua puluh satu trilyun rupiah. Sedangkan untuk tingkat kabupaten, jumlah Produk Domestik Regional Bruto konstan menurut tahun 2000 yang tertinggi terdapat di Kabupaten Bekasi dengan jumlah mencapai 41.319 milyar rupiah dan jumlah Produk Domestik Regional Bruto konstan menurut tahun 2000 yang terendah terdapat di Kabupaten Pacitan dengan jumlah mencapai 1,162 trilyun rupiah.

#### **4.5 Penggunaan Tanah**

Menurut Peta Penggunaan Tanah di Pulau Jawa (**peta 3**) dari Badan Pertanahan Nasional tahun 2005, hampir keseluruhan daerah kota merupakan permukiman. Untuk Kota Bandung, Kota Blitar, Kota Cirebon, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Magelang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Pekalongan, Kota Probolinggo, Kota Surakarta, Kota Tangerang, Kota Tegal dan Kota Yogyakarta, selain penggunaan tanah sebagai permukiman pada kota-kota ini hanya terdapat persawahan dan pertanian tanah kering. Pada Kota Bekasi, Kota Cimahi,

Kota Depok, Kota Madiun, Kota Salatiga dan Kota Surabaya meski didominasi oleh permukiman tetapi pada kota ini juga terdapat persawahan, pertanian tanah kering dan perkebunan. Pada Kota Bogor dan Kota Sukabumi juga didominasi oleh permukiman, namun kedua kota ini selain terdapat persawahan, pertanian tanah kering dan perkebunan juga terdapat sebagian kecil hutan. Pada Kota Cilegon, Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya terdapat permukiman, perkebunan, hutan dan sama-sama didominasi oleh tanah persawahan dan pertanian tanah kering. Pada Kota Kediri dan Kota Semarang yang didominasi oleh permukiman, terdapat pula persawahan, pertanian tanah kering dan hutan (serta sebagian kecil tanah perkebunan pada Kota Semarang). Berbeda dengan kota-kota lainnya, selain memiliki permukiman, persawahan dan tanah terbuka, Kota Batu lebih didominasi oleh Hutan (lihat **peta 3**).

Berbeda dengan daerah perkotaan, menurut Peta Penggunaan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional tahun 2007, mayoritas kabupaten lebih didominasi oleh persawahan dan pertanian tanah kering semusim. Seperti pada Kabupaten Bandung, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Brebes, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Magelang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Serang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Selain didominasi oleh persawahan dan pertanian tanah kering semusim, adapula beberapa kabupaten yang didominasi oleh hutan dan perkebunan seperti pada Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ciamis, Kabupaten



Garut, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Wonogiri.

Adapun kabupaten-kabupaten lainnya yang memiliki komposisi yang hampir seimbang antara penggunaan tanah sebagai persawahan dan pertanian tanah kering semusim, hutan ataupun perkebunan adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Gresik, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tulungagung.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)

Berdasarkan rumus beban tanggungan, yang menggunakan data jumlah penduduk yang digolongkan menurut umur spesifik (umur 0 hingga 15 tahun, 15 hingga 64 tahun dan 65 tahun ke atas) dimana jumlah penduduk usia tidak produktif (umur nol hingga 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif (umur 15 hingga 64 tahun) dan dikali dengan konstanta (umumnya 100) maka akan didapat angka beban tanggungan (dapat dilihat pada lampiran **tabel 11** hingga **12**). Data yang disajikan dalam Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa merupakan data hasil pengklasifikasian menurut distribusi data.

Pada Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa (**peta 4**) dapat dilihat bahwa wilayah beban tanggungan tinggi cenderung mengelompok di Pulau Jawa bagian barat daya yang meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi. Selain itu terdapat pula wilayah beban tanggungan tinggi Pulau Jawa bagian selatan yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo. Untuk wilayah angka beban tanggungan rendah sebagian besar mengelompok pada Pulau Jawa bagian barat laut yang terdiri dari Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kota Tangerang. Sebagian lainnya cenderung mengelompok pada bagian timur Pulau Jawa yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kota

Surabaya. Adapula sebagian wilayah beban tanggungan rendah yang tersebar seperti Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sleman, Kota Bandung, Kota Cilegon, Kota Malang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Dari jumlah total sebanyak 34 daerah yang masuk dalam wilayah klasifikasi ini, 71% di antaranya merupakan kota. Untuk wilayah angka beban tanggungan sedang cenderung lebih tersebar secara merata di seluruh bagian Pulau Jawa. Daerah-daerah yang masuk dalam wilayah angka beban tanggungan sedang lebih didominasi oleh kabupaten. Dari total 62 daerah, 89% di antaranya merupakan kabupaten. Adapun kota-kota yang masuk dalam wilayah ini adalah Kota Banjar, Kota Blitar, Kota Cirebon, Kota Salatiga, Kota Sukabumi, Kota Probolinggo dan Kota Tasikmalaya.

Meskipun masuk dalam klasifikasi beban tanggungan sedang, Kota Tasikmalaya memiliki *dependency ratio* yang tertinggi yakni 50,49% yang artinya terdapat 50 penduduk dengan usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 jiwa penduduk dengan usia produktif di kota ini. Sedangkan untuk kota yang memiliki angka beban tanggungan terendah adalah Kota Jakarta Selatan dengan angka 35,32% yang artinya terdapat 35 orang (pembulatan) penduduk dengan usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 jiwa penduduk dengan usia produktif di kota ini.

Pada antar kabupaten, *dependency ratio* yang tertinggi terdapat di Kabupaten Kebumen dengan angka 63,87 % yang artinya terdapat 64 penduduk dengan usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 jiwa penduduk dengan usia produktif di kabupaten ini. Untuk angka beban tanggungan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Situbondo dengan angka 38,97% yang artinya terdapat 39 jiwa (pembulatan) penduduk dengan usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 jiwa penduduk dengan usia produktif di kabupaten ini.

Besarnya angka beban tanggungan pada tingkat kabupaten cenderung sama dengan kabupaten-kabupaten di sekitar kabupaten tersebut sehingga terbentuk suatu konsentrasi wilayah beban tanggungan. Misalnya pada Kabupaten Serang-Kabupaten Lebak-Kabupaten Pandeglang (ABTT),

Kabupaten Karanganyar-Kabupaten Ngawi (ABTR) dan lain-lain. Namun, terdapat pula beberapa kabupaten yang meskipun berdekatan namun masuk dalam klasifikasi yang berbeda. Misalnya pada Kabupaten Banjarnegara-Kabupaten Pekalongan (ABTS) yang terletak di antara Kabupaten Purbalingga-Kabupaten Kebumen-Kabupaten Wonosobo (ABTT). Kedua kabupaten tersebut memiliki angka beban tanggungan sebesar 55% (hanya berbeda 1% dari klasifikasi angka beban tanggungan tinggi). Selain itu, ada pula Kabupaten Ngawi yang berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Wonogiri namun lebih rendah angka beban tanggungannya. Hal ini terjadi karena angka migrasi keluar di Kabupaten Ngawi cenderung lebih rendah dibanding kedua kabupaten tersebut.

Berbeda dengan tingkat kabupaten, mayoritas angka beban tanggungan pada tingkat kota masuk dalam klasifikasi beban tanggungan rendah. Hampir seluruh kota tersebut terletak di sepanjang Pulau Jawa bagian utara. Namun pada kota-kota yang masuk dalam klasifikasi beban tanggungan sedang cenderung tersebar dan terletak pada Pulau Jawa bagian selatan kecuali Kota Probolinggo yang terletak pada Pulau Jawa bagian utara. Hal ini menunjukkan bahwa pada kota-kota yang terletak di bagian utara Pulau Jawa cenderung lebih sejahtera dibandingkan dengan kota-kota yang terletak pada bagian selatan Pulau Jawa. Hal ini juga dapat ditunjukkan oleh penggunaan lahan pada kota-kota di Pulau Jawa bagian utara yang didominasi oleh permukiman sedangkan pada kota-kota di Pulau Jawa bagian selatan mayoritas masih terdiri atas permukiman, persawahan dan pertanian sawah kering. Bahkan pada dua kota dengan angka beban tanggungan tertinggi (Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar dengan angka beban tanggungan 50%), penggunaan lahannya didominasi oleh persawahan dan pertanian tanah kering.

### **5.1.1 Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)**

Berdasarkan rumus kematian kasar, yang menggunakan data jumlah kejadian kematian dan jumlah penduduk, dimana jumlah kejadian kematian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dan dikali dengan

konstanta (umumnya 1.000) maka akan didapat angka kematian kasar (dapat dilihat pada lampiran **tabel 13** hingga **tabel 14**). Data yang disajikan dalam Peta Wilayah Kematian Kasar di Pulau Jawa merupakan data hasil pengklasifikasian menurut distribusi data.

Pada Peta Wilayah Kematian Kasar di Pulau Jawa (**peta 5**), wilayah angka kematian kasar tinggi cenderung tersebar di Pulau Jawa bagian tengah. Pada wilayah tersebut, Kota Sukabumi menjadi daerah dengan angka kematian kasar tertinggi yang memiliki angka kematian kasar sebesar 30,83‰ (artinya terdapat 31 jiwa yang mengalami kematian setiap 1.000 jiwa di kota ini). Sedangkan untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Ciamis menjadi daerah dengan angka kematian kasar tertinggi yakni 20,36‰ yang artinya terdapat 20 jiwa yang mengalami kematian setiap 1.000 jiwa di kabupaten ini. Selain kedua daerah tersebut, masih ada empat kabupaten lain yang masuk dalam wilayah klasifikasi angka kematian tinggi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Batang (dengan angka kematian kasar 17,51‰), Kabupaten Mojokerto (dengan angka kematian kasar 17,39‰), Kabupaten Indramayu (dengan angka kematian kasar 17,27‰) dan Kabupaten Bojonegoro (dengan angka kematian kasar 16,86‰). Adapun kota lain yang juga masuk dalam wilayah ini adalah Kota Probolinggo dengan angka kematian kasar 19,66‰ yang artinya terdapat 20 jiwa yang mengalami kematian setiap 1.000 jiwa di kota ini.

Untuk klasifikasi angka kematian kasar rendah, wilayahnya cenderung mengelompok di Pulau Jawa bagian barat termasuk di dalamnya Kota Jakarta Pusat (dengan angka kematian kasar 7,04‰), Kota Jakarta Utara (dengan angka kematian kasar 6,81‰), Kota Tangerang (dengan angka kematian kasar 5,66‰), Kota Bogor (dengan angka kematian kasar 5,04‰), Kota Jakarta Barat (dengan angka kematian kasar 4,88‰), Kota Bandung yang menjadi daerah dengan angka kematian paling rendah pada tingkat kota (dengan angka kematian kasar 4,73‰ dimana artinya terdapat 5 jiwa yang mengalami kematian setiap 1.000 jiwa di kota ini), Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tangerang. Adapula sebagian wilayah

yang terkonsentrasi pada bagian tengah Pulau Jawa, termasuk diantaranya adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Cirebon. Sedangkan sebagian lainnya tersebar secara merata di bagian lain Pulau Jawa seperti Kota Kediri (dengan angka kematian kasar 7,48‰), Kota Pasuruan (dengan angka kematian kasar 6,10‰), Kota Magelang (dengan angka kematian kasar 5,02‰), Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Serang (merupakan daerah dengan angka kematian kasar terendah di Pulau Jawa yakni sebesar 2,87‰ artinya terdapat 3 jiwa yang mengalami kematian setiap 1.000 jiwa penduduk di kabupaten ini), Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tuban.

### 5.1.2 Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*)

Berdasarkan rumus kelahiran kasar, yang menggunakan data jumlah kejadian kelahiran dan jumlah penduduk, dimana jumlah kejadian kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dan dikali dengan konstanta (umumnya 1.000) maka akan didapat angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CDR*). Dari hasil perhitungan tersebut, telah dilakukan pula pengklasifikasian data (dapat dilihat pada lampiran **tabel 15** hingga **tabel 16**). Data yang disajikan dalam Peta Wilayah Kelahiran Kasar di Pulau Jawa merupakan data hasil pengklasifikasian menurut distribusi data.

Berdasarkan Peta Wilayah Kelahiran Kasar di Pulau Jawa (**peta 6**), wilayah angka kelahiran kasar tinggi cenderung mengelompok di Pulau Jawa bagian barat, termasuk diantaranya adalah Kabupaten Bogor dengan angka kelahiran kasar 50,41‰ (merupakan daerah dengan angka kelahiran kasar tertinggi tingkat kabupaten), Kota Depok dengan angka kelahiran kasar 48,11‰ dan Kabupaten Cianjur dengan angka kelahiran kasar 46,17‰. Untuk bagian kedua, wilayah ini tersebar di bagian barat Pulau Jawa yang terdiri atas Kota Tasikmalaya dengan angka kelahiran kasar 52,21‰, Kota Sukabumi dengan angka kelahiran kasar 48,77‰, Kota

Tangerang dengan angka kelahiran kasar 48,75‰ dan Kota Cimahi dengan angka kelahiran kasar 47,46‰. Sedangkan untuk sebagian wilayah lainnya, cenderung mengelompok di Pulau Jawa bagian timur yang terdiri atas Kota Madiun (merupakan daerah yang memiliki angka kelahiran kasar tertinggi di Pulau Jawa dengan nilai *Crude Birth Rate* 59,06‰ dimana artinya terdapat 59 jiwa yang lahir pada setiap 1.000 jiwa penduduk di kota ini), Kota Surabaya (dengan angka kelahiran kasar 52,09‰), Kabupaten Gresik (dengan angka kelahiran kasar 47,69‰), Kabupaten Pasuruan (dengan angka kelahiran kasar 45,83‰) dan Kabupaten Nganjuk (dengan angka kelahiran kasar 45,82‰).

Untuk wilayah angka kelahiran kasar sedang, terdiri atas beberapa kelompok wilayah. Wilayah yang paling dominan cenderung mengelompok pada Pulau Jawa bagian barat yang terdiri atas Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Timur. Adapun kelompok wilayah kelahiran kasar sedang yang lain terletak di Pulau Jawa bagian tengah, dimana konsentrasi ini terbagi menjadi dua yakni Kabupaten Banjarnegara-Kabupaten Banyumas-Kabupaten Kebumen-Kabupaten Pekalongan-Kabupaten Tegal dan Kabupaten Bantul-Kabupaten Boyolali-Kabupaten Kulonprogo-Kabupaten Magelang-Kabupaten Semarang-Kabupaten Sleman-Kabupaten Sragen. Adapun kelompok lain yang terbentuk pada wilayah ini terletak pada Pulau Jawa bagian timur yang terdiri atas Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kota Batu, Kota Malang dan Kota Mojokerto.

Wilayah angka kelahiran kasar rendah terdiri atas 39 kabupaten dan 13 kota. Wilayah ini cenderung mengelompok pada Pulau Jawa bagian

tengah dan timur. Untuk wilayah yang teletak pada bagian tengah dan timur Pulau Jawa terdiri atas 36 kabupaten dan 9 kota. Pada salah satu kabupatennya adalah Kabupaten Ngawi yang menjadi daerah dengan angka kelahiran kasar terendah pada tingkat kabupaten (memiliki *Crude Birth Rate* yang paling rendah juga di Pulau Jawa yakni 15,26‰ yang artinya terdapat 15 jiwa yang lahir di setiap 1.000 jiwa penduduk). Selain itu terdapat pula pada salah satu kotanya yakni Kota Yogyakarta yang memiliki *Crude Birth Rate* terendah pada tingkat kota (memiliki angka kelahiran kasar 20,16 ‰ atau terdapat 20 jiwa yang lahir setiap 1.000 jiwa penduduk kota ini). Selain itu, terdapat pula wilayah yang mengelompok pada Pulau Jawa bagian barat, wilayah ini terdiri atas Kota Bogor (dengan angka kelahiran kasar 29,10‰), Kota Cilegon (dengan angka kelahiran kasar 28,95‰), Kota Bekasi (dengan angka kelahiran kasar 25,92‰), Kabupaten Serang (dengan angka kelahiran kasar 23,75‰), Kabupaten Lebak (dengan angka kelahiran kasar 22,11‰), Kabupaten Subang (dengan angka kelahiran kasar 21,95‰) dan Kota Jakarta Utara (dengan angka kelahiran kasar 20,83‰).

### **5.1.3 Angka Migrasi (*Out Migration, In Migration and Netto Migration*)**

#### **A. Migrasi Keluar (*Out Migration*)**

Berdasarkan rumus migrasi, yang menggunakan data jumlah kejadian migrasi keluar dan jumlah penduduk, dimana jumlah kejadian migrasi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dan dikali dengan konstanta (umumnya 1.000) maka akan didapat angka migrasi keluar (*Out Migration*). Dari hasil perhitungan tersebut, telah dilakukan pula pengklasifikasian data. Berikut data hasil perhitungan angka migrasi keluar di Pulau Jawa (data dapat dilihat pada lampiran **tabel 17** hingga **tabel 18**, sedangkan untuk persebarannya dapat dilihat pada **peta 7**).

Pada angka migrasi keluar, wilayah migrasi tinggi cenderung mengelompok pada Pulau Jawa bagian tengah yang terdiri atas Kabupaten Cilacap (merupakan daerah dengan angka migrasi keluar tertinggi tingkat kabupaten yakni 59,23‰ yang artinya terdapat 59 jiwa



yang mengalami pindah keluar pada setiap 1.000 jiwa penduduk di kabupaten ini), Kabupaten Purbalingga (dengan angka migrasi keluar 37,48‰), Kabupaten Wonosobo (dengan angka migrasi keluar 36,42‰), Kabupaten Kulonprogo (dengan angka migrasi keluar 36,07‰), Kabupaten Pekalongan (dengan angka migrasi keluar 34,22‰), Kabupaten Banjarnegara (dengan angka migrasi keluar 32,08‰) dan Kabupaten Purworejo (dengan angka migrasi keluar 32,06‰). Selain pada bagian tengah pulau, terdapat pula beberapa wilayah yang mengelompok pada Pulau Jawa bagian tenggara yang terdiri dari Kabupaten Blitar (dengan angka migrasi keluar 44,04‰), Kabupaten Madiun (dengan angka migrasi keluar 40,56‰), Kabupaten Ponorogo (dengan angka migrasi keluar 38,19‰) dan Kabupaten Tulungagung (dengan angka migrasi keluar 34,06‰). Adapula beberapa daerah yang masuk dalam klasifikasi migrasi keluar tinggi yang tersebar seperti Kota Sukabumi (angka migrasi keluar tertinggi pada tingkat kota dan Pulau Jawa yakni 88,91‰ yang artinya terdapat 89 jiwa yang mengalami pindah keluar setiap 1.000 jiwa penduduknya), Kabupaten Sragen (dengan angka migrasi keluar 39,84), Kabupaten Sukoharjo (dengan angka migrasi keluar 37,39‰), Kabupaten Majalengka (dengan angka migrasi keluar 33,33‰) dan Kabupaten Semarang (dengan angka migrasi keluar 32,31‰).

Untuk angka migrasi keluar dengan klasifikasi rendah, terdapat beberapa kelompok wilayah. Salah satunya terletak pada Pulau Jawa bagian barat yang terdiri dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Serang Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Jakarta Barat, dan Kota Jakarta Pusat. Sedangkan untuk kelompok wilayah yang lain terbentuk pada Pulau Jawa bagian timur yang termasuk di dalamnya Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kota Batu dan Kota Surabaya. Selain

itu, terdapat pulau kelompok wilayah yang terbentuk namun hanya terdiri dari beberapa kabupaten dan kota saja, antara lain adalah Kabupaten Brebes-Kabupaten Cirebon-Kota Cirebon, Kabupaten Demak-Kabupaten Jepara-Kabupaten Kudus dan Kabupaten Blora-Kabupaten Ngawi-Kabupaten Tuban. Adapula beberapa daerah yang tersebar, daerah-daerah tersebut adalah Kota Surakarta (dengan angka migrasi keluar 12,32‰), Kota Salatiga (dengan angka migrasi keluar 12,04‰), Kota Kediri (dengan angka migrasi keluar 12,01‰), Kabupaten Temanggung (merupakan daerah dengan angka migrasi keluar paling rendah tingkat kabupaten yakni 10,04‰ yang artinya terdapat 10 jiwa yang mengalami pindah keluar pada setiap 1.000 jiwa penduduk di kabupaten tersebut), Kota Mojokerto (dengan angka migrasi keluar 8,92‰) dan Kota Pekalongan (merupakan daerah dengan angka migrasi keluar paling rendah tingkat kota dan Pulau Jawa yakni 7,90‰ yang artinya terdapat 8 jiwa yang mengalami pindah keluar pada setiap 1.000 jiwa penduduk di kota ini).

Pada klasifikasi angka migrasi keluar sedang, wilayahnya cenderung mengelompok pada Pulau Jawa bagian tengah, terdiri atas 34 kabupaten dan 11 kota. Selain mengelompok di bagian tengah pulau, terdapat pula beberapa wilayah yang tersebar, antara lain Kabupaten Jember, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Cilegon, Kota Depok, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kota Tangerang.

## **B. Migrasi Masuk (*In Migration*)**

Berdasarkan rumus migrasi, yang menggunakan data jumlah kejadian migrasi masuk dan jumlah penduduk, dimana jumlah kejadian migrasi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dan dikali dengan konstanta (umumnya 1.000) maka akan didapat angka migrasi masuk (*In Migration*). Dari hasil perhitungan tersebut, telah dilakukan pula pengklasifikasian data. Berikut data hasil perhitungan angka migrasi

masuk di Pulau Jawa (data dapat dilihat pada lampiran **tabel 17** hingga **tabel 18** dan **peta 8**).

Pada wilayah angka migrasi masuk tinggi, wilayahnya tersebar secara merata hampir di seluruh bagian Pulau Jawa. Wilayah tersebut terdiri atas Kabupaten Cilacap (merupakan daerah dengan angka migrasi masuk tertinggi tingkat kabupaten dan Pulau Jawa yakni 23,18‰ yang artinya terdapat 23 jiwa yang mengalami pindah masuk pada setiap 1.000 jiwa penduduknya), Kabupaten Blitar (dengan angka migrasi masuk 22,53‰), Kabupaten Klaten (dengan angka migrasi masuk 19,92‰), Kabupaten Gresik (dengan angka migrasi masuk 18,73‰), Kota Yogyakarta (merupakan daerah dengan angka migrasi masuk tertinggi tingkat kota yakni 18,69‰ yang artinya terdapat 19 jiwa yang mengalami pindah masuk setiap 1.000 jiwa penduduk di kota ini), Kabupaten Madiun (dengan angka migrasi masuk 18,17‰), Kabupaten Pati (dengan angka migrasi masuk 17,77‰), Kota Cilegon (dengan angka migrasi masuk 16,79‰), Kabupaten Sleman (dengan angka migrasi masuk 16,57‰) dan Kota Sukabumi (dengan angka migrasi masuk 16,51‰).

Untuk angka migrasi masuk rendah, wilayahnya tersebar secara merata pada seluruh bagian pulau ini, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Brebes, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Jember, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Pandeglang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Serang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung (merupakan daerah dengan angka migrasi masuk paling rendah di tingkat kabupaten

dan Pulau Jawa yakni 0,81‰ yang artinya terdapat 1 jiwa yang mengalami pindah masuk pada setiap 1.000 jiwa penduduknya), Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Wonogiri, Kota Batu, Kota Magelang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Pekalongan (merupakan daerah dengan angka migrasi masuk paling rendah di tingkat kota yakni 5,13‰ yang artinya terdapat 5 jiwa yang mengalami pindah masuk pada setiap 1.000 jiwa penduduknya), Kota Semarang, Kota Surabaya dan Kota Tegal.

Berdasarkan Peta Wilayah Migrasi Masuk di Pulau Jawa, wilayah angka migrasi masuk sedang tersebar secara merata pada bagian barat dan tengah pulau. Wilayah ini terdiri atas 35 kabupaten dan 20 kota.

### **C. Migrasi Bersih (*Netto Migration*)**

Berdasarkan rumus migrasi, yang menggunakan data jumlah kejadian migrasi (selisih antara migrasi masuk dan keluar) dan jumlah penduduk, dimana jumlah kejadian migrasi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dan dikali dengan konstanta (umumnya 1.000) maka akan didapat angka migrasi bersih (*Netto Migration*). Dari hasil perhitungan tersebut, telah dilakukan pula pengklasifikasian data. Berikut data hasil perhitungan angka migrasi bersih atau neto di Pulau Jawa (data dapat dilihat pada lampiran **tabel 17** dan **tabel 18**, sedangkan untuk persebarannya dapat dilihat pada **peta 9** untuk migrasi bersih).

Pada wilayah angka migrasi bersih tinggi, terdapat kecenderungan pengelompokan wilayah yang terletak di Pulau Jawa bagian barat dan timur. Wilayah angka migrasi tinggi pada bagian barat Pulau Jawa terdiri dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Serang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cilegon, Kota Cimahi (memiliki angka migrasi bersih paling tinggi pada tingkat kota dan Pulau Jawa yakni

2,91‰ yang artinya terdapat selisih 3 jiwa antara banyaknya jumlah migran masuk dengan migran keluar pada setiap 1.000 jiwa penduduknya dan tanda positif menunjukkan bahwa lebih banyak migran yang masuk dibandingkan dengan migran keluar), Kota Depok, Kota Tangerang. Sedangkan pada kelompok wilayah di bagian timur pulau terdiri atas Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blora, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Gresik, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Jepara, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pati, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo (merupakan daerah dengan angka migrasi bersih paling tinggi pada tingkat kabupaten yakni 2,64‰ yang artinya terdapat selisih 3 jiwa antara banyaknya jumlah migran masuk dengan migran keluar pada setiap 1.000 jiwa penduduknya dan tanda positif menunjukkan bahwa lebih banyak migran yang masuk dibandingkan dengan migran keluar), Kabupaten Sleman, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta. Selain itu, terdapat pula beberapa daerah yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih tinggi namun letaknya tersebar yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Temanggung, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Kediri, Kota Pekalongan, Kota Tasikmalaya dan Kota Tegal.

Wilayah angka migrasi bersih rendah di Pulau Jawa cenderung mengelompok pada bagian tengah pulau. Wilayah ini terdiri atas Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap (merupakan daerah dengan angka migrasi bersih paling rendah pada tingkat kabupaten yakni -36,05‰ yang artinya terdapat selisih 36 jiwa antara banyaknya jumlah migran masuk dengan migran keluar pada setiap 1.000 jiwa penduduknya dan tanda negatif menunjukkan bahwa lebih banyak migran yang keluar dibandingkan dengan migran masuk), Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten

Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Meskipun wilayah angka migrasi bersih terkonsentrasi pada bagian tengah pulau, adapula wilayah yang meski letaknya di bagian tengah pulau namun lebih cenderung mendekat ke arah Pulau Jawa bagian timur. Wilayah tersebut terdiri atas Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonosobo. Selain itu, adapula daerah yang terletak di bagian barat Pulau Jawa yakni Kabupaten Majalengka dan Kota Sukabumi (merupakan daerah dengan angka migrasi bersih paling rendah pada tingkat kabupaten yakni -72,4‰ yang artinya terdapat selisih 72 jiwa antara banyaknya jumlah migran masuk dengan migran keluar pada setiap 1.000 jiwa penduduknya dan tanda negatif menunjukkan bahwa lebih banyak migran yang keluar dibandingkan dengan migran masuk).

## 5.2 *Dependency Ratio* dengan Angka Kematian Kasar

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Kematian Kasar di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 5**), terdapat 44 kabupaten dan 14 kota atau sekitar 52,73% dari keseluruhan daerah yang sesuai dengan teori Transisi Demografi, dimana artinya kematian terjadi pada penduduk kelompok usia produktif sehingga ketika angka kematian kasarnya rendah maka angka beban tanggungan menjadi rendah begitupun sebaliknya. Terdiri atas empat kabupaten dan sembilan kota dengan klasifikasi angka kematian rendah - angka beban tanggungan rendah serta 40 kabupaten dan lima kota dengan klasifikasi angka kematian kasar sedang - angka beban tanggungan sedang. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka kematian kasar dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kabupaten dan kota dalam bentuk persen.

**Tabel 5.1**  
**Hasil Overlay Angka Kematian Kasar dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten Dan Kota (%)**

<b>DR/CDR</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>
<b>Rendah</b>	11,82	18,18	0,00
<b>Sedang</b>	12,73	40,91	6,36
<b>Tinggi</b>	3,64	6,36	0,00

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan


### *A. Kota di Pulau Jawa*

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Kematian Kasar di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 5**) terdapat sembilan kota atau 23,18% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar rendah - angka beban tanggungan rendah (Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Tangerang dan Kota Magelang), lima kota atau 15,62% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar sedang - angka beban tanggungan sedang (Kota Banjar, Kota Blitar, Kota Depok, Kota Salatiga dan Kota Tasikmalaya), 16 kota atau 50% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar sedang - angka beban tanggungan rendah (Kota Batu, Kota Bekasi, Kota Cilegon, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pekalongan, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Yogyakarta) dan dua kota atau 6,25% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar tinggi - angka beban tanggungan sedang (Kota Probolinggo dan Kota Sukabumi). Pada 14 kota pertama menunjukkan bahwa kematian terjadi pada penduduk kelompok usia produktif sehingga ketika angka kematiannya rendah/sedang maka angka beban tanggungan juga rendah/sedang. Sedangkan pada 18 kota lainnya menunjukkan bahwa kematian terjadi pada penduduk kelompok usia tidak produktif sehingga ketika angka kematiannya lebih tinggi maka angka beban tanggungan

menjadi lebih rendah. Berikut adalah tabel hasil overlay angka kematian kasar dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kota dalam bentuk persen.

**Tabel 5.2**  
**Hasil Overlay Angka Kematian Kasar dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kota (%)**

DR/CDR	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	28,13	50,00	0,00
Sedang	0,00	15,62	6,25
Tinggi	0,00	0,00	0,00

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

Hal tersebut didukung oleh hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment* yang menunjukkan nilai  $r = 0,366$  dan nilai  $P = 0,039$ . Adapun kesimpulan dari hasil tersebut adalah bahwa antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*), pada kota-kota yang terdapat di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa antara keduanya mempunyai hubungan dan berpola positif. Artinya semakin tinggi Angka Kematian Kasar maka Angka Beban Tanggungannya akan semakin tinggi pula. Berikut merupakan tabel hasil korelasi antara angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan angka kematian kasar (*Crude Death Rate*) pada kota di Pulau Jawa.

**Tabel 5.3**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan**  
**Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) pada kota**

		Dependency Ratio	CDR
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	.366
	Sig. (2-tailed)		.039
	N	32	32
CDR	Pearson Correlation	.366*	1
	Sig. (2-tailed)	.039	
	N	32	32

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## ***B. Kabupaten di Pulau Jawa***

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Kematian Kasar di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 5**) terdapat empat kabupaten atau 5,13% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar sedang - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Jember, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sleman), 14 kabupaten atau 17,95% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar rendah - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Bandung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tuban), lima kabupaten atau 6,36% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar tinggi - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Batang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Mojokerto), tujuh kabupaten atau 8,97% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar sedang - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo), empat kabupaten atau 5,13% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar rendah - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Lebak, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi), empat kabupaten atau 5,13% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar rendah - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Kudus, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Situbondo) dan 40 kabupaten atau 51,28% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar sedang - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blitar, Kabupaten Blora,

Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Demak, Kabupaten Gresik, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Jombang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Wonogiri). Dari hasil overlay tersebut, sebanyak 44 kabupaten atau 56,41% dari 78 kabupaten (masuk dalam klasifikasi angka kematian kasar rendah - angka beban tanggungan rendah dan angka kematian kasar sedang - angka beban tanggungan sedang) menunjukkan bahwa kematian lebih banyak dialami oleh penduduk usia produktif sehingga ketika angka kematian kasarnya rendah maka angka beban tanggungan akan rendah pula. Sedangkan untuk 34 kabupaten lainnya menunjukkan bahwa kematian lebih banyak dialami oleh penduduk usia tidak produktif sehingga ketika angka kematian kasarnya rendah maka angka beban tanggungan akan tinggi maupun sebaliknya.

Meski demikian, dari hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment*, diketahui bahwa antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*), pada kabupaten-kabupaten yang terdapat di Pulau Jawa menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan. Hal ini didukung dengan nilai  $r = 0,010$  dan nilai  $P = 0,933$  yang menunjukkan tidak terdapatnya korelasi. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka kematian kasar dan angka beban tanggungan dalam bentuk persen dan tabel hasil korelasi antara angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan angka kematian kasar (*Crude Death Rate*) pada kabupaten di Pulau Jawa.

**Tabel 5.4**  
**Hasil Overlay Angka Kematian Kasar dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten (%)**

DR/CDR	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	5,13	5,13	0,00
Sedang	17,95	51,28	6,36
Tinggi	5,13	8,97	0,00

: Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

**Tabel 5.5**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)**  
**dengan Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) pada kabupaten**

		Dependency Ratio	CDR
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	.010
	Sig. (2-tailed)		.933
	N	78	78
CDR	Pearson Correlation	.010	1
	Sig. (2-tailed)	.933	
	N	78	78

### 5.2.2 *Dependency Ratio* dengan Angka Kelahiran Kasar

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Kelahiran Kasar di Pulau Jawa Jawa (**peta 4** dan **peta 6**), bahwa terdapat 36 kabupaten dan 13 kota atau sekitar 44,55% dari keseluruhan daerah yang sesuai dengan teori Transisi Demografi, dimana artinya kelahiran menyebabkan jumlah penduduk usia tidak produktif semakin bertambah sehingga berakibat pada angka beban tanggungan. Maka ketika angka kelahiran kasar rendah, yang terjadi adalah angka beban tanggungan akan menjadi rendah maupun sebaliknya. Keseluruhan wilayah tersebut terdiri atas empat kabupaten dan 10 kota dengan klasifikasi angka kelahiran kasar rendah - angka beban tanggungan rendah, 30 kabupaten dan tiga kota dengan klasifikasi

angka kelahiran kasar sedang - angka beban tanggungan sedang serta dua kabupaten dengan klasifikasi angka kelahiran kasar tinggi - angka beban tanggungan tinggi. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka kelahiran kasar dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kabupaten dan kota dalam bentuk persen.

**Tabel 5.6**  
**Hasil Overlay Angka Kelahiran Kasar dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten Dan Kota (%)**

DR/CBR	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	12,73	11,81	5,44
Sedang	26,36	30,00	40,00
Tinggi	4,54	3,64	1,82

: Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

#### **A. Kota di Pulau Jawa**

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Kelahiran Kasar di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 6**) terdapat 10 kota atau 31,25% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar rendah - angka beban tanggungan rendah (Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cilegon, Kota Jakarta Utara, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal dan Kota Yogyakarta), tiga kota atau 9,37% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar sedang - angka beban tanggungan sedang (Kota Banjar, Kota Depok dan Kota Salatiga), 10 kota atau 31,25% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar sedang - angka beban tanggungan rendah (Kota Bandung, Kota Batu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Magelang, Kota Malang, Kota Mojokerto dan Kota Surakarta), lima kota atau 15,63% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar tinggi - angka beban tanggungan rendah (Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Tangerang), dua kota atau 6,25% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar tinggi - angka beban tanggungan sedang (Kota Sukabumi

dan Kota Tasikmalaya) dan dua kota atau 6,25% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar rendah - angka beban tanggungan sedang (Kota Blitar dan Kota Probolinggo). Pada 13 kota pertama (Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cilegon, Kota Depok, Kota Jakarta Utara, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal dan Kota Yogyakarta) menunjukkan bahwa kelahiran menyebabkan jumlah penduduk usia tidak produktif semakin bertambah sehingga berakibat pada angka beban tanggungan. Oleh sebab itu, ketika angka kelahiran kasar rendah maka angka beban tanggungan akan menjadi rendah maupun sebaliknya. Pada 17 kota lainnya (klasifikasi angka kelahiran kasar sedang - angka beban tanggungan rendah, angka kelahiran kasar tinggi - angka beban tanggungan rendah dan angka kelahiran kasar tinggi - angka beban tanggungan sedang) menunjukkan bahwa penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif, jadi meskipun angka kelahiran tinggi namun angka beban tanggungan tetap rendah. Sedangkan untuk Kota Blitar dan Kota Probolinggo, menunjukkan bahwa penduduk kelompok usia tidak produktif 65 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk kelompok usia tidak produktif di bawah 15 tahun sehingga angka beban tanggungan cenderung lebih tinggi.

Meski demikian, menurut hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment*, diperoleh nilai  $r = 0,215$  dan nilai  $P = 0,238$  yang artinya adalah bahwa antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*), pada kota-kota yang terdapat di Pulau Jawa, menunjukkan tidak terdapatnya hubungan antara kedua variabel tersebut. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka kelahiran kasar dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kota dalam bentuk persen dan tabel hasil korelasi Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) pada kota di Pulau Jawa.

**Tabel 5.7**  
**Hasil Overlay Angka Kelahiran Kasar dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kota (%)**

DR/CBR	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	31,25	31,25	15,63
Sedang	6,25	9,37	6,25
Tinggi	0,00	0,00	0,00

: Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

**Tabel 5.8**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)**  
**dengan Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) pada kota**

		Dependency Ratio	CBR
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	.215
	Sig. (2-tailed)		.238
	N	32	32
CBR	Pearson Correlation	.215	1
	Sig. (2-tailed)	.238	
	N	32	32

### ***B. Kabupaten di Pulau Jawa***

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Kelahiran Kasar di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 6**) terdapat empat kabupaten atau 5,13% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar rendah - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Jember, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Ngawi), 30 kabupaten atau 38,46% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar sedang - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Bandung, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jepara, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kuningan,

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magelang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tegal, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Wonogiri), dua kabupaten atau 1,82% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar tinggi - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur), tiga kabupaten atau 3,84% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar sedang - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Sleman), satu kabupaten atau 5,44% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar tinggi - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Pasuruan), dua kabupaten atau 1,82% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar tinggi - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Gresik dan Kabupaten Nganjuk), 27 kabupaten atau 34,62% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar rendah - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Blora, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tulungagung), lima kabupaten atau 6,41% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka kelahiran kasar rendah - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Lebak, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Serang dan Kabupaten Wonosobo) dan empat kabupaten atau 5,13% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka

kelahiran kasar sedang - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Garut, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Sukabumi). Pada 36 kabupaten pertama (klasifikasi angka kelahiran kasar rendah - angka beban tanggungan rendah, klasifikasi angka kelahiran kasar sedang - angka beban tanggungan sedang dan klasifikasi angka kelahiran kasar tinggi - angka beban tanggungan tinggi) menunjukkan bahwa kelahiran menyebabkan jumlah penduduk usia tidak produktif berubah sehingga berakibat pada angka beban tanggungan. Oleh sebab itu, ketika angka kelahiran kasar rendah maka angka beban tanggungan akan menjadi rendah maupun sebaliknya. Pada enam kabupaten berikutnya (Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk Kabupaten Pasuruan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Sleman) menunjukkan bahwa penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif, jadi meskipun angka kelahiran tinggi namun angka beban tanggungan tetap rendah. Sedangkan untuk 36 kabupaten lainnya (klasifikasi angka kelahiran kasar rendah - angka beban tanggungan sedang, klasifikasi angka kelahiran kasar rendah - angka beban tanggungan tinggi, klasifikasi angka kelahiran kasar sedang - angka beban tanggungan tinggi) menunjukkan bahwa penduduk kelompok usia tidak produktif 65 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk kelompok usia tidak produktif di bawah 15 tahun sehingga angka beban tanggungan cenderung lebih tinggi.


Meski demikian, menurut hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment*, diperoleh nilai  $r = 0,218$  dan nilai  $P = 0,055$ . Kesimpulan dari hasil tersebut yaitu antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka kelahiran kasar dan angka beban tanggungan tingkat kabupaten dalam bentuk persen dan tabel hasil



korelasi antara angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate*) pada kabupaten di Pulau Jawa.

**Tabel 5.9**  
**Hasil Overlay Angka Kelahiran Kasar dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten (%)**

DR/CBR	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	5,13	3,84	5,44
Sedang	34,61	38,46	1,82
Tinggi	6,41	5,13	1,82

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

**Tabel 5.10**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)**  
**dengan Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) pada kabupaten**

		Dependency Ratio	CBR
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	.218
	Sig. (2-tailed)		.055
	N	78	78
CBR	Pearson Correlation	.218	1
	Sig. (2-tailed)	.055	
	N	78	78

### 5.2.3 *Dependency Ratio* dengan Angka Migrasi Keluar

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Migrasi Keluar di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 7**), bahwa terdapat 42 kabupaten dan 16 kota atau sekitar 52,72% dari keseluruhan daerah yang sesuai dengan pola migrasi, dimana artinya apabila angka migrasi keluar tinggi maka jumlah penduduk usia produktif pada suatu daerah akan berkurang dan mengakibatkan angka beban tanggungan menjadi relatif lebih tinggi begitupun sebaliknya. Terdiri atas lima kabupaten dan 11 kota dengan klasifikasi angka migrasi keluar rendah - angka beban tanggungan

rendah, 33 kabupaten dan lima kota dengan klasifikasi angka migrasi keluar sedang - angka beban tanggungan sedang serta empat kabupaten dengan klasifikasi angka migrasi keluar tinggi - angka beban tanggungan tinggi. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka migrasi keluar dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kabupaten dan kota dalam bentuk persen.

**Tabel 5.11**  
**Hasil Overlay Angka Migrasi Keluar dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten dan Kota (%)**

DR/Mo	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	14,54	15,45	0,00
Sedang	14,54	34,54	10,92
Tinggi	2,73	3,64	3,64

: Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

#### **A. Kota di Pulau Jawa**

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Migrasi Keluar di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 7**) terdapat 11 kota atau 34,38% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar rendah - angka beban tanggungan rendah (Kota Batu, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pekalongan, Kota Surabaya dan Kota Surakarta), lima kota atau 15,63% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar sedang - angka beban tanggungan sedang (Kota Banjar, Kota Blitar, Kota Depok, Kota Probolinggo dan Kota Tasikmalaya), 14 kota atau 43,75% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar sedang - angka beban tanggungan rendah (Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Madiun, Kota Magelang, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Semarang, Kota Tangerang, Kota Tegal dan Kota Yogyakarta), satu kota yakni Kota Sukabumi yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar tinggi - angka beban tanggungan sedang, satu kota yakni Kota Salatiga yang

masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar rendah - angka beban tanggungan sedang. Pada 16 kota pertama dengan klasifikasi angka migrasi keluar rendah - angka beban tanggungan rendah dan angka migrasi keluar sedang - angka beban tanggungan sedang, menunjukkan bahwa pada kota-kota tersebut migrasi keluar terjadi pada kelompok usia produktif sehingga ketika angka migrasi keluar rendah maka angka beban tanggungan cenderung rendah dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan pada 15 kota berikutnya (Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Madiun, Kota Magelang, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Semarang, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Tegal dan Kota Yogyakarta), justru menunjukkan bahwa migrasi keluar terjadi pada kelompok usia tidak produktif (tua maupun muda) sehingga ketika angka migrasi keluar tinggi maka angka beban tanggungan relatif lebih rendah. Berbeda dengan kota-kota lainnya, Kota Salatiga memiliki klasifikasi angka migrasi keluar rendah - angka beban tanggungan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pada kota ini merupakan daerah tujuan atau memiliki faktor penarik (*pull factor*) lebih kuat dibandingkan dengan faktor pendorongnya. Oleh sebab itu, ketika angka migrasi keluarnya rendah, angka beban tanggungan di kota ini justru cenderung lebih tinggi.

Namun, berdasarkan hasil yang didapatkan dari perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment*, diperoleh bahwa antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Angka Migrasi Keluar (*Out Migration*), pada kota-kota yang terdapat di Pulau Jawa, menunjukkan tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Kesimpulan ini diperoleh atas dasar nilai  $r = 0,235$  dan nilai  $P = 0,196$  pada hasil perhitungan tersebut. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka migrasi keluar dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kota dalam bentuk persen dan tabel hasil korelasi antara angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan angka migrasi keluar (*Out Migration*) pada kota di Pulau Jawa.

**Tabel 5.12**  
**Hasil Overlay Angka Migrasi Keluar dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kota (%)**

DR/Mo	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	34,38	43,75	0,00
Sedang	3,12	15,63	3,12
Tinggi	0,00	0,00	0,00

: Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

**Tabel 5.13**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan**  
**Angka Migrasi Keluar(*Out Migration*) pada kota**

		Dependency Ratio	Mo
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	.235
	Sig. (2-tailed)		.196
	N	32	32
Mo	Pearson Correlation	.235	1
	Sig. (2-tailed)	.196	
	N	32	32

### ***B. Kabupaten di Pulau Jawa***

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Migrasi Keluar di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 7**) terdapat lima kabupaten atau sekitar 15,63% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar rendah - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Kudus, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Situbondo), 33 kabupaten atau 42,30% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar sedang - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Gresik, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kuningan, Kabupaten

Lamongan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magelang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tegal, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Wonogiri), empat kabupaten atau sekitar 5,13% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar tinggi - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo), tiga kabupaten atau sekitar 3,85% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar sedang - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Jember, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sleman), 11 kabupaten atau sekitar 14,10% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar tinggi - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blitar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Tulungagung), 15 atau 19,23% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar rendah - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Blora, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Tuban), tiga kabupaten atau sekitar 3,85% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar rendah - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Serang) dan empat kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi keluar sedang - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Garut, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Sukabumi). Dari 78 kabupaten, terdapat 42 kabupaten (klasifikasi angka migrasi keluar rendah - angka beban tanggungan rendah, angka migrasi keluar sedang - angka beban tanggungan sedang dan angka migrasi keluar tinggi - angka beban

tanggung tinggi) yang menunjukkan bahwa pada kabupaten-kabupaten tersebut migrasi keluar terjadi pada kelompok usia produktif sehingga ketika angka migrasi keluar rendah maka angka beban tanggungan cenderung rendah dan begitu pula sebaliknya. Pada 14 kabupaten berikutnya yakni Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Blitar; Kabupaten Cilacap; Kabupaten Jember; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Kulon Progo; Kabupaten Majalengka; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Ponorogo; Kabupaten Semarang; Kabupaten Sleman; Kabupaten Sragen; Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Tulungagung, menunjukkan bahwa migrasi keluar terjadi pada kelompok usia tidak produktif (tua maupun muda) sehingga ketika angka migrasi keluar tinggi maka angka beban tanggungan relatif lebih rendah. Sedangkan pada 22 kabupaten lainnya, menunjukkan bahwa pada kabupaten-kabupaten tersebut merupakan daerah tujuan atau memiliki faktor penarik (*pull factor*) lebih kuat dibandingkan dengan faktor pendorongnya (*push factor*) sehingga ketika angka migrasi keluarnya rendah maka angka beban tanggungannya cenderung lebih tinggi.

Berbeda dengan tingkat kota, menurut hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment* pada tingkat kabupaten diperoleh nilai  $r = 0,231$  dan nilai  $P = 0,042$ . Adapun kesimpulan dari hasil tersebut adalah bahwa antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Angka Migrasi Keluar (*Out Migration*), menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut mempunyai hubungan dan berpola positif. Artinya semakin tinggi Angka Migrasi Keluar maka Angka Beban Tanggungan pun akan semakin tinggi. Berikut adalah tabel hasil overlay angka migrasi keluar dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kabupaten dalam bentuk persen serta tabel hasil korelasi antara angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan angka migrasi keluar (*Out Migration*) pada kabupaten di Pulau Jawa.

**Tabel 5.14**  
**Hasil Overlay Angka Migrasi Keluar dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten (%)**

DR/Mo	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	6,41	3,85	0,00
Sedang	19,23	42,30	14,10
Tinggi	3,85	5,13	5,13

■ : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

**Tabel 5.15**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)**  
**dengan Angka Migrasi Keluar(*Out Migration*) pada kabupaten**

		Dependency Ratio	Mo
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	.231*
	Sig. (2-tailed)		.042
	N	78	78
Mo	Pearson Correlation	.231*	1
	Sig. (2-tailed)	.042	
	N	78	78

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### 5.2.4 *Dependency Ratio* dengan Angka Migrasi Masuk

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Migrasi Masuk di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 8**), terdapat 46 kabupaten dan 17 kota atau sekitar 57,26% dari keseluruhan daerah yang sesuai dengan pola migrasi, dimana artinya apabila angka migrasi masuk tinggi maka jumlah penduduk usia produktif pada suatu daerah akan bertambah dan mengakibatkan angka beban tanggungan menjadi relatif lebih rendah begitupun sebaliknya. Terdiri atas dua kabupaten dan 14 kota dengan klasifikasi angka migrasi masuk sedang - angka beban tanggungan rendah, satu kabupaten dan dua kota dengan klasifikasi angka migrasi masuk tinggi - angka beban tanggungan rendah, 26 kabupaten dengan klasifikasi angka migrasi

masuk rendah - angka beban tanggungan sedang, enam kabupaten dan satu kota dengan klasifikasi angka migrasi masuk tinggi - angka beban tanggungan sedang, lima kabupaten dengan klasifikasi angka migrasi masuk rendah - angka beban tanggungan tinggi dan enam kabupaten dengan klasifikasi angka migrasi masuk sedang - angka beban tanggungan tinggi. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka migrasi keluar dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kabupaten dan kota dalam bentuk persen.

**Tabel 5.16**  
**Hasil Overlay Angka Migrasi Masuk dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten dan Kota (%)**

DR/Mi	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	12,74	14,54	2,73
Sedang	23,65	30,00	6,36
Tinggi	4,54	5,44	0,00

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

#### ***A. Kota di Pulau Jawa***

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Migrasi Masuk di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 8**), terdapat 14 kota atau sekitar 43,75% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk sedang - angka beban tanggungan rendah (Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Surakarta dan Kota Tangerang), dua kota atau sekitar 6,25% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk tinggi - angka beban tanggungan rendah (Kota Cilegon dan Kota Yogyakarta), satu kota yakni Kota Sukabumi yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk tinggi - angka beban tanggungan sedang, sembilan kota atau sekitar 28,13% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk rendah - angka beban tanggungan rendah (Kota Batu, Kota Magelang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota



Surabaya dan Kota Tegal) dan enam kota atau sekitar 18,75% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk sedang - angka beban tanggungan sedang (Kota Banjar, Kota Blitar, Kota Depok, Kota Probolinggo, Kota Salatiga dan Kota Tasikmalaya). Dari 32 kota di Pulau Jawa, sebanyak 17 kota atau sekitar 53,12% menunjukkan bahwa migrasi masuk pada kota-kota tersebut terjadi pada penduduk usia produktif sehingga ketika angka migrasi masuknya tinggi maka angka beban tanggungan akan menjadi relatif lebih rendah dan begitupun sebaliknya. Sedangkan pada kota-kota yang lain (klasifikasi angka migrasi masuk rendah - angka beban tanggungan rendah dan klasifikasi angka migrasi masuk sedang - angka beban tanggungan sedang) menunjukkan bahwa migrasi masuk pada kota-kota tersebut terjadi pada penduduk usia tidak produktif sehingga ketika angka migrasi masuknya rendah maka angka beban tanggungan akan menjadi relatif rendah dan begitupun sebaliknya. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka migrasi masuk dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kota dalam bentuk persen.

**Tabel 5.17**  
**Hasil Overlay Angka Migrasi Masuk dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kota (%)**

DR/Mi	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	28,13	43,75	6,25
Sedang	0,00	18,75	3,12
Tinggi	0,00	0,00	0,00

: Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment*, diperoleh nilai  $r = -0,183$  dan nilai  $P = 0,315$ . Kesimpulan dari hasil tersebut yaitu antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Angka Migrasi Masuk (*In Migration*), pada kota-kota yang terdapat di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Berikut adalah tabel hasil korelasi antara angka beban

tanggungannya (*Dependency Ratio*) dengan angka migrasi masuk (*In Migration*) pada kota-kota di Pulau Jawa.

**Tabel 5.18**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Angka Migrasi Masuk(*In Migration*) pada kota**

		Dependency Ratio	Mi
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	-.183
	Sig. (2-tailed)		.315
	N	32	32
Mi	Pearson Correlation	-.183	1
	Sig. (2-tailed)	.315	
	N	32	32

### ***B. Kabupaten di Pulau Jawa***

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Migrasi Masuk di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 8**), terdapat dua kabupaten atau 2,56% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk sedang - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Karanganyar), satu kabupaten yakni Kabupaten Sleman yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk tinggi - angka beban tanggungan rendah, 26 kabupaten atau sekitar 33,33% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk rendah - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Bandung, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Brebes, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pematang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Wonogiri), 6 kabupaten dengan klasifikasi angka migrasi masuk tinggi -

angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Blitar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Gresik, Kabupaten Klaten, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Pati), lima kabupaten atau 6,41% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk rendah - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Bogor, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi), 6 kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk sedang - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Lebak, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Wonosobo), lima kabupaten atau sekitar 6,41% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk rendah - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Jember, Kabupaten Kudus, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Situbondo) dan 27 kabupaten atau sekitar 34,63% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi masuk sedang - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Batang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jepara, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Subang dan Kabupaten Tulungagung). Dari 78 kabupaten, 46 kabupaten atau sekitar 58,96% menunjukkan bahwa migrasi masuk pada kabupaten-kabupaten tersebut terjadi pada penduduk usia produktif sehingga ketika angka migrasi masuknya tinggi maka angka beban tanggungan akan menjadi relatif lebih rendah dan begitupun sebaliknya. Sedangkan pada 32 kabupaten lainnya (klasifikasi angka migrasi masuk rendah - angka beban tanggungan rendah dan klasifikasi angka migrasi masuk sedang - angka beban tanggungan sedang) menunjukkan bahwa migrasi masuk terjadi pada penduduk usia tidak

produktif sehingga ketika angka migrasi masuknya rendah maka angka beban tanggungan akan menjadi relatif rendah dan begitupun sebaliknya.

Meski demikian, menurut hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment*, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Angka Migrasi Masuk (*In Migration*). Hal ini diketahui dengan melihat nilai r dan P yakni - 0,081 dan 0,481. Angka ini menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Berikut adalah tabel hasil overlay angka migrasi masuk dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kabupaten dalam bentuk persen serta tabel hasil korelasi antara angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan angka migrasi masuk (*In Migration*) pada kabupaten di Pulau Jawa.

**Tabel 5.19**  
**Hasil Overlay Angka Migrasi Masuk dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten (%)**

DR/Mi	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	6,41	2,56	1,28
Sedang	33,33	34,63	7,69
Tinggi	6,41	7,69	0,00

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

**Tabel 5.20**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)**  
**dengan Angka Migrasi Masuk(*In Migration*) pada kabupaten**


		Dependency Ratio	Mi
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	-.081
	Sig. (2-tailed)		.481
	N	78	78
Mi	Pearson Correlation	-.081	1
	Sig. (2-tailed)	.481	
	N	78	78

### 5.2.5 *Dependency Ratio* dengan Angka Migrasi Bersih

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Migrasi Bersih di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 9**), terdapat 53 kabupaten dan 31 kota atau sekitar 76,36% dari keseluruhan daerah yang sesuai dengan pola migrasi, dimana artinya apabila angka migrasi bersih tinggi, maka migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar sehingga jumlah penduduk usia produktif bertambah dan mengakibatkan angka beban tanggungan menjadi relatif lebih rendah, begitupun sebaliknya. Terdiri atas dua kabupaten dan empat kota dengan klasifikasi angka migrasi bersih sedang - angka beban tanggungan rendah, enam kabupaten dan 21 kota dengan klasifikasi angka migrasi bersih tinggi - angka beban tanggungan rendah, 13 kabupaten dan satu kota dengan klasifikasi angka migrasi bersih rendah - angka beban tanggungan sedang, 25 kabupaten dan lima kota dengan klasifikasi angka migrasi bersih tinggi - angka beban tanggungan sedang, empat kabupaten dengan klasifikasi angka migrasi bersih rendah - angka beban tanggungan tinggi dan tiga kabupaten dengan klasifikasi angka migrasi bersih sedang - angka beban tanggungan tinggi. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka migrasi bersih dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kabupaten dan kota dalam bentuk persen.

**Tabel 5.21**  
**Hasil Overlay Angka Migrasi Bersih dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten dan Kota (%)**

<b>DR/Mn</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>
<b>Rendah</b>	0,00	5,44	24,54
<b>Sedang</b>	12,74	20,00	27,27
<b>Tinggi</b>	3,64	2,73	3,64

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

#### **A. Kota di Pulau Jawa**

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Migrasi Bersih di Pulau Jawa Jawa

(peta 4 dan peta 9), terdapat 4 kota atau sekitar 12,5% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih sedang - angka beban tanggungan rendah (Kota Madiun, Kota Magelang, Kota Malang dan Kota Pasuruan), 21 kota atau sekitar 65,63% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih tinggi - angka beban tanggungan rendah (Kota Bandung, Kota Batu, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cilegon, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Tangerang, Kota Tegal dan Kota Yogyakarta), satu kota yakni Kota Sukabumi yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih rendah - angka beban tanggungan sedang, lima kota atau sekitar 15,63% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih tinggi - angka beban tanggungan sedang (Kota Banjar, Kota Blitar, Kota Depok, Kota Salatiga dan Kota Tasikmalaya) dan satu kota atau sekitar 3,12% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih sedang - angka beban tanggungan sedang (Kota Probolinggo). Dari 32 kota di Pulau Jawa, sebanyak sekitar 93,76% menunjukkan bahwa migrasi keluar lebih besar dan terjadi pada penduduk usia produktif sehingga ketika angka migrasi bersihnya rendah maka angka beban tanggungan akan menjadi relatif lebih tinggi. Pada Kota Sukabumi yang memiliki klasifikasi angka migrasi bersih rendah - angka beban tanggungan sedang, menunjukkan bahwa migrasi keluar lebih besar dan terjadi pada penduduk usia produktif sehingga ketika angka migrasi bersihnya rendah maka angka beban tanggungan akan menjadi relatif lebih tinggi. Sedangkan pada Kota Probolinggo yang memiliki klasifikasi angka migrasi bersih sedang - angka beban tanggungan sedang, menunjukkan bahwa migrasi masuk lebih besar dan terjadi pada penduduk usia tidak produktif sehingga ketika angka migrasi bersihnya tinggi maka angka beban tanggungan akan menjadi relatif sama.

Meski demikian, menurut hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment*,

diperoleh nilai  $r = - 0,307$  dan nilai  $P = 0,087$ . Hal tersebut menggambarkan bahwa pada kota-kota yang terdapat di Pulau Jawa tidak terdapat hubungan antara Angka Beban Tanggungan dan Angka Migrasi Bersih. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka migrasi bersih dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kota dalam bentuk persen dan tabel hasil korelasi antara angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan angka migrasi bersih (*Netto Migration*) pada kota di Pulau Jawa.

**Tabel 5.22**  
**Hasil Overlay Angka Migrasi Bersih dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kota (%)**

DR/Mn	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	0,00	12,5	65,63
Sedang	3,12	3,12	15,63
Tinggi	0,00	0,00	0,00

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

**Tabel 5.23**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)**  
**dengan Angka Migrasi Bersih(*Netto Migration*) pada kota**

		Dependency Ratio	Mnetto
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	-.307
	Sig. (2-tailed)		.087
	N	32	32
Mnetto	Pearson Correlation	-.307	1
	Sig. (2-tailed)	.087	
	N	32	32

### ***B. Kabupaten di Pulau Jawa***

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Migrasi Bersih di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 9**), terdapat dua kabupaten atau 2,56% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih sedang - angka beban

tanggung rendah (Kabupaten Jember dan Kabupaten Karanganyar), enam kabupaten atau sekitar 7,69% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih tinggi - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Kudus, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Sleman), 13 kabupaten atau 16,67% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih rendah - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri), 25 kabupaten atau 32,05% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih tinggi - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Blora, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Demak, Kabupaten Gresik, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karawang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pati, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Rembang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tuban), empat kabupaten atau sekitar 5,13% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih rendah - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo), tiga kabupaten atau 3,85% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih sedang - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Sukabumi), 21 kabupaten atau sekitar 26,92% dari jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih sedang - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kendal, Kabupaten



Kuningan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magelang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Tulungagung) dan empat kabupaten atau sekitar 5,13% yang masuk dalam klasifikasi angka migrasi bersih tinggi - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut dan Kabupaten Serang). Dari 78 kabupaten, 33 kabupaten atau sekitar 42,31% menunjukkan bahwa migrasi keluar lebih besar dan terjadi pada penduduk usia produktif sehingga ketika angka migrasi bersihnya rendah maka angka beban tanggungan akan menjadi relatif lebih tinggi. Pada 20 kabupaten lainnya di Pulau Jawa (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Lebak, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Wonosobo), menunjukkan bahwa migrasi masuk lebih besar dan terjadi pada penduduk usia produktif sehingga ketika angka migrasi bersihnya tinggi maka angka beban tanggungan akan menjadi relatif lebih rendah. Sedangkan pada 25 kabupaten atau sekitar 32,05% dari jumlah kabupaten keseluruhan (memiliki klasifikasi angka migrasi bersih sedang - angka beban tanggungan sedang dan angka migrasi bersih tinggi - angka beban tanggungan tinggi), menunjukkan bahwa migrasi masuk lebih besar dan terjadi pada penduduk usia tidak produktif sehingga ketika angka migrasi bersihnya tinggi maka angka beban tanggungan akan menjadi relatif sama. Berikut merupakan tabel hasil overlay angka migrasi bersih dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kabupaten dalam bentuk persen.

**Tabel 5.24**  
**Hasil Overlay Angka Migrasi Bersih dengan Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten (%)**

<b>DR/Mn</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>
<b>Rendah</b>	0,00	2,56	7,69
<b>Sedang</b>	16,67	26,92	32,05
<b>Tinggi</b>	5,13	3,85	5,13

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

Hal di atas tersebut didukung oleh hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment*, dimana diperoleh nilai  $r = -0,321$  dan nilai  $P = 0,004$ . Adapun arti dari nilai tersebut adalah yakni menunjukkan bahwa Angka Beban Tanggungan dan Angka Migrasi Bersih mempunyai hubungan dan berpola negatif. Artinya semakin tinggi Angka Migrasi Netto maka Angka Beban Tanggungan akan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Berikut merupakan tabel hasil korelasi antara angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan angka migrasi bersih (*Netto Migration*) pada kabupaten di Pulau Jawa.

**Tabel 5.25**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)**  
**dengan Angka Migrasi Bersih (*Netto Migration*) pada kabupaten**

		<b>Dependency Ratio</b>	<b>Mnetto</b>
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	-.321**
	Sig. (2-tailed)		.004
	N	78	78
Mnetto	Pearson Correlation	-.321**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	
	N	78	78

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 5.2.6 Korelasi antara *Dependency Ratio* dengan Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 2**), terdapat 65 kabupaten dan 21 kota (sekitar 78,17% dari keseluruhan daerah) yang sesuai dengan teori Hukum Penduduk Doubleday. Artinya, apabila angka produk domestik regional bruto suatu wilayah tinggi, maka penduduknya sejahtera dan cenderung membatasi kelahiran. Sehingga jumlah penduduk dengan kelompok usia tidak produktif akan cenderung rendah dan akan mengakibatkan angka beban tanggungan menjadi relatif lebih rendah, begitupun sebaliknya. Terdiri atas tiga kabupaten dan dua kota dengan klasifikasi angka produk domestik regional bruto sedang - angka beban tanggungan rendah, dua kabupaten dan 12 kota dengan klasifikasi angka produk domestik regional bruto tinggi - angka beban tanggungan rendah, 42 kabupaten dan tujuh kota dengan klasifikasi angka produk domestik regional bruto rendah - angka beban tanggungan sedang, delapan kabupaten dengan klasifikasi angka produk domestik regional bruto tinggi - angka beban tanggungan sedang, enam kabupaten dengan klasifikasi angka produk domestik regional bruto rendah - angka beban tanggungan tinggi dan empat kabupaten dengan klasifikasi angka produk domestik regional bruto sedang - angka beban tanggungan tinggi. Berikut merupakan tabel hasil overlay jumlah produk domestik regional bruto konstan 2000 dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kabupaten dan kota dalam bentuk persen.

**Tabel 5.26**  
**Hasil Overlay Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 dengan**  
**Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kabupaten dan Kota (%)**

<b>DR/PDRB</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>
<b>Rendah</b>	12,74	4,54	12,74
<b>Sedang</b>	44,54	8,18	7,27
<b>Tinggi</b>	5,44	3,64	0,91

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

#### **A. Kota di Pulau Jawa**


Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 2**), terdapat dua kota atau 6,25% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto sedang - angka beban tanggungan rendah (Kota Cilegon dan Kota Cimahi), 12 kota atau 37,5% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto tinggi - angka beban tanggungan rendah (Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Semarang, Kota Surabaya dan Kota Tangerang), tujuh kota atau 21,88% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto rendah - angka beban tanggungan sedang (Kota Banjar, Kota Blitar, Kota Depok, Kota Probolinggo, Kota Salatiga, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya) dan 11 kota atau 34,37% dari jumlah kota yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto rendah - angka beban tanggungan rendah (Kota Batu, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Madiun, Kota Magelang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Yogyakarta). Pada 21 kota atau sekitar 65,63% dari 32 kota di Pulau Jawa menunjukkan bahwa semakin sejahtera penduduk pada suatu wilayah, maka penduduk pada wilayah tersebut akan membatasi kelahiran sehingga jumlah penduduk usia tidak produktif akan lebih rendah dan akan mengakibatkan angka

beban tanggungan menjadi rendah, begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk 11 kota lainnya yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik bruto rendah – angka beban tanggungan rendah, menunjukkan bahwa semakin tidak sejahtera penduduk pada suatu wilayah akan mengakibatkan turunnya kualitas kesehatan sehingga resiko kematian lebih tinggi dan menyebabkan angka beban tanggungan menjadi rendah.

Hasil analisis di atas didukung oleh hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment*. Menurut hasil perhitungan, diperoleh nilai  $r = -0,640$  dan nilai  $P = 0,000$ . Angka tersebut menggambarkan bahwa antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan dan berpola negatif. Artinya semakin tinggi nilai Produk Domestik Regional Bruto maka Angka Beban Tanggungan akan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Berikut merupakan tabel hasil overlay jumlah produk domestik regional bruto konstan 2000 dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kota dalam bentuk persen dan tabel hasil korelasi antara angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan angka produk regional domestik bruto konstan 2000 (PDRB) pada kota di Pulau Jawa.

**Tabel 5.27**  
**Hasil Overlay Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 dengan**  
**Angka Beban Tanggungan**  
**Tingkat Kota (%)**

<b>DR/PDRB</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>
<b>Rendah</b>	34,37	6,25	37,5
<b>Sedang</b>	21,88	0,00	0,00
<b>Tinggi</b>	0,00	0,00	0,00

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

**Tabel 5.28**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan**  
**Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 (PDRB) pada kota**

		Dependency Ratio	PDRB (Miliar Rupiah)
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	-.640**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	32	32
PDRB (Miliar Rupiah)	Pearson Correlation	-.640**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	32	32

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### ***B. Kabupaten di Pulau Jawa***

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Wilayah Beban Tanggungan di Pulau Jawa dengan Peta Wilayah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 di Pulau Jawa (**peta 4** dan **peta 2**), terdapat tiga kabupaten atau sekitar 3,85% yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto sedang - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sleman), dua kabupaten atau sekitar 2,56% yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto tinggi - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sidoarjo), 42 kabupaten atau sekitar 53,85% yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto rendah - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blitar, Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magelang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Mojokerto,


Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tegal Kabupaten Temanggung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Wonogiri), delapan kabupaten atau sekitar 10,25% yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto tinggi - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Gresik, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tangerang), enam kabupaten atau sekitar 7,69% yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto rendah - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo), empat kabupaten atau sekitar 5,13% yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto sedang - angka beban tanggungan tinggi (Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi), tiga kabupaten atau atau sekitar 3,85% yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto rendah - angka beban tanggungan rendah (Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Situbondo), sembilan kabupaten atau sekitar 11,54% yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto sedang - angka beban tanggungan sedang (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kediri, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Tulungagung) dan satu kabupaten yakni Kabupaten Bogor yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik regional bruto tinggi - angka beban tanggungan tinggi. Sebanyak 65 kabupaten atau sekitar 83,33% dari keseluruhan kabupaten, menunjukkan bahwa semakin sejahtera penduduk pada suatu wilayah, maka penduduk pada wilayah tersebut akan cenderung membatasi kelahiran. Sehingga, jumlah penduduk usia

tidak produktif akan cenderung lebih rendah dan akan mengakibatkan angka beban tanggungan menjadi relatif lebih rendah, begitu pula sebaliknya. Pada Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Situbondo, yang masuk dalam klasifikasi angka produk domestik bruto rendah – angka beban tanggungan rendah, menunjukkan bahwa semakin tidak sejahtera penduduk pada suatu wilayah akan mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan sehingga resiko kematian lebih tinggi dan menyebabkan angka beban tanggungan menjadi relatif lebih rendah. Sedangkan untuk 10 kabupaten lainnya (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kediri, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Tulungagung), menunjukkan bahwa semakin sejahtera penduduk pada suatu wilayah akan menaikkan kualitas kesehatan sehingga resiko kematian lebih rendah dan menyebabkan angka beban tanggungan menjadi relatif lebih tinggi. Meski demikian, menurut hasil perhitungan statistik dengan analisis bivariat menggunakan metode korelasi *pearson product moment*, diperoleh nilai  $r = 0,033$  dan nilai  $P = 0,774$ . Kesimpulan dari hasil tersebut adalah bahwa antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pada kabupaten-kabupaten yang terdapat di Pulau Jawa, menunjukkan tidak adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Berikut merupakan tabel hasil overlay jumlah produk domestik regional bruto konstan 2000 dan angka beban tanggungan di Pulau Jawa tingkat kabupaten dalam bentuk persen dan tabel hasil korelasi antara angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan angka produk regional domestik bruto konstan 2000 (PDRB) pada kabupaten di Pulau Jawa.



**Tabel 5.29**  
**Hasil Overlay Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 dengan**  
**Angka Beban Tanggungan Tingkat Kabupaten (%)**

<b>DR/PDRB</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>
<b>Rendah</b>	3,85	3,85	2,56
<b>Sedang</b>	53,85	11,54	10,25
<b>Tinggi</b>	7,69	5,13	1,28

 : Sesuai teori

Sumber Data : Hasil Pengolahan

**Tabel 5.30**  
**Hasil Korelasi antara Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dengan**  
**Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 (PDRB) pada kabupaten**

		Dependency Ratio	PDRB (Miliar Rupiah)
Dependency Ratio	Pearson Correlation	1	.033
	Sig. (2-tailed)		.774
	N	78	78
PDRB (Miliar Rupiah)	Pearson Correlation	.033	1
	Sig. (2-tailed)	.774	
	N	78	78

### 5.3 Analisis hubungan wilayah beban tanggungan dengan faktor demografi dan ekonomi

PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan jumlah penduduk usia produktif yang banyak. Pada tingkat kota, jumlah penduduk usia produktif cenderung lebih tinggi (ditunjukkan dengan angka beban tanggungan yang rendah) sehingga laju pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kabupaten. Oleh sebab itu, angka Produk Domestik Regional Bruto hanya mempengaruhi angka beban tanggungan pada tingkat kota. Selain angka Produk Domestik Regional Bruto, faktor angka kematian kasar juga

mempengaruhi angka beban tanggungan pada tingkat kota. Hal ini terkait dengan angka Produk Domestik Regional Bruto, dimana semakin sejahtera suatu wilayah maka tingkat kesehatan akan semakin tinggi atau resiko kematian yang rendah sehingga menyebabkan angka kematian menjadi rendah dan apabila suatu wilayah cenderung kurang sejahtera maka tingkat kesehatan akan semakin rendah atau resiko kematian tinggi sehingga menyebabkan tingkat kematian cenderung tinggi. Pada tingkat kabupaten, jumlah penduduk usia produktif cenderung lebih rendah akibat tingginya migrasi keluar (ditunjukkan dengan angka beban tanggungan yang lebih tinggi) sehingga laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kota. Oleh sebab itu, angka Produk Domestik Regional Bruto tidak mempengaruhi angka beban tanggungan pada tingkat kabupaten, melainkan angka Migrasi Keluar dan Migrasi Bersih.

#### 5.4 Uji Hipotesis

Menurut hasil pengolahan data survey penduduk antar sensus pada tahun 2005 (SUPAS 2005) oleh Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pandeglang termasuk dalam klasifikasi wilayah beban tanggungan tinggi yakni 63% (pembulatan) yang artinya terdapat 63 penduduk dengan usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 jiwa penduduk dengan usia produktif di kabupaten ini. Kabupaten ini terdiri atas 31 kecamatan, dimana Kecamatan Angsana dan Kecamatan Banjar memiliki angka beban tanggungan tertinggi yakni 62,73% dan 62,72%. Artinya pada kedua kecamatan tersebut terdapat 63 penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif (lihat lampiran **tabel 19**). Namun, menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2009, kecamatan di kabupaten ini mengalami pemekaran sehingga menjadi terdiri atas 35 kecamatan. Pada tahun 2009, angka beban tanggungan pada Kecamatan Angsana dan Kecamatan Banjar mengalami penurunan menjadi 58,08% dan 58,69%. Pada tahun tersebut, Kecamatan Labuan dan Kecamatan Pandeglang memiliki angka beban tanggungan tertinggi yakni 60,57% dan 59,92% (lihat lampiran **tabel 20**). Oleh karena

memiliki angka beban tanggungan tertinggi, maka Kecamatan Labuan ditetapkan sebagai daerah tujuan survey hasil penelitian.

Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2009, Kecamatan Labuan terdiri atas sembilan kelurahan yakni Kelurahan Banyubiru, Kelurahan Banyumekar, Kelurahan Caringin, Kelurahan Cigondang, Kelurahan Kalanganyar, Kelurahan Labuan, Kelurahan Teluk, Kelurahan Rancateureup dan Kelurahan Sukamaju. Adapun kelurahan yang memiliki angka beban tanggungan tertinggi di kecamatan ini adalah Kelurahan Rancateureup yang diikuti oleh Kelurahan Sukamaju dengan angka beban tanggungan 60,64% dan 60,61% (lihat lampiran **tabel 21**).

Pada Kelurahan Rancateureup, penggunaan tanah didominasi oleh persawahan dan perkebunan (albasia, bakau, coklat, kelapa, melinjo dan pisang) yang mencapai luas 160 hektar dari luas daerah 260 hektar. Selain itu, untuk aksesibilitas hanya terdapat sarana penyewaan motor (terbatas) dan kondisi jalan terbuat dari batu dan tanah (lihat lampiran **gambar 5** dan **gambar 6**). Untuk tingkat kelahiran, di kelurahan ini tergolong tinggi karena usia menikah yang muda dan baru berjalannya program keluarga berencana. Selain tingkat kelahiran yang tinggi, penduduk di kelurahan ini mayoritas penduduk berusia 50 tahun ke atas sehingga angka beban tanggungan di kelurahan ini merupakan yang tertinggi. Akan tetapi, meski angka beban tanggungannya terbilang tinggi, penduduk usia tidak produktif muda (di bawah 15 tahun) di kelurahan ini sudah dapat digolongkan sebagai produktif karena sudah dapat menanggung beban hidup keluarganya.

Pada Kelurahan Sukamaju, penggunaan tanah didominasi oleh permukiman (sekitar 60% dari luas 149 hektar). Kondisi jalan dan aksesibilitas di kelurahan ini terbilang sudah lebih baik dibandingkan dengan Kelurahan Rancateureup karena dilalui jalan raya dan dekat dengan Kantor Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang (lihat lampiran **Peta 11**). Untuk tingkat kelahiran, kelurahan ini masuk dalam tingkat kelahiran sedang. Hal ini terjadi karena kelurahan ini sudah mulai lebih berkembang dari Kelurahan Rancateureup (Kelurahan Sukamaju

merupakan hasil pemekaran Kelurahan Rancateureup pada tahun 1982). Meski demikian, angka migrasi keluar di kelurahan ini terbilang cukup tinggi, terutama pada usia produktif (untuk foto hasil survey di Kelurahan Sukamaju dapat dilihat lampiran **gambar 14** hingga **gambar 20**). Berikut merupakan tabel yang menggambarkan perbedaan kondisi pada kedua kelurahan tersebut.

**Tabel 5.31**  
**Persamaan dan Perbedaan Kelurahan Rancateureup dan Kelurahan Sukamaju**

<b>Faktor Pembeda</b>	<b>Kelurahan Rancateureup</b>	<b>Kelurahan Sukamaju</b>
Penggunaan Tanah	Dominasi perkebunan	Dominasi permukiman
Aksesibilitas	Terbatas	Terdapat angkutan umum & bis
	Mayoritas jalan batu	Mayoritas jalan aspal
Kelahiran	Tinggi, usia menikah muda	Sedang, usia menikah lebih tinggi
Mayoritas Penduduk	Usia 50 tahun ke atas	Cukup seimbang
Migrasi Keluar	Tinggi	Tinggi pada usia produktif
Anomali	Penduduk dengan usia di bawah 15 tahun sudah dianggap produktif	

Sumber Data : Hasil Survey

## BAB VI

### KESIMPULAN

Wilayah beban tanggungan di Pulau Jawa bervariasi, baik dalam tingkat kabupaten maupun kota. Wilayah beban tanggungan tinggi cenderung mengelompok di Pulau Jawa bagian barat daya dan wilayah beban tanggungan rendah cenderung mengelompok di Pulau Jawa bagian barat laut. Angka beban tanggungan tinggi didominasi oleh kabupaten, sedangkan untuk beban tanggungan rendah didominasi oleh tingkat kota. Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) pada tingkat kota adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*), sedangkan untuk tingkat kabupaten adalah Angka Migrasi Keluar (*Out Migration*) dan Angka Migrasi Bersih (*Netto Migration*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2010). "Pendapatan Regional". <http://bps.go.id/data/pdrb.htm>(diakses pada tanggal 22 Sept. 2010)
- Badan Pusat Statistik. (2010). "Bab X Pendapatan Domestik Regional Bruto". <http://bps.go.id/data/pdrb.htm>(diakses pada tanggal 27 Sept. 2010)
- Badan Pusat Statistik. (2005). *Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (ed.). (2005). *Penduduk Provinsi Banten Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005 seri S1.16*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (ed.). (2005). *Penduduk Provinsi DI Yogyakarta Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005 seri S2.13*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (ed.). (2005). *Penduduk Provinsi DKI Jakarta Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005 seri S2.11*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (ed.). (2005). *Penduduk Provinsi Jawa Barat Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005 seri S1.12*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (ed.). (2005). *Penduduk Provinsi Jawa Tengah Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005 seri S1.13*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (ed.). (2005). *Penduduk Provinsi Jawa Timur Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005 seri S2.15*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2006). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2004-2008*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2006). *Pandeglang Dalam Angka 2006*. Pandeglang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Pandeglang Dalam Angka 2010*. Pandeglang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Kecamatan Angsana Dalam Angka 2010*. Pandeglang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

- Badan Pusat Statistik. (2010). *Kecamatan Labuan Dalam Angka 2010*. Pandeglang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Kecamatan Pandeglang Dalam Angka 2010*. Pandeglang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
- Daldjoeni. (2003). *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: PT Alumni
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia. (2009). "Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/MENHUT-II/2009". [http://www.dephut.go.id/files/P32\\_09.pdf](http://www.dephut.go.id/files/P32_09.pdf)(diakses pada tanggal 7 Juli 2010)
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006). "Glosarium Data dan Info Kesehatan". <http://www.depkes.go.id/downloads/publikasi/Glosarium%202006.pdf>(diakses pada tanggal 22 Sept. 2010)
- Giyarsih, S. R. (2000, Sept). Studi Pola Keruangan Tingkat Kesejahteraan Penduduk Daerah Perdesaan di Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 14 No. 2, 89-103.
- Isfani. (2010). "Beberapa Teori kependudukan dalam Menunjang Suatu Analisa Kependudukan". <http://tuloe.wordpress.com/2010/02/12/teori-kependudukan/>(12 Feb.2010)
- Isfani. (2009). "Dasar – Dasar Ilmu Kependudukan". <http://tuloe.wordpress.com/2009/06/20/dasar-dasar-ilmu-kependudukan/>(20 Juni 2009)
- Iskandar, N. (1977). *Teori-Teori Kependudukan*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Jayadinata, Johara T. (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (2007). *Dasar – Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (2010). *Dasar – Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat
- Priyatno, Dwi. (2009). *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. (2008). *Teori Ekonomi Makro : Suatu Pengantar*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- Saleh, R. H. (1995). Hubungan Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Wanita dengan Fertilitas di Sumatera Selatan: Hasil Analisis Sensus Penduduk Sumsel 1990. *Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya 1995*, 26-28.
- Sembiring, RK. (1995). *Analisis Regresi*. Bandung: Penerbit ITB
- Subair dan Rita Rahmawati. (2008). *Pertumbuhan, Komposisi dan Distribusi Penduduk dan Kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Indonesia*. Bogor: Program Doktor Mayor Sosiologi Pedesaan Departemen KPM FEMA IPB
- Sumaatmadja, Nurdin. (1981). *Studi Geografi, Suatu Pendekatan Analisa Keruangan*. Bandung: Penerbit Alumni
- Sumiharti, Yati (peny.). (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga
- Usman, H. dan R. Purnomo Setiady Akbar. (2000). *Pengantar Statistika*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Utorodewo, Felicia N., et al. (2007). *Bahasa Indonesia, Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI
- Wibowo, Wahyu. (2010). *Tata Permainan Bahasa Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Yunus, H Sabari. (2010). *Metodologi Wilayah Penelitian Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar



Tabel 1  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Total
		0 - 15	15 - 64	65+	
1	Kabupaten Bandung	1.258.192	2.621.001	158.081	4.037.274
2	Kabupaten Banjarnegara	254.684	549.805	50.296	854.785
3	Kabupaten Bantul	186.676	593.319	79.973	859.968
4	Kabupaten Banyumas	395.847	972.053	112.675	1.480.575
5	Kabupaten Banyuwangi	389.575	1.034.267	90.763	1.514.605
6	Kabupaten Batang	194.307	449.942	29.157	673.406
7	Kabupaten Bekasi	617.162	1.314.725	51.928	1.983.815
8	Kabupaten Blitar	247.208	721.115	97.515	1.065.838
9	Kabupaten Blora	210.051	554.590	62.946	827.587
10	Kabupaten Bogor	1.315.628	2.403.038	110.387	3.829.053
11	Kabupaten Bojonegoro	291.472	844.809	92.658	1.228.939
12	Kabupaten Bondowoso	175.222	479.298	43.984	698.504
13	Kabupaten Boyolali	233.345	612.981	76.881	923.207
14	Kabupaten Brebes	548.442	1.127.131	75.887	1.751.460
15	Kabupaten Ciamis	393.908	1.008.087	109.947	1.511.942
16	Kabupaten Cianjur	662.141	1.335.023	82.606	2.079.770
17	Kabupaten Cilacap	45.691	1.054.245	105.767	1.616.922
18	Kabupaten Cirebon	606.238	1.339.980	98.039	2.044.257
19	Kabupaten Demak	291.931	667.608	49.283	1.008.822
20	Kabupaten Garut	747.272	1.341.200	107.950	2.196.422
21	Kabupaten Gresik	292.993	770.590	55.258	1.118.841
22	Kabupaten Grobogan	352.527	881.971	74.848	1.309.346
23	Kabupaten Gunung Kidul	145.394	450.117	86.043	681.554
24	Kabupaten Indramayu	503.462	1.105.027	80.758	1.689.247
25	Kabupaten Jember	564.875	1.579.912	116.690	2.261.477
26	Kabupaten Jepara	296.062	689.359	55.939	1.041.360
27	Kabupaten Jombang	310.505	827.571	84.423	1.222.499
28	Kabupaten Karanganyar	183.695	554.852	54.870	793.417
29	Kabupaten Karawang	537.622	1.301.765	87.084	1.926.471
30	Kabupaten Kebumen	358.578	730.037	107.689	1.196.304
31	Kabupaten Kediri	357.855	967.615	103.667	1.429.137
32	Kabupaten Kendal	233.925	607.187	66.659	907.771
33	Kabupaten Klaten	269.770	734.469	119.245	1.123.484
34	Kabupaten Kudus	191.750	530.227	32.206	754.183
35	Kabupaten Kulonprogo	91.005	240.670	42.082	373.757

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Total
		0 - 15	15 - 64	65+	
36	Kabupaten Kuningan	283.344	694.162	68.185	1.045.691
37	Kabupaten Lamongan	293.552	815.721	77.792	1.187.065
38	Kabupaten Lebak	395.717	729.394	29.779	1.154.890
39	Kabupaten Lumajang	255.192	684.569	59.764	999.525
40	Kabupaten Madiun	144.876	430.429	66.291	641.596
41	Kabupaten Magelang	316.691	753.469	67.778	1.137.938
42	Kabupaten Magetan	135.461	417.101	64.930	617.492
43	Kabupaten Majalengka	317.486	773.128	76.952	1.167.566
44	Kabupaten Malang	595.132	1.579.726	161.505	2.336.363
45	Kabupaten Mojokerto	253.825	668.310	47.164	969.299
46	Kabupaten Nganjuk	234.106	674.299	81.288	989.693
47	Kabupaten Ngawi	173.506	582.701	71.521	827.728
48	Kabupaten Pacitan	123.035	370.515	52.120	545.670
49	Kabupaten Pandeglang	374.460	651.184	37.325	1.062.969
50	Kabupaten Pasuruan	351.078	987.657	59.387	1.398.122
51	Kabupaten Pati	279.479	802.853	78.214	1.160.546
52	Kabupaten Pekalongan	256.474	535.482	38.676	830.632
53	Kabupaten Pemasang	395.633	870.486	63.871	1.329.990
54	Kabupaten Ponorogo	188.228	587.699	93.715	869.642
55	Kabupaten Probolinggo	258.741	706.006	56.532	1.021.279
56	Kabupaten Purbalingga	234.697	518.346	57.065	810.108
57	Kabupaten Purwakarta	225.037	495.282	32.987	753.306
58	Kabupaten Purworejo	195.339	442.180	75.332	712.851
59	Kabupaten Rembang	142.660	383.470	36.992	563.122
60	Kabupaten Semarang	228.053	588.410	61.815	878.278
61	Kabupaten Serang	602.989	1.115.124	37.378	1.755.491
62	Kabupaten Sidoarjo	432.210	1.199.170	66.055	1.697.435
63	Kabupaten Situbondo	134.138	435.497	35.573	605.208
64	Kabupaten Sleman	202.326	716.782	69.169	988.277
65	Kabupaten Sragen	202.951	580.207	71.593	854.751
66	Kabupaten Subang	345.390	942.333	92.324	1.380.047
67	Kabupaten Sukabumi	700.153	1.366.899	101.840	2.168.892
68	Kabupaten Sukoharjo	186.240	548.841	63.493	798.574
69	Kabupaten Sumedang	253.696	684.915	75.408	1.014.019
70	Kabupaten Tangerang	1.004.168	2.167.206	87.689	3.259.063

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Total
		0 - 15	15 - 64	65+	
71	Kabupaten Tasikmalaya	480.139	1.055.938	82.975	1.619.052
72	Kabupaten Tegal	410.612	910.784	79.192	1.400.588
73	Kabupaten Temanggung	187.575	459.268	41.058	687.901
74	Kabupaten Trenggalek	163.935	431.198	69.937	665.070
75	Kabupaten Tuban	259.163	719.518	84.694	1.063.375
76	Kabupaten Tulungagung	224.293	670.087	75.081	969.491
77	Kabupaten Wonogiri	224.587	639.387	113.497	977.471
78	Kabupaten Wonosobo	224.987	480.287	42.710	747.984

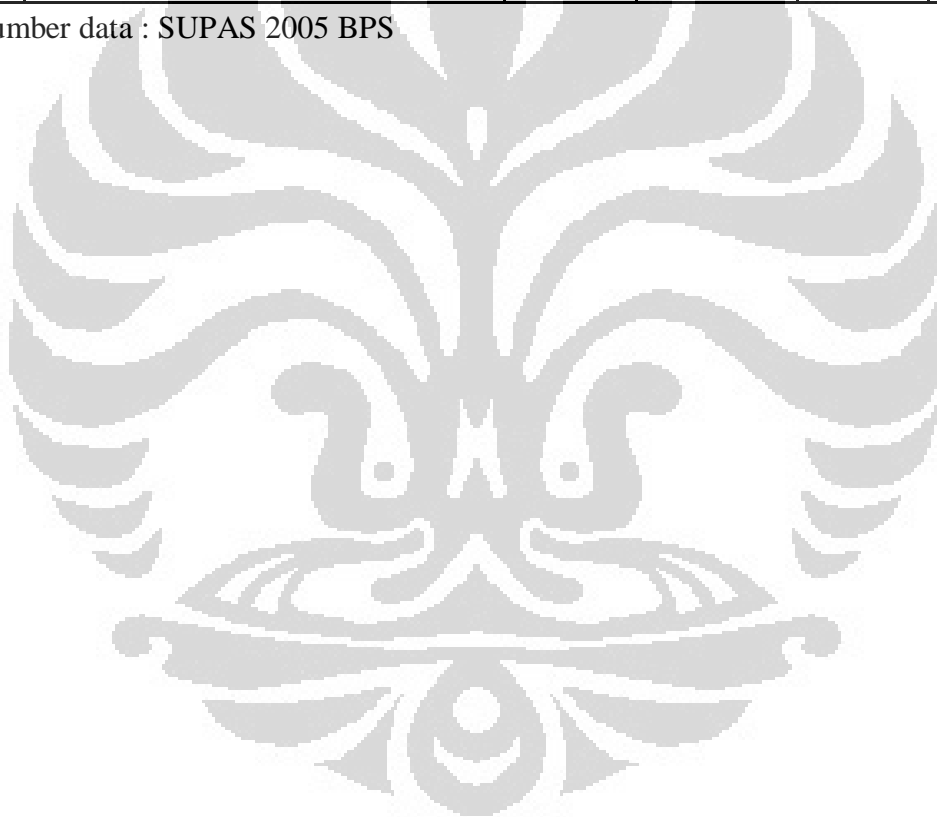
Sumber data : SUPAS 2005 BPS

Tabel 2  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kota  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Total
		0 - 15	15 - 64	65+	
1	Kota Bandung	541.657	1.658.018	88.895	2.288.570
2	Kota Banjar	44.891	108.277	9.215	162.383
3	Kota Batu	41.657	126.346	11.089	179.092
4	Kota Bekasi	521.392	1.438.855	33.231	1.993.478
5	Kota Blitar	31.259	86.241	9.276	126.776
6	Kota Bogor	237.782	621.996	31.689	891.467
7	Kota Cilegon	92.794	224.475	6.874	324.143
8	Kota Cimahi	145.554	380.950	20.375	546.879
9	Kota Cirebon	86.509	206.869	15.393	308.771
10	Kota Depok	374.464	956.705	43.734	1.374.903
11	Kota Jakarta Barat	540.651	1.499.548	52.814	2.093.013
12	Kota Jakarta Pusat	201.618	650.066	37.764	889.448
13	Kota Jakarta Selatan	465.009	1.478.984	57.360	2.001.353
14	Kota Jakarta Timur	584.409	1.746.814	59.943	2.391.166
15	Kota Jakarta Utara	362.252	1.053.396	29.975	1.445.623
16	Kota Kediri	56.659	177.900	14.081	248.640
17	Kota Madiun	37.169	119.552	14.669	171.390
18	Kota Magelang	28.593	87.069	8.712	124.374
19	Kota Malang	173.265	571.934	45.157	790.356
20	Kota Mojokerto	26.005	79.547	6.308	111.860
21	Kota Pasuruan	44.727	118.678	7.731	171.136
22	Kota Pekalongan	71.588	188.442	9.147	269.177

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Total
		0 - 15	15 - 64	65+	
23	Kota Probolinggo	58.838	142.836	9.468	211.142
24	Kota Salatiga	40.770	113.869	10.755	165.394
25	Kota Semarang	341.933	1.025.182	71.618	1.438.733
26	Kota Sukabumi	79.096	197.715	14.466	291.277
27	Kota Surabaya	573.072	1.916.767	121.667	2.611.506
28	Kota Surakarta	108.326	370.582	27.489	506.397
29	Kota Tangerang	398.886	1.024.278	28.431	1.451.595
30	Kota Tasikmalaya	168.718	387.016	26.689	582.423
31	Kota Tegal	60.908	165.894	11.874	238.676
32	Kota Yogyakarta	86.290	320.189	27.060	433.539

Sumber data : SUPAS 2005 BPS



Tabel 3  
Jumlah Kejadian Kematian Menurut Kabupaten  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Kejadian Kematian (Jiwa)
1	Kabupaten Bandung	14.412
2	Kabupaten Banjarnegara	4.345
3	Kabupaten Bantul	6.424
4	Kabupaten Banyumas	10.137
5	Kabupaten Banyuwangi	3.713
6	Kabupaten Batang	5.896
7	Kabupaten Bekasi	4.478
8	Kabupaten Blitar	5.862
9	Kabupaten Blora	3.871
10	Kabupaten Bogor	21.269
11	Kabupaten Bojonegoro	10.357
12	Kabupaten Bondowoso	4.486
13	Kabupaten Boyolali	2.991
14	Kabupaten Brebes	5.493
15	Kabupaten Ciamis	15.395
16	Kabupaten Cianjur	8.073
17	Kabupaten Cilacap	5.130
18	Kabupaten Cirebon	5.657
19	Kabupaten Demak	3.920
20	Kabupaten Garut	14.168
21	Kabupaten Gresik	6.623
22	Kabupaten Grobogan	6.695
23	Kabupaten Gunung Kidul	5.320
24	Kabupaten Indramayu	14.587
25	Kabupaten Jember	12.472
26	Kabupaten Jepara	1.801
27	Kabupaten Jombang	8.186
28	Kabupaten Karanganyar	4.403
29	Kabupaten Karawang	10.284
30	Kabupaten Kebumen	4.523
31	Kabupaten Kediri	6.638
32	Kabupaten Kendal	2.417
33	Kabupaten Klaten	8.146
34	Kabupaten Kudus	2.737
35	Kabupaten Kulonprogo	2.806

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Kejadian Kematian (Jiwa)
36	Kabupaten Kuningan	4.672
37	Kabupaten Lamongan	7.376
38	Kabupaten Lebak	3.039
39	Kabupaten Lumajang	5.400
40	Kabupaten Madiun	1.070
41	Kabupaten Magelang	7.082
42	Kabupaten Magetan	2.331
43	Kabupaten Majalengka	5.563
44	Kabupaten Malang	11.978
45	Kabupaten Mojokerto	8.429
46	Kabupaten Nganjuk	5.015
47	Kabupaten Ngawi	2.394
48	Kabupaten Pacitan	2.988
49	Kabupaten Pandeglang	6.468
50	Kabupaten Pasuruan	5.740
51	Kabupaten Pati	6.280
52	Kabupaten Pekalongan	6.309
53	Kabupaten Pemasang	8.119
54	Kabupaten Ponorogo	5.926
55	Kabupaten Probolinggo	7.746
56	Kabupaten Purbalingga	1.951
57	Kabupaten Purwakarta	2.877
58	Kabupaten Purworejo	4101
59	Kabupaten Rembang	2.998
60	Kabupaten Semarang	7.049
61	Kabupaten Serang	2.515
62	Kabupaten Sidoarjo	2.621
63	Kabupaten Situbondo	1.597
64	Kabupaten Sleman	4.541
65	Kabupaten Sragen	3.244
66	Kabupaten Subang	5.604
67	Kabupaten Sukabumi	8.021
68	Kabupaten Sukoharjo	3.732
69	Kabupaten Sumedang	4.843
70	Kabupaten Tangerang	4.819

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Kejadian Kematian (Jiwa)
71	Kabupaten Tasikmalaya	13.110
72	Kabupaten Tegal	8.186
73	Kabupaten Temanggung	2.121
74	Kabupaten Trenggalek	2.490
75	Kabupaten Tuban	2.597
76	Kabupaten Tulungagung	4.466
77	Kabupaten Wonogiri	6.659
78	Kabupaten Wonosobo	4.022

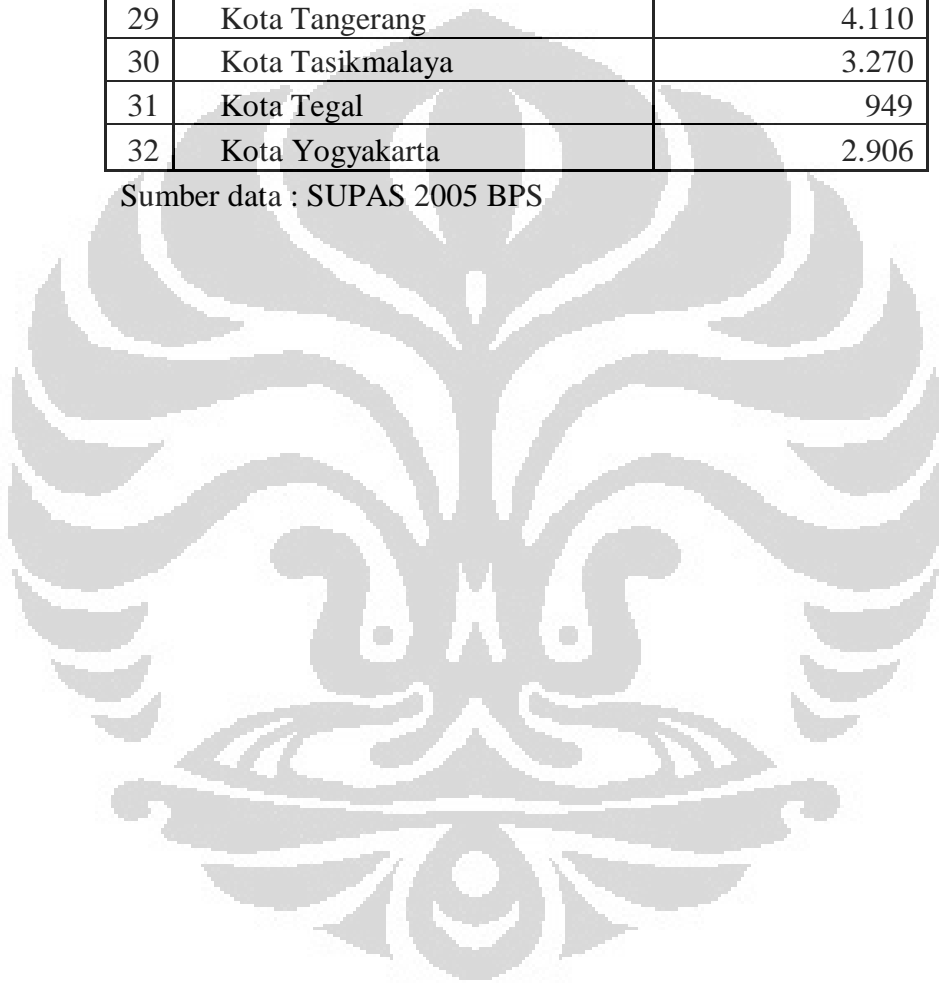
Sumber data : SUPAS 2005 BPS

Tabel 4  
Jumlah Kejadian Kematian Menurut Kota  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Kejadian Kematian (Jiwa)
1	Kota Bandung	5.413
2	Kota Banjar	878
3	Kota Batu	741
4	Kota Bekasi	8.670
5	Kota Blitar	949
6	Kota Bogor	2.246
7	Kota Cilegon	1.333
8	Kota Cimahi	2.158
9	Kota Cirebon	1.928
10	Kota Depok	5.537
11	Kota Jakarta Barat	5.105
12	Kota Jakarta Pusat	3.131
13	Kota Jakarta Selatan	8.305
14	Kota Jakarta Timur	9.737
15	Kota Jakarta Utara	4.919
16	Kota Kediri	930
17	Kota Madiun	1.160
18	Kota Magelang	312
19	Kota Malang	4.385
20	Kota Mojokerto	721
21	Kota Pasuruan	522
22	Kota Pekalongan	1.244

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Kejadian Kematian (Jiwa)
23	Kota Probolinggo	2.075
24	Kota Salatiga	771
25	Kota Semarang	6.345
26	Kota Sukabumi	4.490
27	Kota Surabaya	13.676
28	Kota Surakarta	2.967
29	Kota Tangerang	4.110
30	Kota Tasikmalaya	3.270
31	Kota Tegal	949
32	Kota Yogyakarta	2.906

Sumber data : SUPAS 2005 BPS





Tabel 5  
Jumlah Kejadian Kelahiran Menurut Kabupaten  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Kejadian Kelahiran (Jiwa)
1	Kabupaten Bandung	66.254
2	Kabupaten Banjarnegara	15.288
3	Kabupaten Bantul	13.445
4	Kabupaten Banyumas	26.855
5	Kabupaten Banyuwangi	22.272
6	Kabupaten Batang	9.437
7	Kabupaten Bekasi	37.718
8	Kabupaten Blitar	10.794
9	Kabupaten Blora	10.433
10	Kabupaten Bogor	96.519
11	Kabupaten Bojonegoro	18.770
12	Kabupaten Bondowoso	7.724
13	Kabupaten Boyolali	13.839
14	Kabupaten Brebes	17.351
15	Kabupaten Ciamis	27.427
16	Kabupaten Cianjur	48.009
17	Kabupaten Cilacap	23.719
18	Kabupaten Cirebon	25.594
19	Kabupaten Demak	13.748
20	Kabupaten Garut	42.300
21	Kabupaten Gresik	26.681
22	Kabupaten Grobogan	17.722
23	Kabupaten Gunung Kidul	7.635
24	Kabupaten Indramayu	27.115
25	Kabupaten Jember	29.413
26	Kabupaten Jepara	15.611
27	Kabupaten Jombang	21.012
28	Kabupaten Karanganyar	11.116
29	Kabupaten Karawang	31.797
30	Kabupaten Kebumen	26.615
31	Kabupaten Kediri	17.710
32	Kabupaten Kendal	12.500
33	Kabupaten Klaten	16.334
34	Kabupaten Kudus	7.909
35	Kabupaten Kulonprogo	6.251

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Kejadian Kelahiran (Jiwa)
36	Kabupaten Kuningan	21.093
37	Kabupaten Lamongan	14.197
38	Kabupaten Lebak	12.765
39	Kabupaten Lumajang	18.421
40	Kabupaten Madiun	9.992
41	Kabupaten Magelang	17.523
42	Kabupaten Magetan	5.582
43	Kabupaten Majalengka	18.951
44	Kabupaten Malang	33.315
45	Kabupaten Mojokerto	20.347
46	Kabupaten Nganjuk	22.676
47	Kabupaten Ngawi	6.317
48	Kabupaten Pacitan	11.704
49	Kabupaten Pandeglang	22.352
50	Kabupaten Pasuruan	32.037
51	Kabupaten Pati	15.251
52	Kabupaten Pekalongan	13.411
53	Kabupaten Pemasang	15.932
54	Kabupaten Ponorogo	6.706
55	Kabupaten Probolinggo	18.374
56	Kabupaten Purbalingga	9.133
57	Kabupaten Purwakarta	13.266
58	Kabupaten Purworejo	9.229
59	Kabupaten Rembang	8.225
60	Kabupaten Semarang	13.118
61	Kabupaten Serang	20.850
62	Kabupaten Sidoarjo	29.345
63	Kabupaten Situbondo	8.971
64	Kabupaten Sleman	15.434
65	Kabupaten Sragen	13.201
66	Kabupaten Subang	15.144
67	Kabupaten Sukabumi	47.338
68	Kabupaten Sukoharjo	9.099
69	Kabupaten Sumedang	18.576
70	Kabupaten Tangerang	54.999

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Kejadian Kelahiran (Jiwa)
71	Kabupaten Tasikmalaya	30.971
72	Kabupaten Tegal	24.467
73	Kabupaten Temanggung	9.616
74	Kabupaten Trenggalek	8.934
75	Kabupaten Tuban	12.640
76	Kabupaten Tulungagung	13.634
77	Kabupaten Wonogiri	16.533
78	Kabupaten Wonosobo	10.363

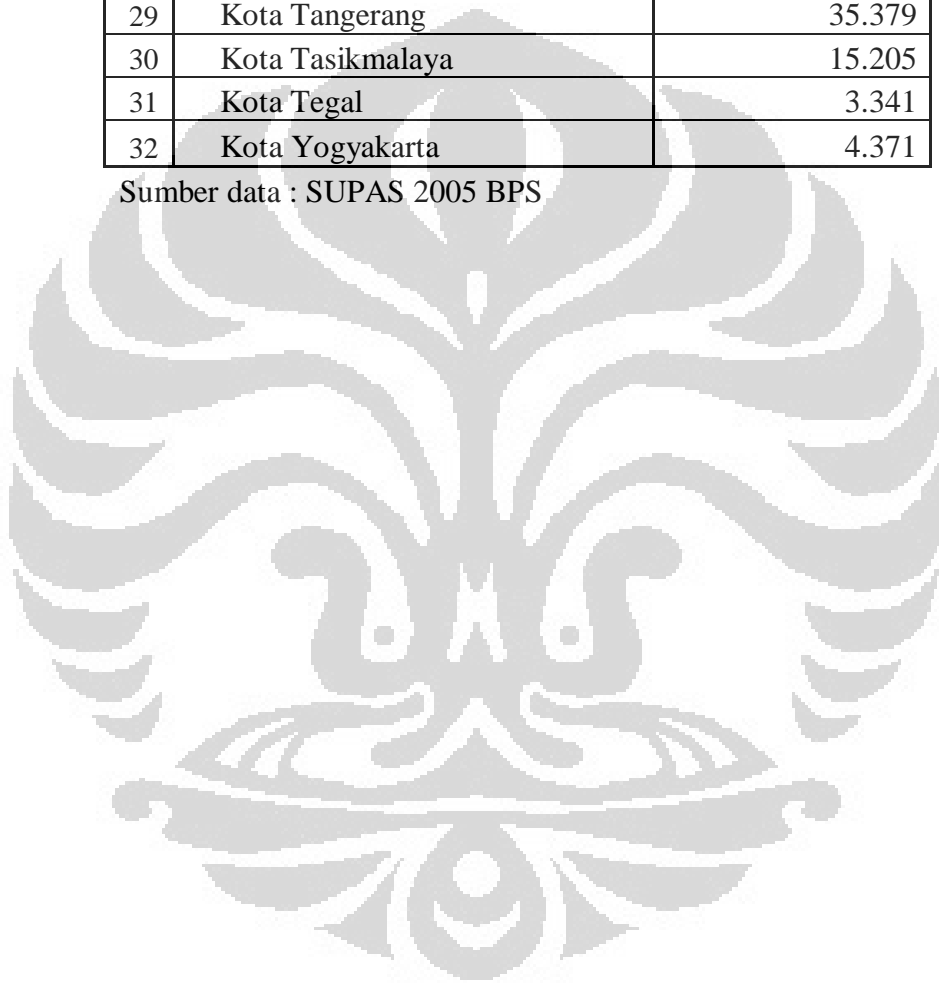
Sumber data : SUPAS 2005 BPS

Tabel 6  
Jumlah Kejadian Kelahiran Menurut Kota  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Kejadian Kelahiran (Jiwa)
1	Kota Bandung	43.720
2	Kota Banjar	2.958
3	Kota Batu	3.011
4	Kota Bekasi	25.839
5	Kota Blitar	1.530
6	Kota Bogor	12.972
7	Kota Cilegon	4.692
8	Kota Cimahi	12.977
9	Kota Cirebon	6.408
10	Kota Depok	33.073
11	Kota Jakarta Barat	35.092
12	Kota Jakarta Pusat	15.059
13	Kota Jakarta Selatan	39.256
14	Kota Jakarta Timur	49.888
15	Kota Jakarta Utara	25.505
16	Kota Kediri	3.515
17	Kota Madiun	5.061
18	Kota Magelang	2.362
19	Kota Malang	12.381
20	Kota Mojokerto	2.077
21	Kota Pasuruan	2.346
22	Kota Pekalongan	2.990

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Kejadian Kelahiran (Jiwa)
23	Kota Probolinggo	3.084
24	Kota Salatiga	2.655
25	Kota Semarang	16.332
26	Kota Sukabumi	7.103
27	Kota Surabaya	68.021
28	Kota Surakarta	7.591
29	Kota Tangerang	35.379
30	Kota Tasikmalaya	15.205
31	Kota Tegal	3.341
32	Kota Yogyakarta	4.371

Sumber data : SUPAS 2005 BPS



Tabel 7  
 Jumlah Kejadian Migrasi Keluar dan Masuk Menurut Kabupaten  
 di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Migrasi Keluar (Jiwa)	Migrasi Masuk (Jiwa)
1	Kabupaten Bandung	40.808	11.300
2	Kabupaten Banjarnegara	13.711	3.803
3	Kabupaten Bantul	9.464	5.292
4	Kabupaten Banyumas	16.920	4.754
5	Kabupaten Banyuwangi	5.368	2.040
6	Kabupaten Batang	8.608	3.960
7	Kabupaten Bekasi	12.339	8.668
8	Kabupaten Blitar	23.468	12.008
9	Kabupaten Blora	5.489	4.138
10	Kabupaten Bogor	20.948	4.902
11	Kabupaten Bojonegoro	10.724	2.687
12	Kabupaten Bondowoso	3.248	2.469
13	Kabupaten Boyolali	12.146	3.696
14	Kabupaten Brebes	11.301	2.037
15	Kabupaten Ciamis	22.131	7.920
16	Kabupaten Cianjur	13.981	8.238
17	Kabupaten Cilacap	47.959	18.740
18	Kabupaten Cirebon	9.863	9.979
19	Kabupaten Demak	4.691	4.955
20	Kabupaten Garut	19.350	10.435
21	Kabupaten Gresik	11.282	10.476
22	Kabupaten Grobogan	18.971	6.879
23	Kabupaten Gunung Kidul	5.282	2.396
24	Kabupaten Indramayu	24.864	7.819
25	Kabupaten Jember	18.158	5.306
26	Kabupaten Jepara	5.015	5.315
27	Kabupaten Jombang	12.636	5.806
28	Kabupaten Karanganyar	11.019	4.652
29	Kabupaten Karawang	10.392	2.818
30	Kabupaten Kebumen	27.992	6.675
31	Kabupaten Kediri	21.081	6.146
32	Kabupaten Kendal	11.861	6.393
33	Kabupaten Klaten	14.342	11.192
34	Kabupaten Kudus	3.854	1.405
35	Kabupaten Kulonprogo	6.740	2.754

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Migrasi Keluar (Jiwa)	Migrasi Masuk (Jiwa)
36	Kabupaten Kuningan	15.217	4.737
37	Kabupaten Lamongan	16.445	4.424
38	Kabupaten Lebak	15.571	6.080
39	Kabupaten Lumajang	6.249	1.894
40	Kabupaten Madiun	13.012	5.829
41	Kabupaten Magelang	13.342	4.475
42	Kabupaten Magetan	5.115	2.891
43	Kabupaten Majalengka	19.460	5.851
44	Kabupaten Malang	24.413	5.392
45	Kabupaten Mojokerto	11.390	2.309
46	Kabupaten Nganjuk	11.441	3.501
47	Kabupaten Ngawi	4.321	1.056
48	Kabupaten Pacitan	5.134	2.554
49	Kabupaten Pandeglang	11.543	3.470
50	Kabupaten Pasuruan	5.492	3.304
51	Kabupaten Pati	15.373	10.312
52	Kabupaten Pekalongan	14.211	2.988
53	Kabupaten Pemasang	10.885	2.145
54	Kabupaten Ponorogo	16.607	4.591
55	Kabupaten Probolinggo	5.460	4.444
56	Kabupaten Purbalingga	15.182	4.863
57	Kabupaten Purwakarta	3.312	1.533
58	Kabupaten Purworejo	11.427	1.650
59	Kabupaten Rembang	4.351	1.819
60	Kabupaten Semarang	14.187	5.345
61	Kabupaten Serang	9.375	4.242
62	Kabupaten Sidoarjo	11.295	9.947
63	Kabupaten Situbondo	1.370	2.169
64	Kabupaten Sleman	10.557	8.190
65	Kabupaten Sragen	17.026	5.483
66	Kabupaten Subang	13.324	7.127
67	Kabupaten Sukabumi	16.615	5.695
68	Kabupaten Sukoharjo	15.011	1.481
69	Kabupaten Sumedang	8.099	3.618
70	Kabupaten Tangerang	10.099	8.248

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Migrasi Keluar (Jiwa)	Migrasi Masuk (Jiwa)
71	Kabupaten Tasikmalaya	17.540	2.388
72	Kabupaten Tegal	18.791	5.130
73	Kabupaten Temanggung	3.454	277
74	Kabupaten Trenggalek	4.557	2.253
75	Kabupaten Tuban	6.002	2.586
76	Kabupaten Tulungagung	16.512	7.354
77	Kabupaten Wonogiri	14.584	3.172
78	Kabupaten Wonosobo	13.619	3.207

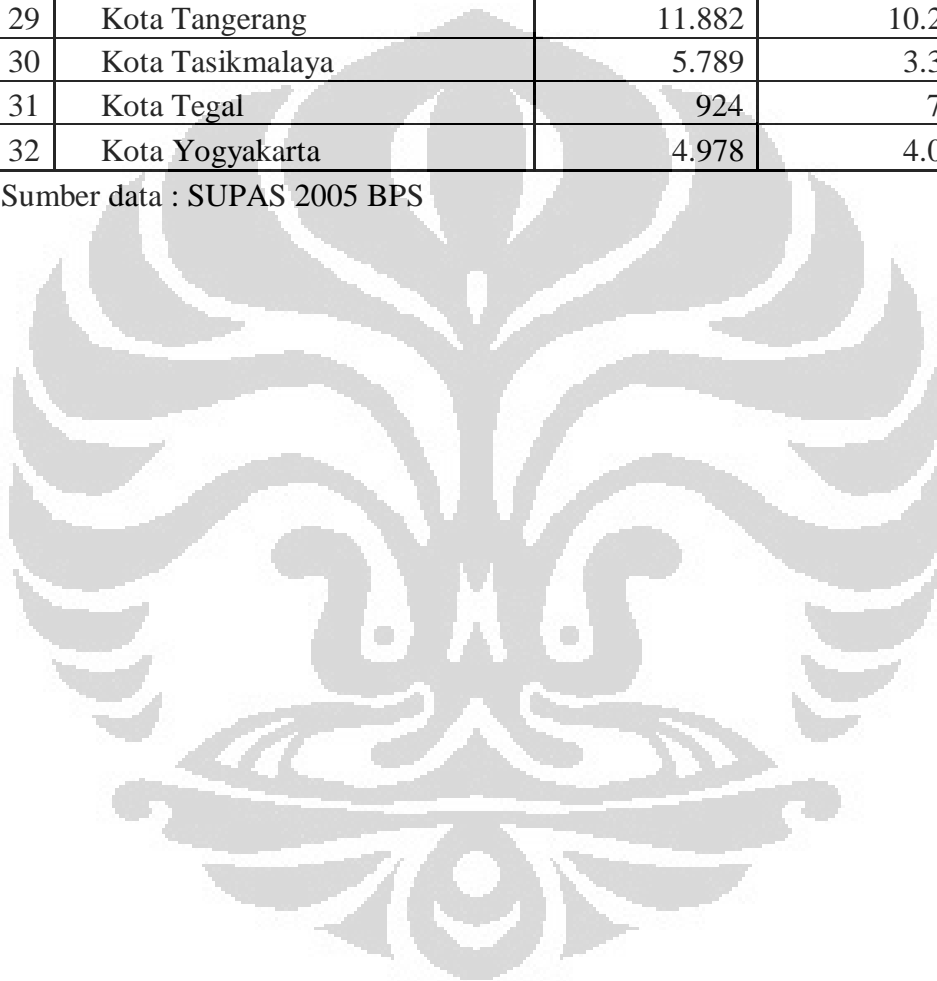
Sumber data : SUPAS 2005 BPS

Tabel 8  
Jumlah Kejadian Migrasi Keluar dan Masuk Menurut Kota  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Migrasi Keluar (Jiwa)	Migrasi Masuk (Jiwa)
1	Kota Bandung	21.743	15.436
2	Kota Banjar	1.264	756
3	Kota Batu	920	573
4	Kota Bekasi	16.496	10.307
5	Kota Blitar	1.092	656
6	Kota Bogor	5.628	3.551
7	Kota Cilegon	3.007	2.721
8	Kota Cimahi	3.201	3.997
9	Kota Cirebon	2.973	1.730
10	Kota Depok	8.550	8.949
11	Kota Jakarta Barat	11.779	11.388
12	Kota Jakarta Pusat	4.975	4.623
13	Kota Jakarta Selatan	18.478	16.164
14	Kota Jakarta Timur	21.039	16.611
15	Kota Jakarta Utara	14.036	11.459
16	Kota Kediri	1.493	1.526
17	Kota Madiun	1.792	660
18	Kota Magelang	1.221	348
19	Kota Malang	7.887	2.563
20	Kota Mojokerto	499	368
21	Kota Pasuruan	1.444	454
22	Kota Pekalongan	1.063	691

<b>No</b>	<b>Nama Kota di Pulau Jawa</b>	<b>Migrasi Keluar (Jiwa)</b>	<b>Migrasi Masuk (Jiwa)</b>
23	Kota Probolinggo	2.192	1.028
24	Kota Salatiga	996	899
25	Kota Semarang	10.909	4.774
26	Kota Sukabumi	12.949	2.404
27	Kota Surabaya	13.976	9.395
28	Kota Surakarta	3.120	3.309
29	Kota Tangerang	11.882	10.291
30	Kota Tasikmalaya	5.789	3.307
31	Kota Tegal	924	786
32	Kota Yogyakarta	4.978	4.051

Sumber data : SUPAS 2005 BPS





Tabel 9

Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 Menurut Kabupaten  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	PDRB Konstan 2000 (Milyar Rupiah)
1	Kabupaten Bandung	22.773
2	Kabupaten Banjarnegara	2.278
3	Kabupaten Bantul	3.234
4	Kabupaten Banyumas	3.598
5	Kabupaten Banyuwangi	8.414
6	Kabupaten Batang	1.973
7	Kabupaten Bekasi	41.319
8	Kabupaten Blitar	4.339
9	Kabupaten Blora	1.731
10	Kabupaten Bogor	25.056
11	Kabupaten Bojonegoro	5.330
12	Kabupaten Bondowoso	1.773
13	Kabupaten Boyolali	3.456
14	Kabupaten Brebes	4.346
15	Kabupaten Ciamis	5.890
16	Kabupaten Cianjur	6.821
17	Kabupaten Cilacap	19.565
18	Kabupaten Cirebon	6.344
19	Kabupaten Demak	2.471
20	Kabupaten Garut	8.768
21	Kabupaten Gresik	11.893
22	Kabupaten Grobogan	2.579
23	Kabupaten Gunung Kidul	2.726
24	Kabupaten Indramayu	12.323
25	Kabupaten Jember	8.236
26	Kabupaten Jepara	3.411
27	Kabupaten Jombang	4.774
28	Kabupaten Karanganyar	4.188
29	Kabupaten Karawang	14.480
30	Kabupaten Kebumen	2.364
31	Kabupaten Kediri	5.232
32	Kabupaten Kendal	4.277
33	Kabupaten Klaten	4.158
34	Kabupaten Kudus	10.647
35	Kabupaten Kulonprogo	1.465

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	PDRB Konstan 2000 (Milyar Rupiah)
36	Kabupaten Kuningan	3.198
37	Kabupaten Lamongan	3.884
38	Kabupaten Lebak	3.289
39	Kabupaten Lumajang	4.794
40	Kabupaten Madiun	2.116
41	Kabupaten Magelang	3.246
42	Kabupaten Magetan	2.508
43	Kabupaten Majalengka	3.538
44	Kabupaten Malang	10.987
45	Kabupaten Mojokerto	4.575
46	Kabupaten Nganjuk	3.691
47	Kabupaten Ngawi	2.386
48	Kabupaten Pacitan	1.162
49	Kabupaten Pandeglang	3.399
50	Kabupaten Pasuruan	5.101
51	Kabupaten Pati	3.610
52	Kabupaten Pekalongan	2.601
53	Kabupaten Pemasang	2.762
54	Kabupaten Ponorogo	2.574
55	Kabupaten Probolinggo	5.127
56	Kabupaten Purbalingga	1.922
57	Kabupaten Purwakarta	5.742
58	Kabupaten Purworejo	2.322
59	Kabupaten Rembang	1.826
60	Kabupaten Semarang	4.481
61	Kabupaten Serang	7.973
62	Kabupaten Sidoarjo	20.201
63	Kabupaten Situbondo	2.704
64	Kabupaten Sleman	5.081
65	Kabupaten Sragen	2.322
66	Kabupaten Subang	6.026
67	Kabupaten Sukabumi	7.126
68	Kabupaten Sukoharjo	3.942
69	Kabupaten Sumedang	4.506
70	Kabupaten Tangerang	16.445

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	PDRB Konstan 2000 (Milyar Rupiah)
71	Kabupaten Tasikmalaya	4.337
72	Kabupaten Tegal	2.809
73	Kabupaten Temanggung	1.994
74	Kabupaten Trenggalek	1.754
75	Kabupaten Tuban	4.999
76	Kabupaten Tulungagung	5.875
77	Kabupaten Wonogiri	2.430
78	Kabupaten Wonosobo	1.570

Sumber data : Badan Pusat Statistik

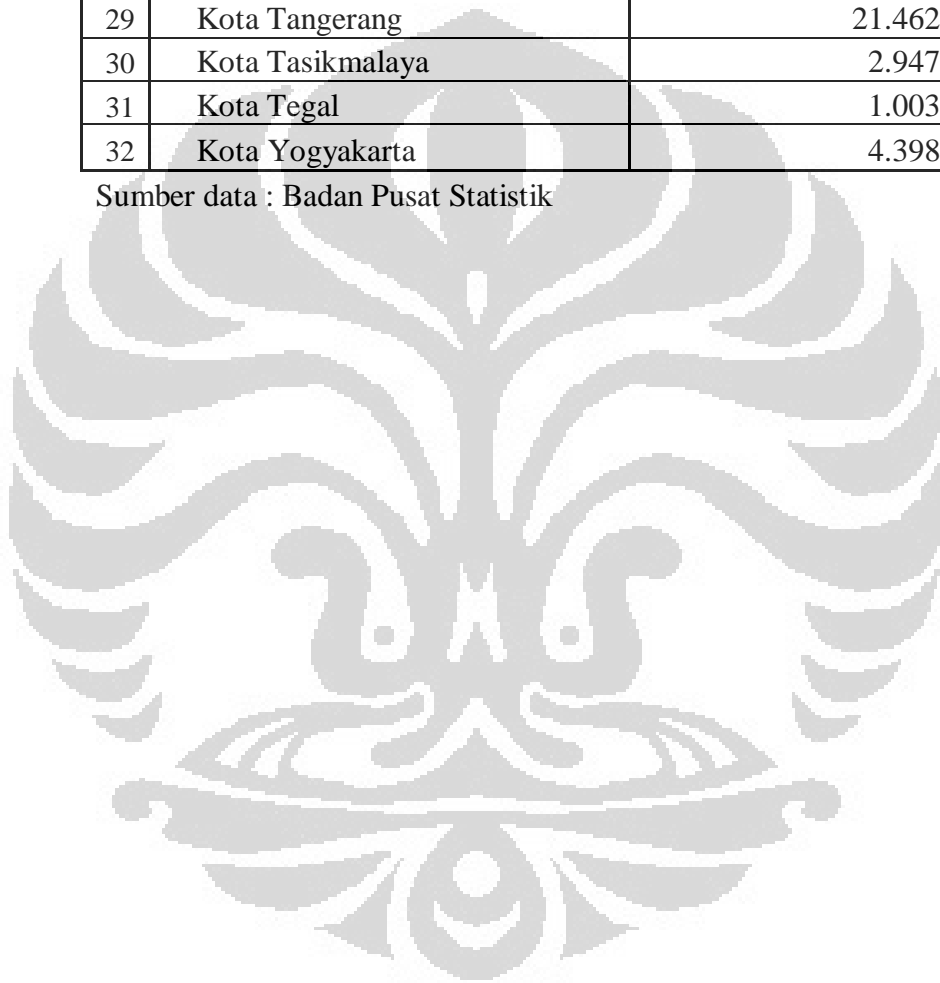
Tabel 10

Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2000 Menurut Kota  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kota di Pulau Jawa	PDRB Konstan 2000 (Milyar Rupiah)
1	Kota Bandung	21.371
2	Kota Banjar	588
3	Kota Batu	953
4	Kota Bekasi	11.740
5	Kota Blitar	574
6	Kota Bogor	3.567
7	Kota Cilegon	9.441
8	Kota Cimahi	5.122
9	Kota Cirebon	4.920
10	Kota Depok	4.750
11	Kota Jakarta Barat	44.170
12	Kota Jakarta Pusat	75.965
13	Kota Jakarta Selatan	65.772
14	Kota Jakarta Timur	50.496
15	Kota Jakarta Utara	55.830
16	Kota Kediri	18.792
17	Kota Madiun	889
18	Kota Magelang	878
19	Kota Malang	10.136
20	Kota Mojokerto	936
21	Kota Pasuruan	857
22	Kota Pekalongan	1.701

No	Nama Kota di Pulau Jawa	PDRB Konstan 2000 (Milyar Rupiah)
23	Kota Probolinggo	1.514
24	Kota Salatiga	722
25	Kota Semarang	16.194
26	Kota Sukabumi	1.421
27	Kota Surabaya	59.878
28	Kota Surakarta	3.858
29	Kota Tangerang	21.462
30	Kota Tasikmalaya	2.947
31	Kota Tegal	1.003
32	Kota Yogyakarta	4.398

Sumber data : Badan Pusat Statistik



Tabel 11

Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) Menurut Kabupaten  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Beban Tanggungan (%)
1	Kabupaten Bandung	54
2	Kabupaten Banjarnegara	55
3	Kabupaten Bantul	45
4	Kabupaten Banyumas	52
5	Kabupaten Banyuwangi	46
6	Kabupaten Batang	50
7	Kabupaten Bekasi	51
8	Kabupaten Blitar	48
9	Kabupaten Blora	49
10	Kabupaten Bogor	59
11	Kabupaten Bojonegoro	45
12	Kabupaten Bondowoso	46
13	Kabupaten Boyolali	51
14	Kabupaten Brebes	55
15	Kabupaten Ciamis	50
16	Kabupaten Cianjur	56
17	Kabupaten Cilacap	53
18	Kabupaten Cirebon	53
19	Kabupaten Demak	51
20	Kabupaten Garut	64
21	Kabupaten Gresik	45
22	Kabupaten Grobogan	48
23	Kabupaten Gunung Kidul	51
24	Kabupaten Indramayu	53
25	Kabupaten Jember	43
26	Kabupaten Jepara	51
27	Kabupaten Jombang	48
28	Kabupaten Karanganyar	43
29	Kabupaten Karawang	48
30	Kabupaten Kebumen	64
31	Kabupaten Kediri	48
32	Kabupaten Kendal	50
33	Kabupaten Klaten	53
34	Kabupaten Kudus	42
35	Kabupaten Kulonprogo	55

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Beban Tanggungan (%)
36	Kabupaten Kuningan	51
37	Kabupaten Lamongan	46
38	Kabupaten Lebak	58
39	Kabupaten Lumajang	46
40	Kabupaten Madiun	49
41	Kabupaten Magelang	51
42	Kabupaten Magetan	48
43	Kabupaten Majalengka	51
44	Kabupaten Malang	48
45	Kabupaten Mojokerto	45
46	Kabupaten Nganjuk	47
47	Kabupaten Ngawi	42
48	Kabupaten Pacitan	47
49	Kabupaten Pandeglang	63
50	Kabupaten Pasuruan	42
51	Kabupaten Pati	45
52	Kabupaten Pekalongan	55
53	Kabupaten Pemasang	53
54	Kabupaten Ponorogo	48
55	Kabupaten Probolinggo	45
56	Kabupaten Purbalingga	56
57	Kabupaten Purwakarta	52
58	Kabupaten Purworejo	61
59	Kabupaten Rembang	47
60	Kabupaten Semarang	49
61	Kabupaten Serang	57
62	Kabupaten Sidoarjo	42
63	Kabupaten Situbondo	39
64	Kabupaten Sleman	38
65	Kabupaten Sragen	47
66	Kabupaten Subang	46
67	Kabupaten Sukabumi	59
68	Kabupaten Sukoharjo	46
69	Kabupaten Sumedang	48
70	Kabupaten Tangerang	50

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Beban Tanggungan (%)
71	Kabupaten Tasikmalaya	53
72	Kabupaten Tegal	54
73	Kabupaten Temanggung	50
74	Kabupaten Trenggalek	54
75	Kabupaten Tuban	48
76	Kabupaten Tulungagung	45
77	Kabupaten Wonogiri	53
78	Kabupaten Wonosobo	56

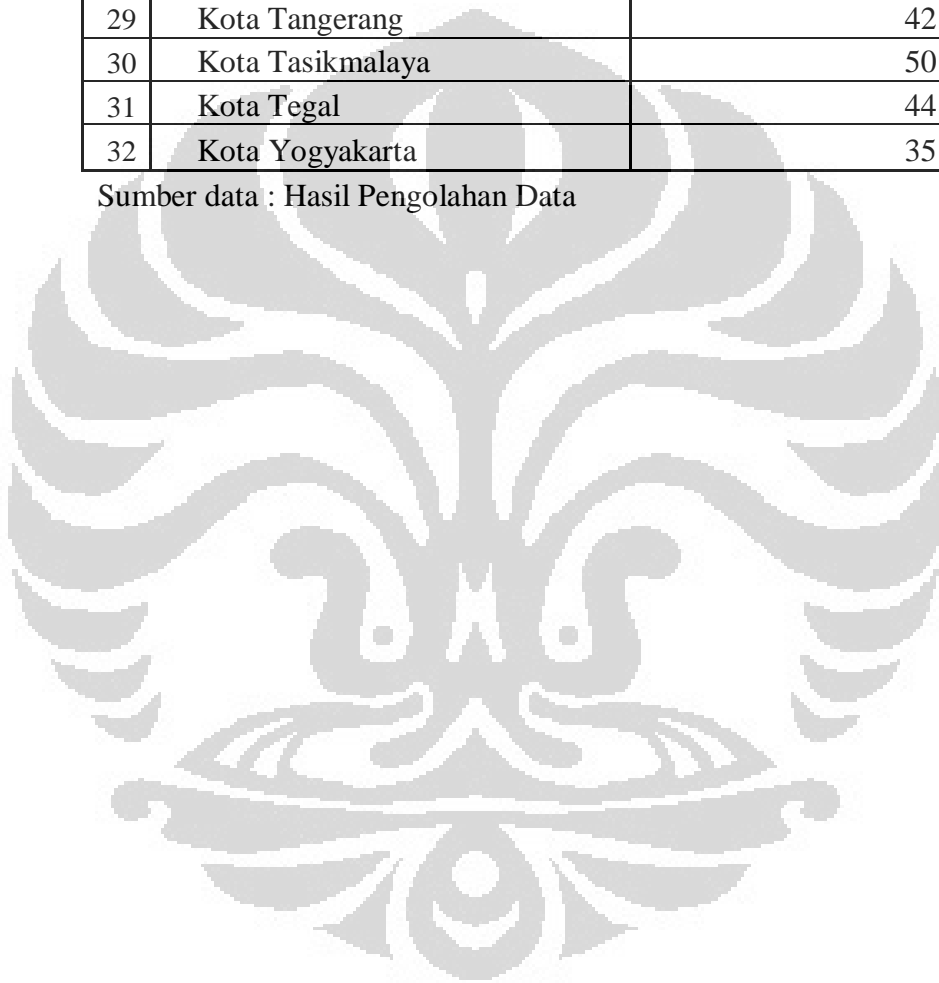
Sumber data : Hasil Pengolahan Data

Tabel 12  
 Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) Menurut Kota  
 di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Angka Beban Tanggungan (%)
1	Kota Bandung	38
2	Kota Banjar	50
3	Kota Batu	42
4	Kota Bekasi	39
5	Kota Blitar	47
6	Kota Bogor	43
7	Kota Cilegon	44
8	Kota Cimahi	44
9	Kota Cirebon	49
10	Kota Depok	44
11	Kota Jakarta Barat	40
12	Kota Jakarta Pusat	37
13	Kota Jakarta Selatan	35
14	Kota Jakarta Timur	37
15	Kota Jakarta Utara	37
16	Kota Kediri	40
17	Kota Madiun	43
18	Kota Magelang	43
19	Kota Malang	38
20	Kota Mojokerto	41
21	Kota Pasuruan	44
22	Kota Pekalongan	43

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Angka Beban Tanggungan (%)
23	Kota Probolinggo	48
24	Kota Salatiga	45
25	Kota Semarang	40
26	Kota Sukabumi	47
27	Kota Surabaya	36
28	Kota Surakarta	37
29	Kota Tangerang	42
30	Kota Tasikmalaya	50
31	Kota Tegal	44
32	Kota Yogyakarta	35

Sumber data : Hasil Pengolahan Data





Tabel 13  
 Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) Menurut Kabupaten  
 di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Kematian Kasar (‰)
1	Kabupaten Bandung	7
2	Kabupaten Banjarnegara	10
3	Kabupaten Bantul	15
4	Kabupaten Banyumas	14
5	Kabupaten Banyuwangi	5
6	Kabupaten Batang	18
7	Kabupaten Bekasi	5
8	Kabupaten Blitar	11
9	Kabupaten Blora	9
10	Kabupaten Bogor	11
11	Kabupaten Bojonegoro	17
12	Kabupaten Bondowoso	13
13	Kabupaten Boyolali	6
14	Kabupaten Brebes	6
15	Kabupaten Ciamis	20
16	Kabupaten Cianjur	8
17	Kabupaten Cilacap	6
18	Kabupaten Cirebon	6
19	Kabupaten Demak	8
20	Kabupaten Garut	13
21	Kabupaten Gresik	12
22	Kabupaten Grobogan	10
23	Kabupaten Gunung Kidul	16
24	Kabupaten Indramayu	17
25	Kabupaten Jember	11
26	Kabupaten Jepara	3
27	Kabupaten Jombang	13
28	Kabupaten Karanganyar	11
29	Kabupaten Karawang	11
30	Kabupaten Kebumen	8
31	Kabupaten Kediri	9
32	Kabupaten Kendal	5
33	Kabupaten Klaten	15
34	Kabupaten Kudus	7
35	Kabupaten Kulonprogo	15

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Kematian Kasar (‰)
36	Kabupaten Kuningan	9
37	Kabupaten Lamongan	12
38	Kabupaten Lebak	5
39	Kabupaten Lumajang	11
40	Kabupaten Madiun	3
41	Kabupaten Magelang	12
42	Kabupaten Magetan	8
43	Kabupaten Majalengka	10
44	Kabupaten Malang	10
45	Kabupaten Mojokerto	17
46	Kabupaten Nganjuk	10
47	Kabupaten Ngawi	6
48	Kabupaten Pacitan	11
49	Kabupaten Pandeglang	12
50	Kabupaten Pasuruan	8
51	Kabupaten Pati	11
52	Kabupaten Pekalongan	15
53	Kabupaten Pemasang	12
54	Kabupaten Ponorogo	14
55	Kabupaten Probolinggo	15
56	Kabupaten Purbalingga	5
57	Kabupaten Purwakarta	8
58	Kabupaten Purworejo	12
59	Kabupaten Rembang	11
60	Kabupaten Semarang	16
61	Kabupaten Serang	3
62	Kabupaten Sidoarjo	3
63	Kabupaten Situbondo	5
64	Kabupaten Sleman	9
65	Kabupaten Sragen	8
66	Kabupaten Subang	8
67	Kabupaten Sukabumi	7
68	Kabupaten Sukoharjo	9
69	Kabupaten Sumedang	10
70	Kabupaten Tangerang	3

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Kematian Kasar (‰)
71	Kabupaten Tasikmalaya	16
72	Kabupaten Tegal	12
73	Kabupaten Temanggung	6
74	Kabupaten Trenggalek	7
75	Kabupaten Tuban	5
76	Kabupaten Tulungagung	9
77	Kabupaten Wonogiri	14
78	Kabupaten Wonosobo	11

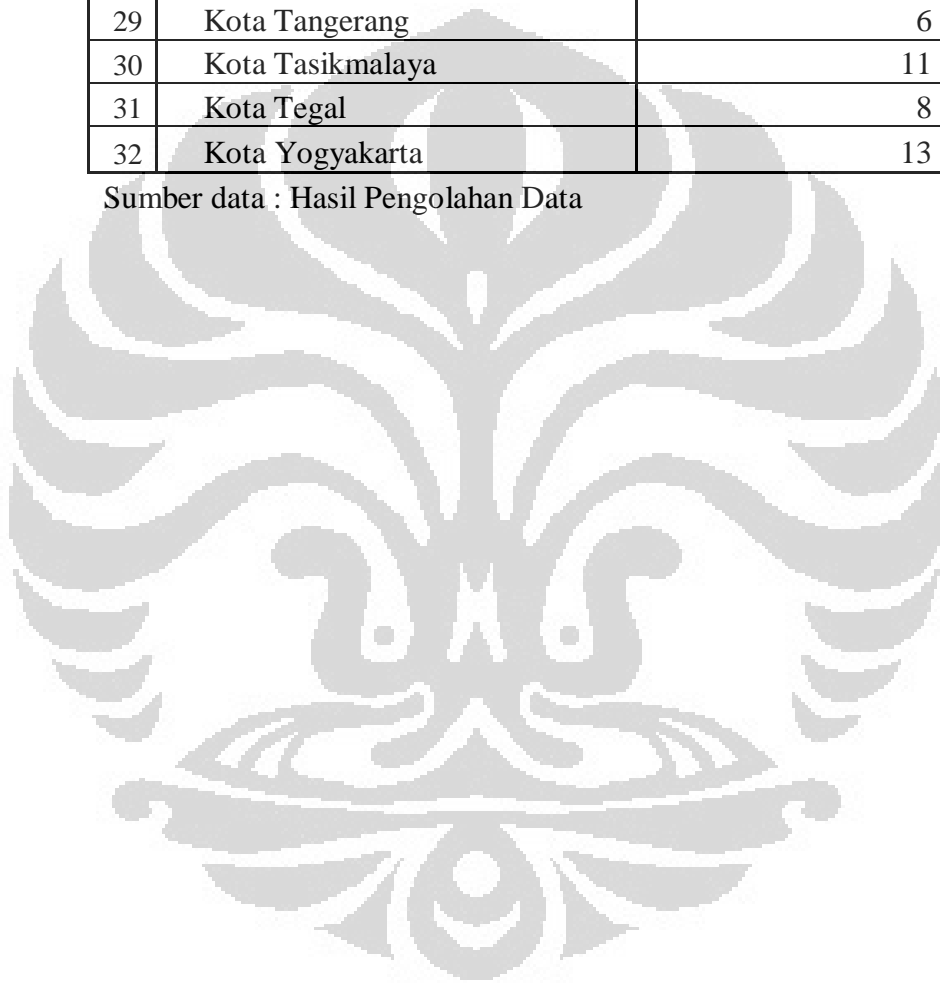
Sumber data : Hasil Pengolahan Data

Tabel 14  
 Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) Menurut Kota  
 di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Angka Kematian Kasar (‰)
1	Kota Bandung	5
2	Kota Banjar	11
3	Kota Batu	8
4	Kota Bekasi	9
5	Kota Blitar	15
6	Kota Bogor	5
7	Kota Cilegon	8
8	Kota Cimahi	8
9	Kota Cirebon	12
10	Kota Depok	8
11	Kota Jakarta Barat	5
12	Kota Jakarta Pusat	7
13	Kota Jakarta Selatan	8
14	Kota Jakarta Timur	8
15	Kota Jakarta Utara	7
16	Kota Kediri	7
17	Kota Madiun	14
18	Kota Magelang	5
19	Kota Malang	11
20	Kota Mojokerto	13
21	Kota Pasuruan	6
22	Kota Pekalongan	9

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Angka Kematian Kasar (%)
23	Kota Probolinggo	20
24	Kota Salatiga	9
25	Kota Semarang	9
26	Kota Sukabumi	31
27	Kota Surabaya	10
28	Kota Surakarta	12
29	Kota Tangerang	6
30	Kota Tasikmalaya	11
31	Kota Tegal	8
32	Kota Yogyakarta	13

Sumber data : Hasil Pengolahan Data



Tabel 15

Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) Menurut Kabupaten  
di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Kelahiran Kasar (‰)
1	Kabupaten Bandung	33
2	Kabupaten Banjarnegara	36
3	Kabupaten Bantul	31
4	Kabupaten Banyumas	36
5	Kabupaten Banyuwangi	29
6	Kabupaten Batang	28
7	Kabupaten Bekasi	38
8	Kabupaten Blitar	20
9	Kabupaten Blora	25
10	Kabupaten Bogor	50
11	Kabupaten Bojonegoro	31
12	Kabupaten Bondowoso	22
13	Kabupaten Boyolali	30
14	Kabupaten Brebes	20
15	Kabupaten Ciamis	36
16	Kabupaten Cianjur	46
17	Kabupaten Cilacap	29
18	Kabupaten Cirebon	25
19	Kabupaten Demak	27
20	Kabupaten Garut	39
21	Kabupaten Gresik	48
22	Kabupaten Grobogan	27
23	Kabupaten Gunung Kidul	22
24	Kabupaten Indramayu	32
25	Kabupaten Jember	26
26	Kabupaten Jepara	30
27	Kabupaten Jombang	34
28	Kabupaten Karanganyar	28
29	Kabupaten Karawang	33
30	Kabupaten Kebumen	45
31	Kabupaten Kediri	25
32	Kabupaten Kendal	28
33	Kabupaten Klaten	29
34	Kabupaten Kudus	21
35	Kabupaten Kulonprogo	33

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Kelahiran Kasar (‰)
36	Kabupaten Kuningan	40
37	Kabupaten Lamongan	24
38	Kabupaten Lebak	22
39	Kabupaten Lumajang	37
40	Kabupaten Madiun	31
41	Kabupaten Magelang	31
42	Kabupaten Magetan	18
43	Kabupaten Majalengka	32
44	Kabupaten Malang	29
45	Kabupaten Mojokerto	42
46	Kabupaten Nganjuk	46
47	Kabupaten Ngawi	15
48	Kabupaten Pacitan	43
49	Kabupaten Pandeglang	42
50	Kabupaten Pasuruan	46
51	Kabupaten Pati	26
52	Kabupaten Pekalongan	32
53	Kabupaten Pemasang	24
54	Kabupaten Ponorogo	15
55	Kabupaten Probolinggo	36
56	Kabupaten Purbalingga	23
57	Kabupaten Purwakarta	35
58	Kabupaten Purworejo	26
59	Kabupaten Rembang	29
60	Kabupaten Semarang	30
61	Kabupaten Serang	24
62	Kabupaten Sidoarjo	35
63	Kabupaten Situbondo	30
64	Kabupaten Sleman	31
65	Kabupaten Sragen	31
66	Kabupaten Subang	22
67	Kabupaten Sukabumi	44
68	Kabupaten Sukoharjo	23
69	Kabupaten Sumedang	37
70	Kabupaten Tangerang	34

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Kelahiran Kasar (‰)
71	Kabupaten Tasikmalaya	38
72	Kabupaten Tegal	35
73	Kabupaten Temanggung	28
74	Kabupaten Trenggalek	27
75	Kabupaten Tuban	24
76	Kabupaten Tulungagung	28
77	Kabupaten Wonogiri	34
78	Kabupaten Wonosobo	28

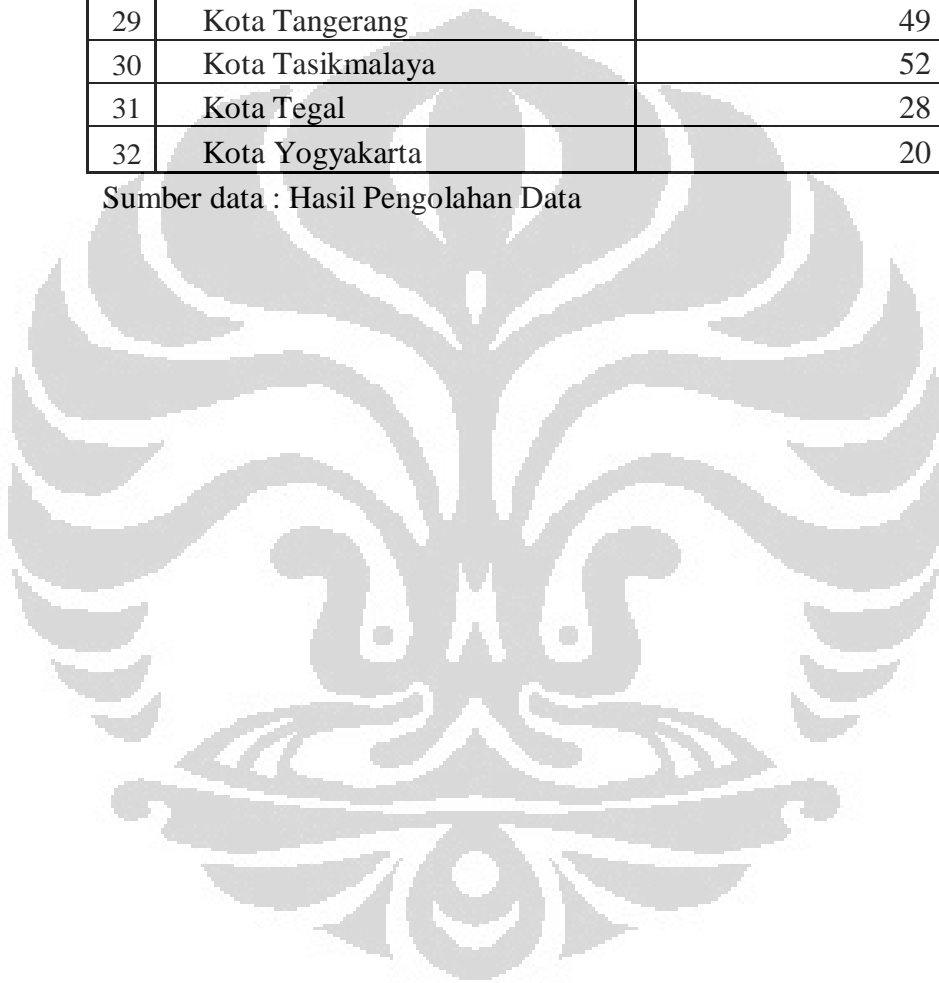
Sumber data : Hasil Pengolahan Data

Tabel 16  
 Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) Menurut Kota  
 di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Angka Kelahiran Kasar (‰)
1	Kota Bandung	38
2	Kota Banjar	36
3	Kota Batu	34
4	Kota Bekasi	26
5	Kota Blitar	24
6	Kota Bogor	29
7	Kota Cilegon	29
8	Kota Cimahi	47
9	Kota Cirebon	42
10	Kota Depok	48
11	Kota Jakarta Barat	34
12	Kota Jakarta Pusat	34
13	Kota Jakarta Selatan	39
14	Kota Jakarta Timur	42
15	Kota Jakarta Utara	21
16	Kota Kediri	28
17	Kota Madiun	59
18	Kota Magelang	38
19	Kota Malang	31
20	Kota Mojokerto	37
21	Kota Pasuruan	27
22	Kota Pekalongan	22

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Angka Kelahiran Kasar (%)
23	Kota Probolinggo	29
24	Kota Salatiga	32
25	Kota Semarang	23
26	Kota Sukabumi	49
27	Kota Surabaya	52
28	Kota Surakarta	30
29	Kota Tangerang	49
30	Kota Tasikmalaya	52
31	Kota Tegal	28
32	Kota Yogyakarta	20

Sumber data : Hasil Pengolahan Data





Tabel 17  
 Angka Migrasi Keluar, Masuk, dan Bersih  
 (*Out Migration, In Migration, and Netto Migration*) Menurut Kabupaten  
 di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Migrasi Keluar (‰)	Angka Migrasi Masuk (‰)	Angka Migrasi Bersih (‰)
1	Kabupaten Bandung	20	6	-15
2	Kabupaten Banjarnegara	32	9	-23
3	Kabupaten Bantul	22	12	-10
4	Kabupaten Banyumas	23	6	-16
5	Kabupaten Banyuwangi	7	3	-4
6	Kabupaten Batang	26	12	-14
7	Kabupaten Bekasi	12	9	-4
8	Kabupaten Blitar	44	23	-22
9	Kabupaten Blora	13	10	-3
10	Kabupaten Bogor	11	3	-8
11	Kabupaten Bojonegoro	17	4	-13
12	Kabupaten Bondowoso	9	7	-2
13	Kabupaten Boyolali	26	8	-18
14	Kabupaten Brebes	13	2	-11
15	Kabupaten Ciamis	29	10	-19
16	Kabupaten Cianjur	13	8	-6
17	Kabupaten Cilacap	59	23	-36
18	Kabupaten Cirebon	10	10	0
19	Kabupaten Demak	9	10	1
20	Kabupaten Garut	18	10	-8
21	Kabupaten Gresik	20	19	-1
22	Kabupaten Grobogan	29	11	-18
23	Kabupaten Gunung Kidul	16	7	-8
24	Kabupaten Indramayu	29	9	-20
25	Kabupaten Jember	16	5	-11
26	Kabupaten Jepara	10	10	1
27	Kabupaten Jombang	21	10	-11
28	Kabupaten Karanganyar	28	12	-16
29	Kabupaten Karawang	11	3	-8
30	Kabupaten Kebumen	47	11	-36
31	Kabupaten Kediri	30	9	-21
32	Kabupaten Kendal	26	14	-12
33	Kabupaten Klaten	26	20	-6
34	Kabupaten Kudus	10	4	-6

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Migrasi Keluar (‰)	Angka Migrasi Masuk (‰)	Angka Migrasi Bersih (‰)
35	Kabupaten Kulonprogo	36	15	-21
36	Kabupaten Kuningan	29	9	-20
37	Kabupaten Lamongan	28	7	-20
38	Kabupaten Lebak	27	11	-16
39	Kabupaten Lumajang	13	4	-9
40	Kabupaten Madiun	41	18	-22
41	Kabupaten Magelang	23	8	-16
42	Kabupaten Magetan	17	9	-7
43	Kabupaten Majalengka	33	10	-23
44	Kabupaten Malang	21	5	-16
45	Kabupaten Mojokerto	24	5	-19
46	Kabupaten Nganjuk	23	7	-16
47	Kabupaten Ngawi	10	3	-8
48	Kabupaten Pacitan	19	9	-9
49	Kabupaten Pandeglang	22	7	-15
50	Kabupaten Pasuruan	8	5	-3
51	Kabupaten Pati	26	18	-9
52	Kabupaten Pekalongan	34	7	-27
53	Kabupaten Pemasang	16	3	-13
54	Kabupaten Ponorogo	38	11	-28
55	Kabupaten Probolinggo	11	9	-2
56	Kabupaten Purbalingga	37	12	-25
57	Kabupaten Purwakarta	9	4	-5
58	Kabupaten Purworejo	32	5	-27
59	Kabupaten Rembang	15	6	-9
60	Kabupaten Semarang	32	12	-20
61	Kabupaten Serang	11	5	-6
62	Kabupaten Sidoarjo	13	12	-2
63	Kabupaten Situbondo	5	7	3
64	Kabupaten Sleman	21	17	-5
65	Kabupaten Sragen	40	13	-27
66	Kabupaten Subang	19	10	-9
67	Kabupaten Sukabumi	15	5	-10
68	Kabupaten Sukoharjo	38	4	-34
69	Kabupaten Sumedang	16	7	-9
70	Kabupaten Tangerang	6	5	-1

No	Nama Kabupaten di Pulau Jawa	Angka Migrasi Keluar (‰)	Angka Migrasi Masuk (‰)	Angka Migrasi Bersih (‰)
71	Kabupaten Tasikmalaya	22	3	-19
72	Kabupaten Tegal	27	7	-20
73	Kabupaten Temanggung	10	1	-9
74	Kabupaten Trenggalek	14	7	-7
75	Kabupaten Tuban	11	5	-6
76	Kabupaten Tulungagung	34	15	-19
77	Kabupaten Wonogiri	30	6	-23
78	Kabupaten Wonosobo	36	9	-28

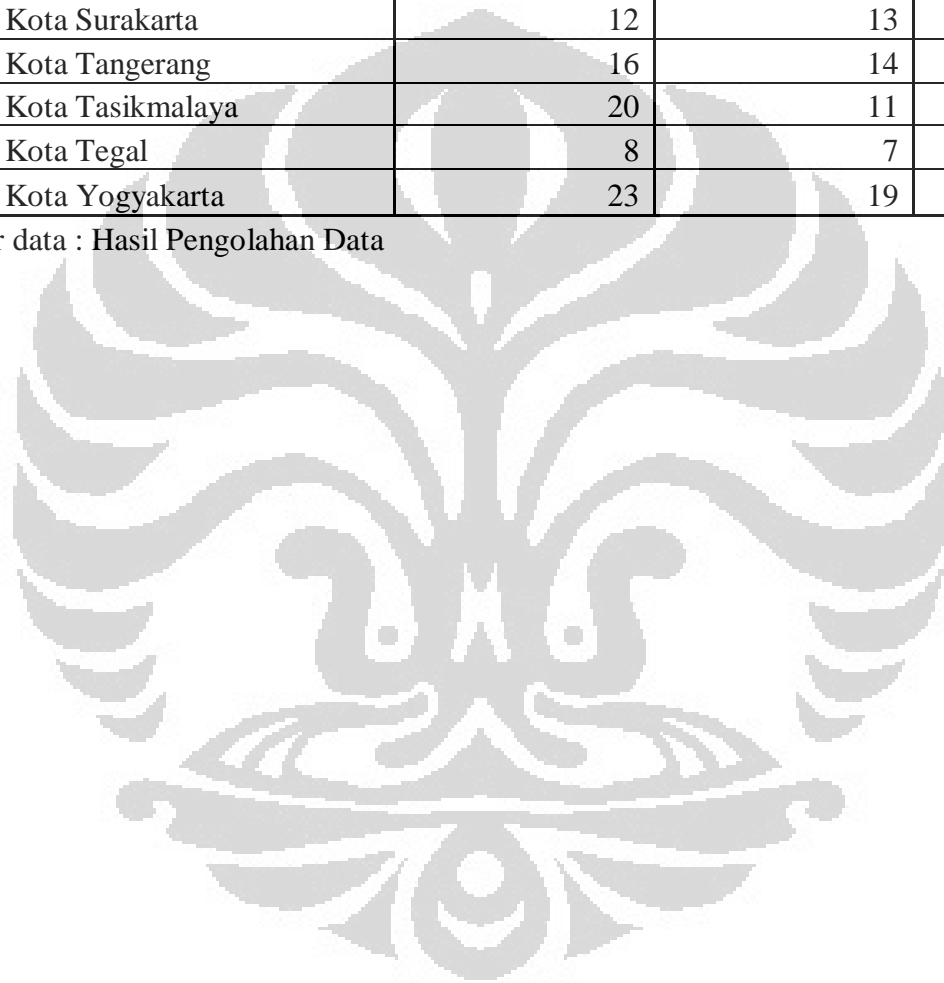
Sumber data : Hasil Pengolahan Data

Tabel 18  
 Angka Migrasi Keluar, Masuk, dan Bersih  
 (*Out Migration, In Migration, and Netto Migration*) Menurut Kota  
 di Pulau Jawa Tahun 2005

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Angka Migrasi Keluar (‰)	Angka Migrasi Masuk (‰)	Angka Migrasi Bersih (‰)
1	Kota Bandung	19	13	-6
2	Kota Banjar	16	9	-6
3	Kota Batu	10	6	-4
4	Kota Bekasi	17	10	-6
5	Kota Blitar	17	10	-7
6	Kota Bogor	13	8	-5
7	Kota Cilegon	19	17	-2
8	Kota Cimahi	12	15	3
9	Kota Cirebon	19	11	-8
10	Kota Depok	12	13	1
11	Kota Jakarta Barat	11	11	0
12	Kota Jakarta Pusat	11	10	-1
13	Kota Jakarta Selatan	18	16	-2
14	Kota Jakarta Timur	18	14	-4
15	Kota Jakarta Utara	19	16	-4
16	Kota Kediri	12	12	0
17	Kota Madiun	21	8	-13
18	Kota Magelang	20	6	-14
19	Kota Malang	20	6	-13
20	Kota Mojokerto	9	7	-2

No	Nama Kota di Pulau Jawa	Angka Migrasi Keluar (%)	Angka Migrasi Masuk (%)	Angka Migrasi Bersih (%)
21	Kota Pasuruan	17	5	-12
22	Kota Pekalongan	8	5	-3
23	Kota Probolinggo	21	10	-11
24	Kota Salatiga	12	11	-1
25	Kota Semarang	15	7	-9
26	Kota Sukabumi	89	17	-72
27	Kota Surabaya	11	7	-4
28	Kota Surakarta	12	13	1
29	Kota Tangerang	16	14	-2
30	Kota Tasikmalaya	20	11	-9
31	Kota Tegal	8	7	-1
32	Kota Yogyakarta	23	19	-4

Sumber data : Hasil Pengolahan Data



Tabel 19

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Kelompok Umur Spesifik  
dan Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2005

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk			Total	Angka Beban Tanggungan (%)
		0 - 14	15 - 64	65+		
1	Sumur	7.416	13.133	805	21.354	62,6
2	Cimanggu	12.624	22.351	1.367	36.342	62,6
3	Cibaliung	8.852	15.676	958	25.486	62,58
4	Cibitung	6.768	11.982	734	19.484	62,61
5	Cikeusik	16.883	29.882	1.839	48.604	62,65
6	Cigeulis	13.198	23.359	1.430	37.987	62,62
7	Panimbang	26.828	47.492	2.907	77.227	62,61
8	Munjul	7.765	13.748	842	22.355	62,61
9	Angsana	9.239	16.323	1.000	26.562	62,73
10	Sindangresmi	7.317	12.963	793	21.073	62,56
11	Picung	11.562	20.488	1.255	33.305	62,56
12	Bojong	11.494	20.353	1.247	33.094	62,6
13	Saketi	13.758	24.365	1.491	39.614	62,59
14	Cisata	10.770	19.070	1.167	31.007	62,6
15	Pagelaran	11.518	20.402	1.249	33.169	62,58
16	Patia	9.392	16.623	1.018	27.033	62,62
17	Sukaesmi	11.456	20.270	1.243	32.969	62,65
18	Labuan	17.657	31.247	1.910	50.814	62,62
19	Carita	10.904	19.321	1.183	31.408	62,56
20	Jiput	11.379	20.157	1.229	32.765	62,55
21	Cikedal	10.446	18.497	1.133	30.076	62,6
22	Menes	16.694	29.561	1.810	48.065	62,6
23	Mandalawangi	15.272	27.041	1.655	43.968	62,6
24	Cimanuk	12.831	22.729	1.391	36.951	62,57
25	Cipeucang	9.558	16.924	1.035	27.517	62,59
26	Banjar	10.373	18.333	1.125	29.831	62,72
27	Kaduhejo	11.524	20.396	1.249	33.169	62,63
28	Mekarjaya	7.065	12.504	765	20.334	62,62
29	Pandeglang	29.597	52.393	3.207	85.197	62,61
30	Cadasari	11.389	20.153	1.233	32.775	62,63
31	Karangtanjung	12.939	22.911	1.403	37.253	62,6

Sumber data : Badan Pusat Statistik 2006

Tabel 20

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Kelompok Umur Spesifik  
dan Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2009

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Total	Angka Beban Tanggungan (%)
		0 - 14	15 - 64	65+		
1	Sumur	7.480	14.458	809	22.747	57,33
2	Cimanggu	12.456	23.086	1.203	36.745	59,17
3	Cibaliung	9.137	18.411	1.328	28.876	56,84
4	Cibitung	6.579	13.703	945	21.227	54,91
5	Cikeusik	17.176	32.051	1.996	51.223	59,82
6	Cigeulis	11.269	21.409	1.244	33.922	58,45
7	Panimbang	16.317	30.769	1.938	49.024	59,33
8	Sabang	12.112	21.995	1.018	35.125	59,7
9	Munjul	7.356	14.083	748	22.187	57,54
10	Angsana	8.634	16.215	784	25.663	58,08
11	Sindangresmi	6.891	13.654	857	21.402	56,75
12	Picung	11.474	22.218	1.522	35.124	58,49
13	Bojong	11.270	21.293	1.222	33.785	58,67
14	Saketi	14.108	27.095	1.854	43.057	58,91
15	Cisata	7.455	14.961	987	23.403	56,43
16	Pagelaran	11.325	21.387	1.285	33.997	58,96
17	Patia	9.134	17.271	953	27.358	58,4
18	Sukaresmi	11.301	21.312	1.252	33.865	58,9
19	Labuan	18.492	33.963	2.079	54.534	60,57
20	Carita	10.638	20.281	1.184	32.103	58,29
21	Jiput	9.618	17.947	907	28.472	58,64
22	Cikedal	10.080	19.347	1.095	30.522	57,76
23	Menes	11.770	22.340	1.313	35.423	58,56
24	Pulosari	8.844	17.563	1.186	27.593	57,11
25	Mandalawangi	15.116	28.855	1.880	45.851	58,9
26	Cimanuk	12.709	24.104	1.496	38.309	58,93
27	Cipeucang	9.123	17.763	1.069	27.955	57,38
28	Banjar	10.105	18.814	936	29.855	58,69
29	Kaduhejo	11.484	21.806	1.336	34.626	58,79
30	Mekarjaya	6.328	12.057	573	18.958	57,24

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Total	Angka Beban Tanggungan (%)
		0 - 14	15 - 64	65+		
31	Pandeglang	13.337	24.862	1.560	39.759	59,92
32	Majasari	14.553	28.111	2.070	44.714	59,13
33	Cadasari	10.636	19.776	1.001	31.413	58,84
34	Karang Tanjung	10.394	20.544	1.481	32.419	57,8
35	Koroncong	5.586	11.452	730	17.768	55,15

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2010

Tabel 21

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Kelompok Umur Spesifik dan Angka Beban Tanggungan di Kecamatan Labuan Tahun 2009

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk			Total	Angka Beban Tanggungan (%)
		0 - 14	15 - 64	65+		
1	Cigondang	2.892	5.311	326	8.529	60,59
2	Sukamaju	1.079	1.980	121	3.180	60,61
3	Rancateureup	905	1.659	101	2.665	60,64
4	Kalanganyar	2.422	4.446	272	7.140	60,59
5	Labuan	3.912	7.182	438	11.532	60,57
6	Teluk	3.787	6.957	425	11.169	60,54
7	Banyumekar	596	1.099	68	1.763	60,42
8	Banyubiru	704	1.291	78	2.073	60,57
9	Caringin	2.195	4.038	250	6.483	60,55

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2010

LAMPIRAN FOTO-FOTO SURVEY



Gambar 1 Perbatasan Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang



Gambar 2 Kantor Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang





Gambar 3 Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Pandeglang



Gambar 4 Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Pandeglang 2



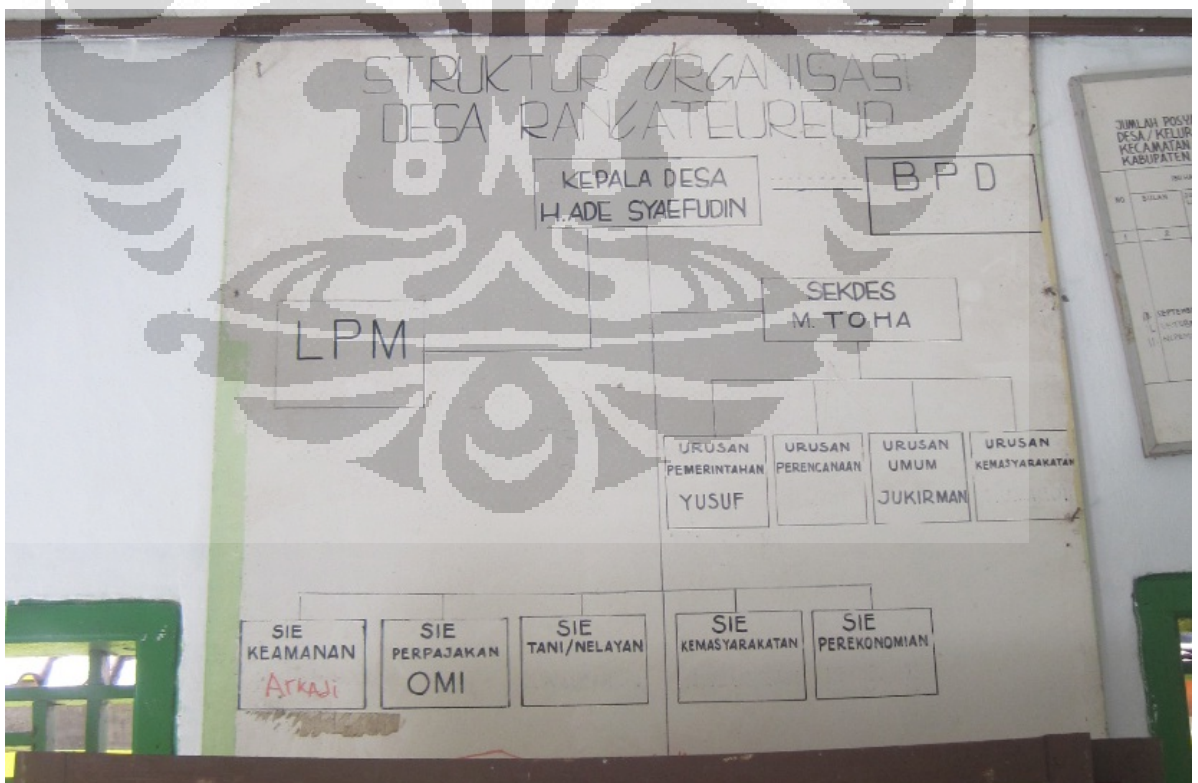
Gambar 5 Kondisi Jalan dan Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup  
Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang



Gambar 6 Kondisi Jalan dan Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup  
Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang 2



Gambar 7 Bersama Bpk Toha (Sekretaris Desa) di depan Kantor Kepala Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang



Gambar 8 Strukturr Organisasi Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang



Gambar 9 Permukiman di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Pandeglang



Gambar 10 Permukiman di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Pandeglang 2



Gambar 11 Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Pandeglang 3



Gambar 12 Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Pandeglang 4



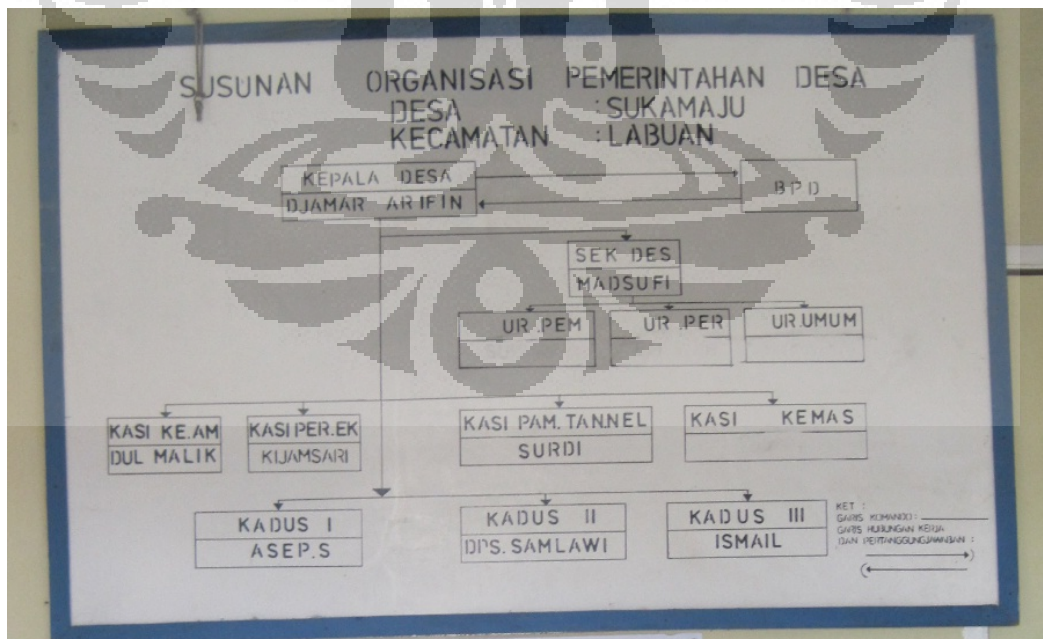
Gambar 13 Penggunaan Tanah di Desa Rancateureup Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Pandeglang 5



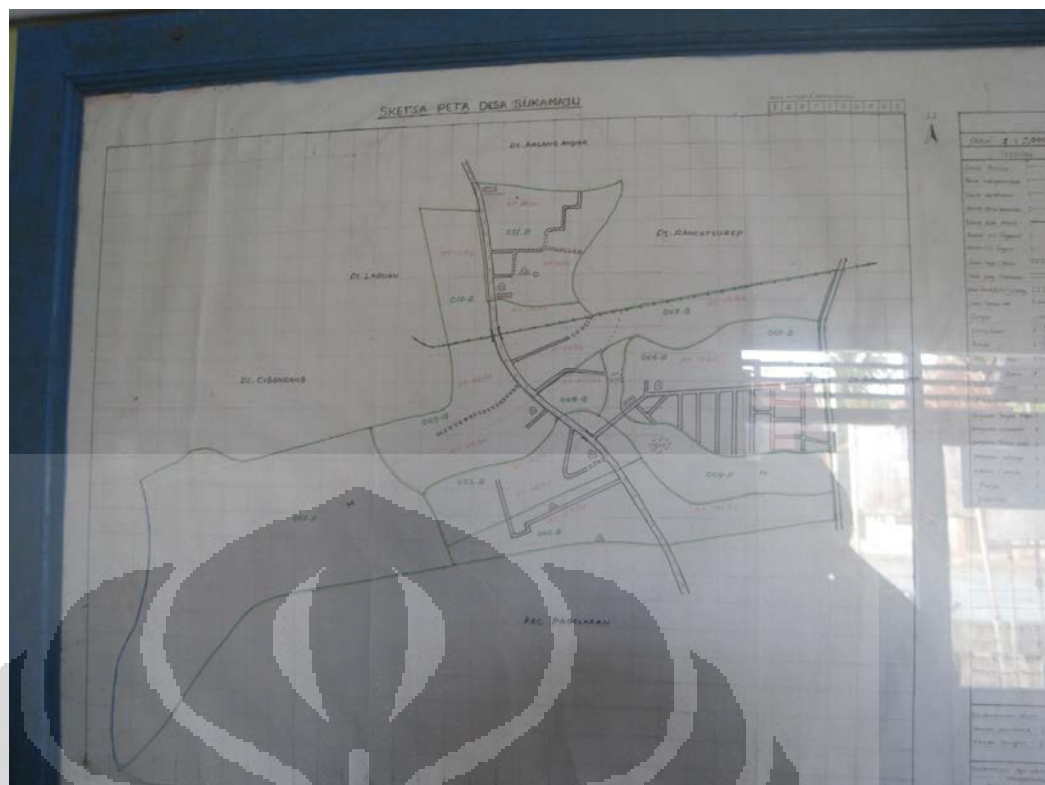
Gambar 14 Kantor Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Pandeglang



Gambar 15 Bersama Bpk Madsufi (Sekretaris Desa) di depan Kantor Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang



Gambar 16 Struktur Organisasi Desa Sukamaju Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang



Gambar 17 Sketsa Peta Desa Sukamaju di Kantor Desa Sukamaju  
Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang



Gambar 18 Penggunaan Tanah di Desa Sukamaju Kecamatan  
Labuan, Kabupaten Pandeglang

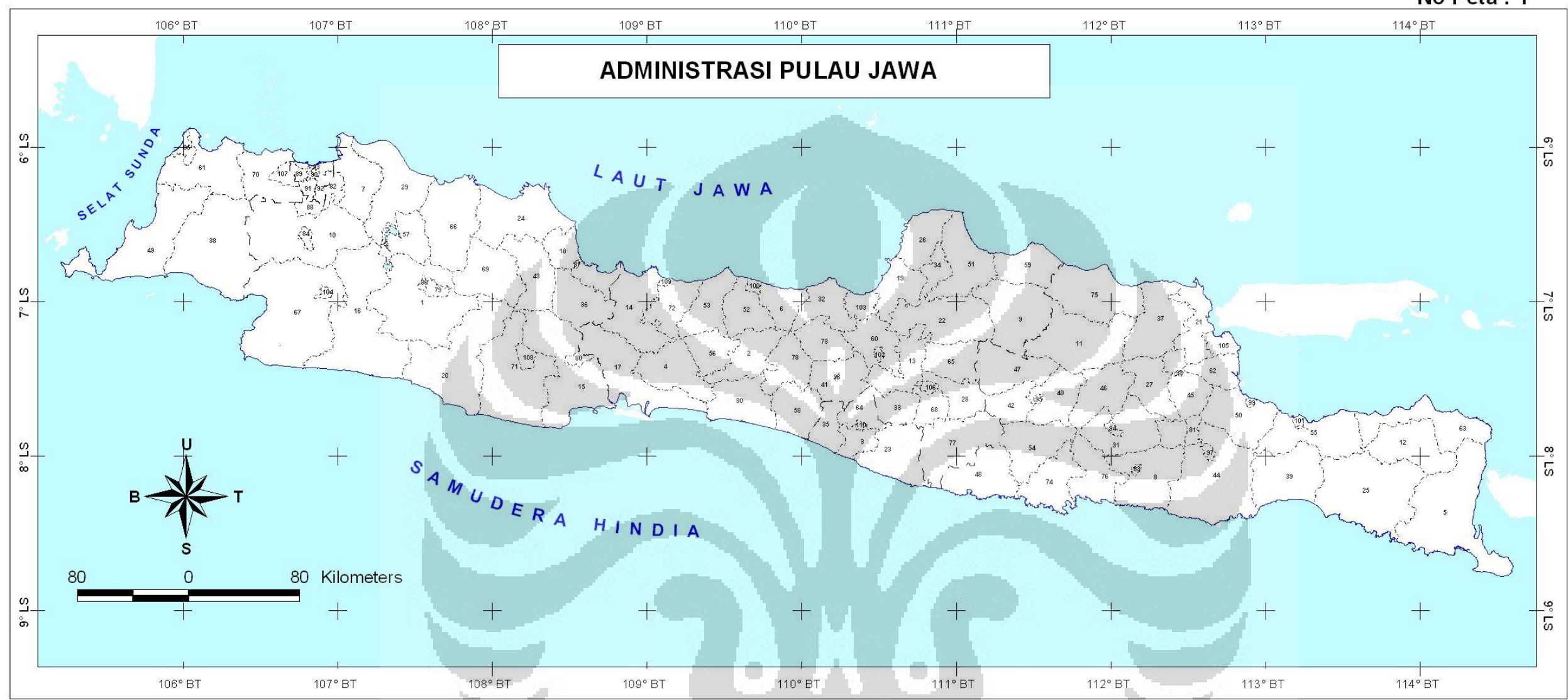




Gambar 19 Kondisi Jalan, Permukiman dan Penggunaan Tanah di Desa Sukamaju Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang



Gambar 20 Kondisi Jalan, Permukiman dan Penggunaan Tanah di Desa Sukamaju Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang 2



**Legenda**

- Batas Administrasi**
- Garis Pantai
  - - - Kabupaten/Kota
  - - - Propinsi

**Nama Kabupaten**

1. Kab. Bandung
2. Kab. Banjarnegara
3. Kab. Bantul
4. Kab. Banyumas
5. Kab. Banyuwangi
6. Kab. Batang

7. Kab. Bekasi
8. Kab. Blitar
9. Kab. Blora
10. Kab. Bogor
11. Kab. Bojonegoro
12. Kab. Bondowoso
13. Kab. Boyolali
14. Kab. Brebes
15. Kab. Ciamis
16. Kab. Cianjur
17. Kab. Cilacap
18. Kab. Cirebon
19. Kab. Demak
20. Kab. Garut
21. Kab. Gresik
22. Kab. Grobogan
23. Kab. Gunung Kidul
24. Kab. Indramayu

25. Kab. Jember
26. Kab. Jepara
27. Kab. Jombang
28. Kab. Karanganyar
29. Kab. Karawang
30. Kab. Kebumen
31. Kab. Kediri
32. Kab. Kendal
33. Kab. Klaten
34. Kab. Kudus
35. Kab. Kulon Progo
36. Kab. Kuningan
37. Kab. Lamongan
38. Kab. Lebak
39. Kab. Lumajang
40. Kab. Madiun
41. Kab. Magelang
42. Kab. Magetan

43. Kab. Majalengka
44. Kab. Malang
45. Kab. Mojokerto
46. Kab. Nganjuk
47. Kab. Ngawi
48. Kab. Pacitan
49. Kab. Pandeglang
50. Kab. Pasuruan
51. Kab. Pati
52. Kab. Pekalongan
53. Kab. Pemasang
54. Kab. Ponorogo
55. Kab. Probolinggo
56. Kab. Purbalingga
57. Kab. Purwokarta
58. Kab. Purworejo
59. Kab. Rembang
60. Kab. Semarang

61. Kab. Serang
62. Kab. Sidoarjo
63. Kab. Situbondo
64. Kab. Sleman
65. Kab. Sragen
66. Kab. Subang
67. Kab. Sukabumi
68. Kab. Sukoharjo
69. Kab. Sumedang
70. Kab. Tangerang
71. Kab. Tasikmalaya
72. Kab. Tegal
73. Kab. Temanggung
74. Kab. Trenggalek
75. Kab. Tuban
76. Kab. Tulungagung
77. Kab. Wonogiri
78. Kab. Wonosobo

**Nama Kota**

79. Kota Bandung
80. Kota Banjar
81. Kota Batu
82. Kota Bekasi
83. Kota Blitar
84. Kota Bogor
85. Kota Cilegon
86. Kota Cimahi
87. Kota Depok
88. Kota Cirebon
89. Kota Jakarta Barat
90. Kota Jakarta Pusat
91. Kota Jakarta Selatan
92. Kota Jakarta Timur
93. Kota Jakarta Utara

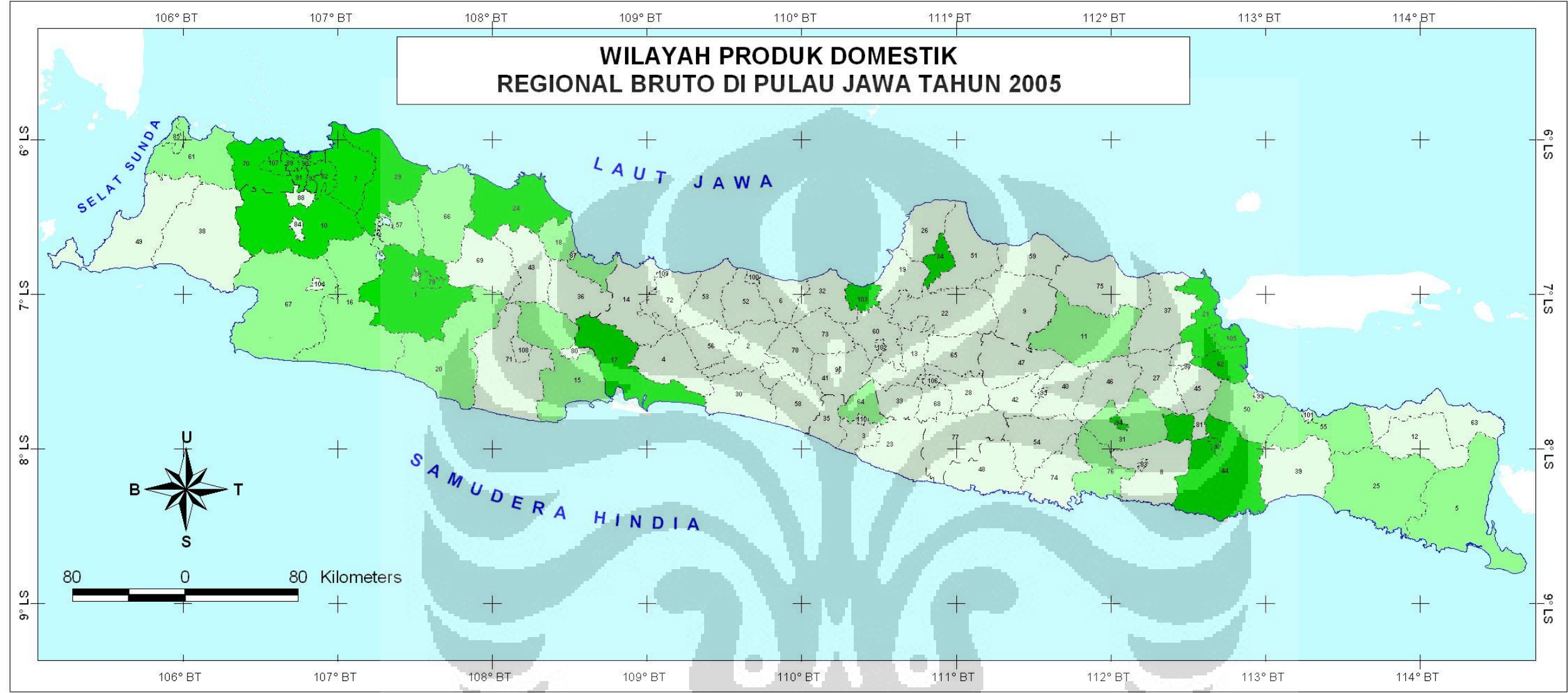
94. Kota Kediri
95. Kota Madiun
96. Kota Magelang
97. Kota Malang
98. Kota Mojokerto
99. Kota Pasuruan
100. Kota Pekalongan
101. Kota Probolinggo
102. Kota Salatiga
103. Kota Semarang
104. Kota Sukabumi
105. Kota Surabaya
106. Kota Surakarta
107. Kota Tangerang
108. Kota Tasikmalaya
109. Kota Tegal
110. Kota Yogyakarta



■ Pulau Jawa

Kartografer : Mentari DC Bangun  
 Sumber : Administrasi Pulau Jawa, Bakosurtanal

Sistem Proyeksi : GCS WGS 1984  
 Tahun Pembuatan : 2011



**Legenda**

**Batas Administrasi**  
 ——— Garis Pantai  
 - - - - - Kabupaten/Kota  
 - - - - - Propinsi

**Angka PDRB (Milyar)**  
 < 5000  
 5000 - 10.000  
 > 10.000

**Nama Kabupaten**  
 1. Kab. Bandung  
 2. Kab. Banjarnegara  
 3. Kab. Bantul  
 4. Kab. Banyumas  
 5. Kab. Banyuwangi  
 6. Kab. Batang

7. Kab. Bekasi  
 8. Kab. Blitar  
 9. Kab. Blora  
 10. Kab. Bogor  
 11. Kab. Bojonegoro  
 12. Kab. Bondowoso  
 13. Kab. Boyolali  
 14. Kab. Brebes  
 15. Kab. Ciamis  
 16. Kab. Cianjur  
 17. Kab. Cilacap  
 18. Kab. Cirebon  
 19. Kab. Demak  
 20. Kab. Garut  
 21. Kab. Gresik  
 22. Kab. Grobogan  
 23. Kab. Gunung Kidul  
 24. Kab. Indramayu

25. Kab. Jember  
 26. Kab. Jepara  
 27. Kab. Jombang  
 28. Kab. Karanganyar  
 29. Kab. Karawang  
 30. Kab. Kebumen  
 31. Kab. Kediri  
 32. Kab. Kendal  
 33. Kab. Klaten  
 34. Kab. Kudus  
 35. Kab. Kulon Progo  
 36. Kab. Kuningan  
 37. Kab. Lamongan  
 38. Kab. Lebak  
 39. Kab. Lumajang  
 40. Kab. Madiun  
 41. Kab. Magelang  
 42. Kab. Magetan

43. Kab. Majalengka  
 44. Kab. Malang  
 45. Kab. Mojokerto  
 46. Kab. Nganjuk  
 47. Kab. Ngawi  
 48. Kab. Pacitan  
 49. Kab. Pandeglang  
 50. Kab. Pasuruan  
 51. Kab. Pati  
 52. Kab. Pekalongan  
 53. Kab. Pemalang  
 54. Kab. Ponorogo  
 55. Kab. Probolinggo  
 56. Kab. Purbalingga  
 57. Kab. Purwokarta  
 58. Kab. Purworejo  
 59. Kab. Rembang  
 60. Kab. Semarang

61. Kab. Serang  
 62. Kab. Sidoarjo  
 63. Kab. Situbondo  
 64. Kab. Sleman  
 65. Kab. Sragen  
 66. Kab. Subang  
 67. Kab. Sukabumi  
 68. Kab. Sukoharjo  
 69. Kab. Sumedang  
 70. Kab. Tangerang  
 71. Kab. Tasikmalaya  
 72. Kab. Tegal  
 73. Kab. Temanggung  
 74. Kab. Trenggalek  
 75. Kab. Tuban  
 76. Kab. Tulungagung  
 77. Kab. Wonogiri  
 78. Kab. Wonosobo

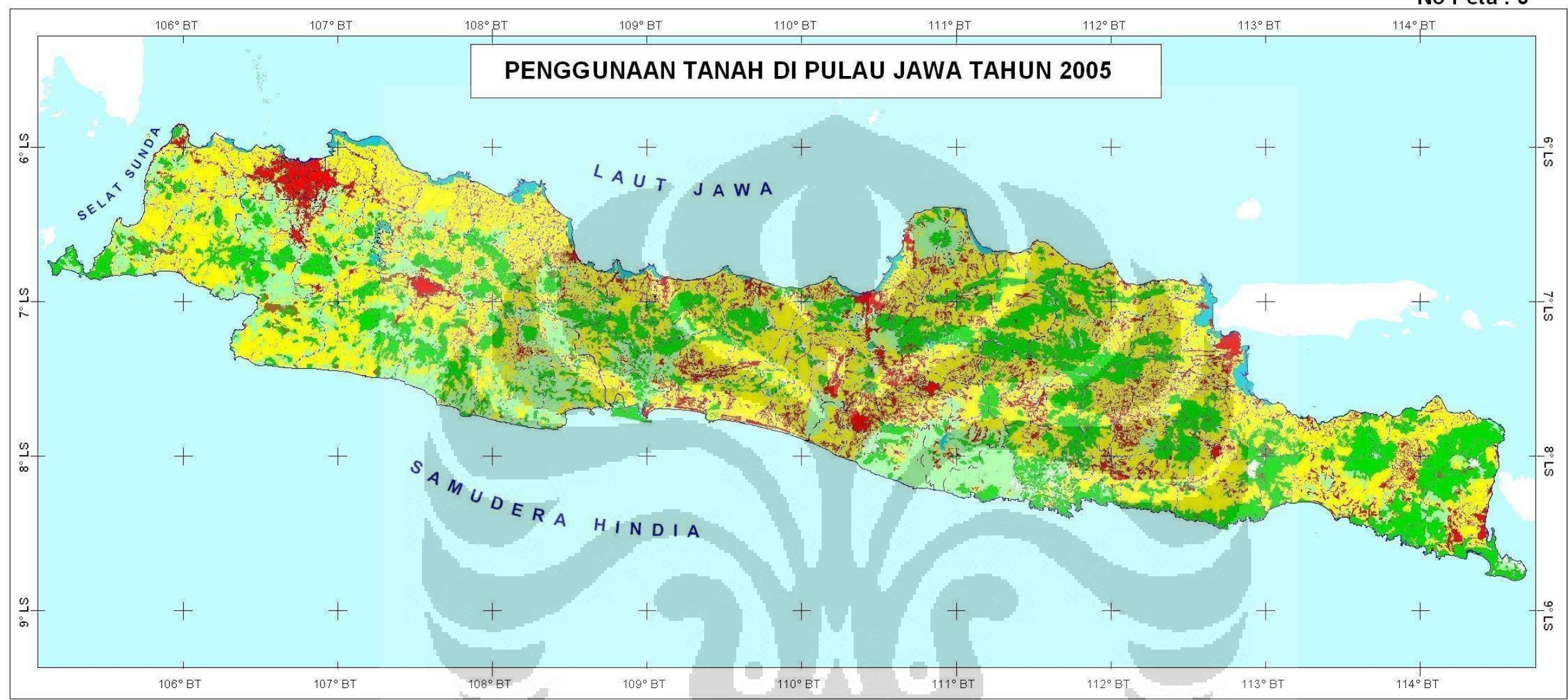
**Nama Kota**  
 79. Kota Bandung  
 80. Kota Banjar  
 81. Kota Batu  
 82. Kota Bekasi  
 83. Kota Blitar  
 84. Kota Bogor  
 85. Kota Cilegon  
 86. Kota Cimahi  
 87. Kota Depok  
 88. Kota Cirebon  
 89. Kota Jakarta Barat  
 90. Kota Jakarta Pusat  
 91. Kota Jakarta Selatan  
 92. Kota Jakarta Timur  
 93. Kota Jakarta Utara

94. Kota Kediri  
 95. Kota Madiun  
 96. Kota Magelang  
 97. Kota Malang  
 98. Kota Mojokerto  
 99. Kota Pasuruan  
 100. Kota Pekalongan  
 101. Kota Probolinggo  
 102. Kota Salatiga  
 103. Kota Semarang  
 104. Kota Sukabumi  
 105. Kota Surabaya  
 106. Kota Surakarta  
 107. Kota Tangerang  
 108. Kota Tasikmalaya  
 109. Kota Tegal  
 110. Kota Yogyakarta



Kartografer : Mentari DC Bangun  
 Sumber : - Administrasi Pulau Jawa, Bakosurtanal  
 - Badan Pusat Statistik, 2005  
 Sistem Proyeksi : GCS WGS 1984  
 Tahun Pembuatan : 2011

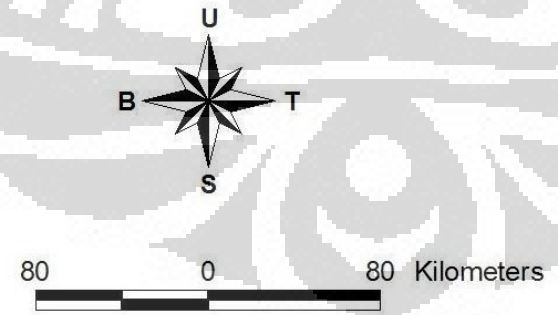
### PENGGUNAAN TANAH DI PULAU JAWA TAHUN 2005



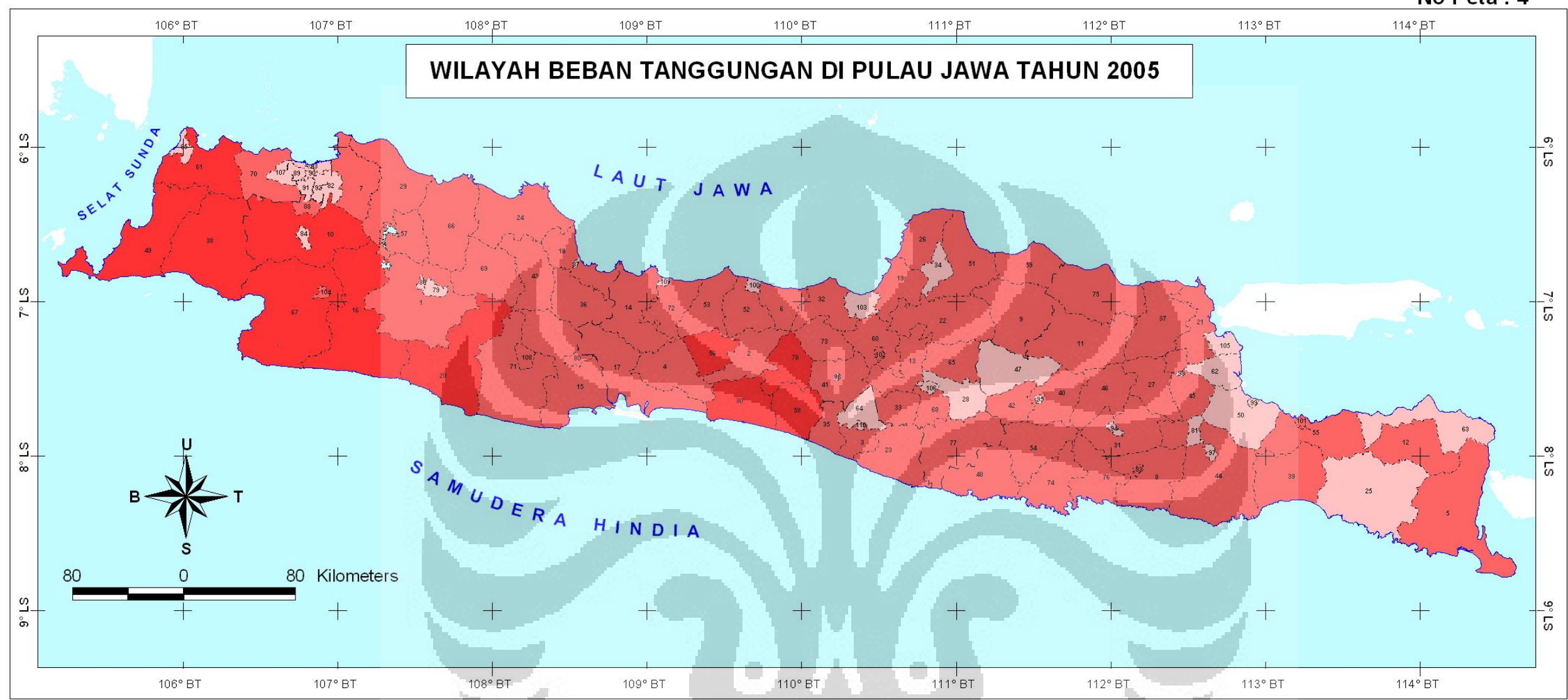
#### Legenda

- Batas Administrasi**
- Garis Pantai
  - - - Kabupaten/Kota
  - - - Propinsi

- Penggunaan Tanah**
- Hutan
  - Pertanian dan Persawahan
  - Kebun dan padang
  - Permukiman
  - Perairan Darat
  - Pertambangan
  - Tanah Terbuka

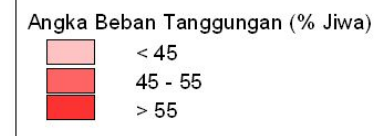


Kartografer : Mentari DC Bangun  
 Sumber : - Administrasi Pulau Jawa, Bakosurtanal  
 - Badan Pertanahan Nasional  
 Sistem Proyeksi : GCS WGS 1984  
 Tahun Pembuatan : 2005



**Legenda**

- Batas Administrasi**
- Garis Pantai
  - - - - - Kabupaten/Kota
  - - - - - Propinsi



- Nama Kabupaten**
1. Kab. Bandung
  2. Kab. Banjarnegara
  3. Kab. Bantul
  4. Kab. Banyumas
  5. Kab. Banyuwangi
  6. Kab. Batang

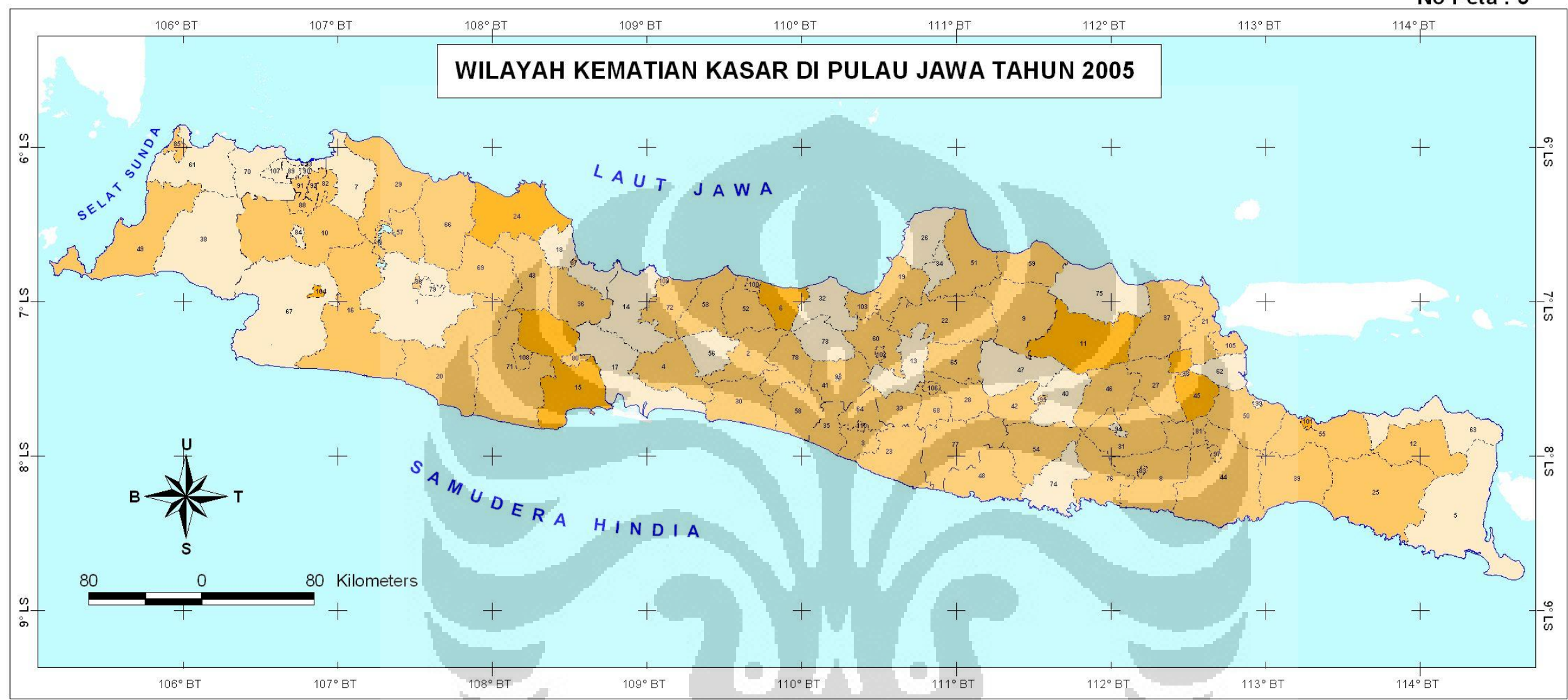
- |                       |                      |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7. Kab. Bekasi        | 25. Kab. Jember      | 43. Kab. Majalengka  | 61. Kab. Serang      |
| 8. Kab. Blitar        | 26. Kab. Jepara      | 44. Kab. Malang      | 62. Kab. Sidoarjo    |
| 9. Kab. Blora         | 27. Kab. Jombang     | 45. Kab. Mojokerto   | 63. Kab. Situbondo   |
| 10. Kab. Bogor        | 28. Kab. Karanganyar | 46. Kab. Nganjuk     | 64. Kab. Sleman      |
| 11. Kab. Bojonegoro   | 29. Kab. Karawang    | 47. Kab. Ngawi       | 65. Kab. Sragen      |
| 12. Kab. Bondowoso    | 30. Kab. Kebumen     | 48. Kab. Pacitan     | 66. Kab. Subang      |
| 13. Kab. Boyolali     | 31. Kab. Kediri      | 49. Kab. Pandeglang  | 67. Kab. Sukabumi    |
| 14. Kab. Brebes       | 32. Kab. Kendal      | 50. Kab. Pasuruan    | 68. Kab. Sukoharjo   |
| 15. Kab. Ciamis       | 33. Kab. Klaten      | 51. Kab. Pati        | 69. Kab. Sumedang    |
| 16. Kab. Cianjur      | 34. Kab. Kudus       | 52. Kab. Pekalongan  | 70. Kab. Tangerang   |
| 17. Kab. Cilacap      | 35. Kab. Kulon Progo | 53. Kab. Pemalang    | 71. Kab. Tasikmalaya |
| 18. Kab. Cirebon      | 36. Kab. Kuningan    | 54. Kab. Ponorogo    | 72. Kab. Tegal       |
| 19. Kab. Demak        | 37. Kab. Lamongan    | 55. Kab. Probolinggo | 73. Kab. Temanggung  |
| 20. Kab. Garut        | 38. Kab. Lebak       | 56. Kab. Purbalingga | 74. Kab. Trenggalek  |
| 21. Kab. Gresik       | 39. Kab. Lumajang    | 57. Kab. Purwakarta  | 75. Kab. Tuban       |
| 22. Kab. Grobogan     | 40. Kab. Madiun      | 58. Kab. Purworejo   | 76. Kab. Tulungagung |
| 23. Kab. Gunung Kidul | 41. Kab. Magelang    | 59. Kab. Rembang     | 77. Kab. Wonogiri    |
| 24. Kab. Indramayu    | 42. Kab. Magetan     | 60. Kab. Semarang    | 78. Kab. Wonosobo    |

- Nama Kota**
79. Kota Bandung
  80. Kota Banjar
  81. Kota Batu
  82. Kota Bekasi
  83. Kota Blitar
  84. Kota Bogor
  85. Kota Cilegon
  86. Kota Cimahi
  87. Kota Depok
  88. Kota Cirebon
  89. Kota Jakarta Barat
  90. Kota Jakarta Pusat
  91. Kota Jakarta Selatan
  92. Kota Jakarta Timur
  93. Kota Jakarta Utara

94. Kota Kediri
95. Kota Madiun
96. Kota Magelang
97. Kota Malang
98. Kota Mojokerto
99. Kota Pasuruan
100. Kota Pekalongan
101. Kota Probolinggo
102. Kota Salatiga
103. Kota Semarang
104. Kota Sukabumi
105. Kota Surabaya
106. Kota Surakarta
107. Kota Tangerang
108. Kota Tasikmalaya
109. Kota Tegal
110. Kota Yogyakarta



Kartografer : Mentari DC Bangun  
 Sumber : - Administrasi Pulau Jawa, Bakosurtanal  
 - Badan Pusat Statistik, 2005  
 Sistem Proyeksi : GCS WGS 1984  
 Tahun Pembuatan : 2011



**Legenda**

Batas Administrasi  
 ——— Garis Pantai  
 - - - - - Kabupaten/Kota  
 - - - - - Propinsi

Angka Kematian Kasar (% Jiwa)  
 < 8  
 8 - 16  
 > 16

- Nama Kabupaten
1. Kab. Bandung
  2. Kab. Banjarnegara
  3. Kab. Bantul
  4. Kab. Banyumas
  5. Kab. Banyuwangi
  6. Kab. Batang

7. Kab. Bekasi
8. Kab. Blitar
9. Kab. Blora
10. Kab. Bogor
11. Kab. Bojonegoro
12. Kab. Bondowoso
13. Kab. Boyolali
14. Kab. Brebes
15. Kab. Ciamis
16. Kab. Cianjur
17. Kab. Cilacap
18. Kab. Cirebon
19. Kab. Demak
20. Kab. Garut
21. Kab. Gresik
22. Kab. Grobogan
23. Kab. Gunung Kidul
24. Kab. Indramayu
25. Kab. Jember
26. Kab. Jepara
27. Kab. Jombang
28. Kab. Karanganyar
29. Kab. Karawang
30. Kab. Kebumen
31. Kab. Kediri
32. Kab. Kendal
33. Kab. Klaten
34. Kab. Kudus
35. Kab. Kulon Progo
36. Kab. Kuningan
37. Kab. Lamongan
38. Kab. Lebak
39. Kab. Lumajang
40. Kab. Madiun
41. Kab. Magelang
42. Kab. Magetan
43. Kab. Majalengka
44. Kab. Malang
45. Kab. Mojokerto
46. Kab. Nganjuk
47. Kab. Ngawi
48. Kab. Pacitan
49. Kab. Pandeglang
50. Kab. Pasuruan
51. Kab. Pati
52. Kab. Pekalongan
53. Kab. Pemasang
54. Kab. Ponorogo
55. Kab. Probolinggo
56. Kab. Purbalingga
57. Kab. Purwokarta
58. Kab. Purworejo
59. Kab. Rembang
60. Kab. Semarang

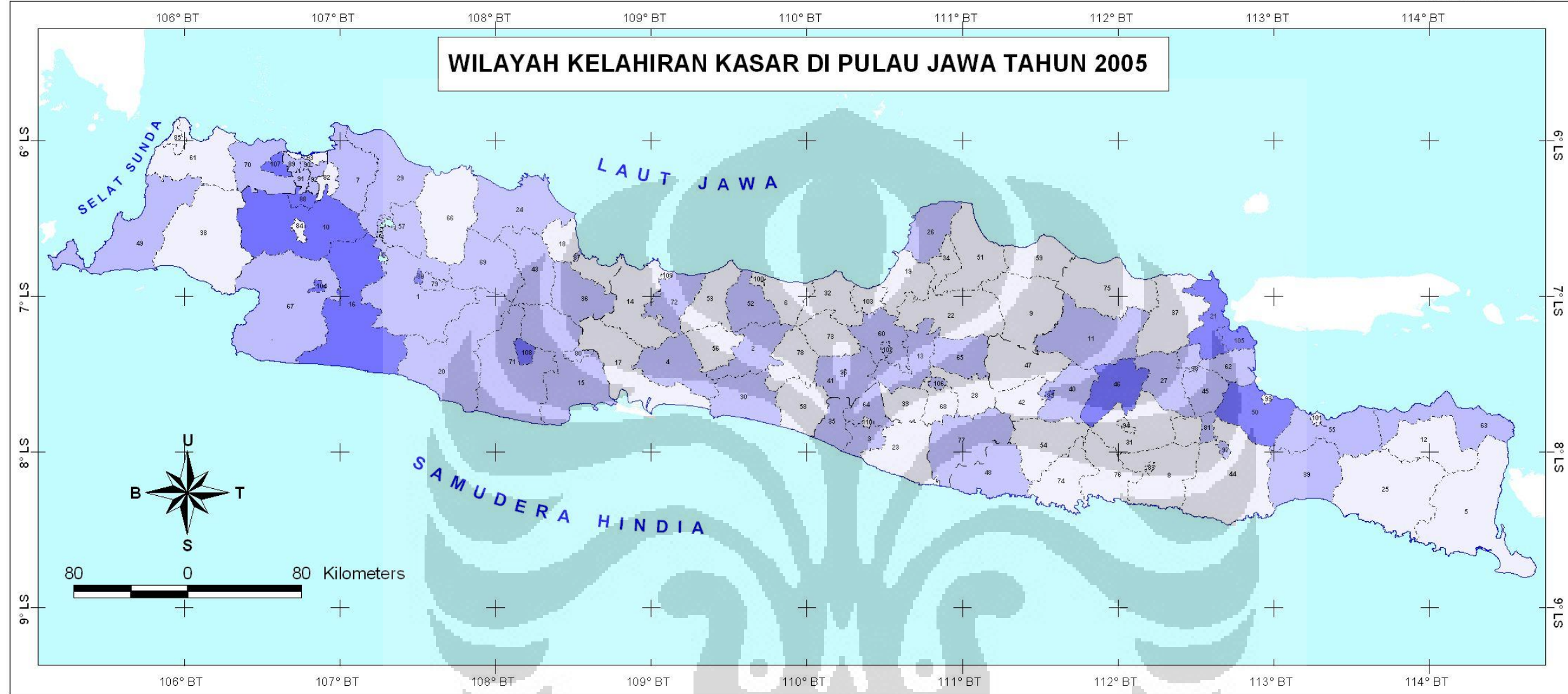
- Nama Kota
61. Kab. Serang
  62. Kab. Sidoarjo
  63. Kab. Situbondo
  64. Kab. Sleman
  65. Kab. Sragen
  66. Kab. Subang
  67. Kab. Sukabumi
  68. Kab. Sukoharjo
  69. Kab. Sumedang
  70. Kab. Tangerang
  71. Kab. Tasikmalaya
  72. Kab. Tegal
  73. Kab. Temanggung
  74. Kab. Trenggalek
  75. Kab. Tuban
  76. Kab. Tulungagung
  77. Kab. Wonogiri
  78. Kab. Wonosobo

79. Kota Bandung
80. Kota Banjar
81. Kota Batu
82. Kota Bekasi
83. Kota Blitar
84. Kota Bogor
85. Kota Cilegon
86. Kota Cimahi
87. Kota Depok
88. Kota Cirebon
89. Kota Jakarta Barat
90. Kota Jakarta Pusat
91. Kota Jakarta Selatan
92. Kota Jakarta Timur
93. Kota Jakarta Utara

94. Kota Kediri
95. Kota Madiun
96. Kota Magelang
97. Kota Malang
98. Kota Mojokerto
99. Kota Pasuruan
100. Kota Pekalongan
101. Kota Probolinggo
102. Kota Salatiga
103. Kota Semarang
104. Kota Sukabumi
105. Kota Surabaya
106. Kota Surakarta
107. Kota Tangerang
108. Kota Tasikmalaya
109. Kota Tegal
110. Kota Yogyakarta



Kartografer : Mentari DC Bangun  
 Sumber : - Administrasi Pulau Jawa, Bakosurtanal  
 - Badan Pusat Statistik, 2005  
 Sistem Proyeksi : GCS WGS 1984  
 Tahun Pembuatan : 2011



### Legenda

**Batas Administrasi**

- Garis Pantai
- - - - - Kabupaten/Kota
- - - - - Propinsi

**Angka Kelahiran Kasar (% Jiwa)**

- < 30
- 30 - 45
- > 45

**Nama Kabupaten**

1. Kab. Bandung
2. Kab. Banjarnegara
3. Kab. Bantul
4. Kab. Banyumas
5. Kab. Banyuwangi
6. Kab. Batang

7. Kab. Bekasi
8. Kab. Blitar
9. Kab. Blora
10. Kab. Bogor
11. Kab. Bojonegoro
12. Kab. Bondowoso
13. Kab. Boyolali
14. Kab. Brebes
15. Kab. Ciamis
16. Kab. Cianjur
17. Kab. Cilacap
18. Kab. Cirebon
19. Kab. Demak
20. Kab. Garut
21. Kab. Gresik
22. Kab. Grobogan
23. Kab. Gunung Kidul
24. Kab. Indramayu

25. Kab. Jember
26. Kab. Jepara
27. Kab. Jombang
28. Kab. Karanganyar
29. Kab. Karawang
30. Kab. Kebumen
31. Kab. Kediri
32. Kab. Kendal
33. Kab. Klaten
34. Kab. Kudus
35. Kab. Kulon Progo
36. Kab. Kuningan
37. Kab. Lamongan
38. Kab. Lebak
39. Kab. Lumajang
40. Kab. Madiun
41. Kab. Magelang
42. Kab. Magetan

43. Kab. Majalengka
44. Kab. Malang
45. Kab. Mojokerto
46. Kab. Nganjuk
47. Kab. Ngawi
48. Kab. Pacitan
49. Kab. Pandeglang
50. Kab. Pasuruan
51. Kab. Pati
52. Kab. Pekalongan
53. Kab. Pemalang
54. Kab. Ponorogo
55. Kab. Probolinggo
56. Kab. Purbalingga
57. Kab. Purwokarta
58. Kab. Purworejo
59. Kab. Rembang
60. Kab. Semarang

61. Kab. Serang
62. Kab. Sidoarjo
63. Kab. Situbondo
64. Kab. Sleman
65. Kab. Sragen
66. Kab. Subang
67. Kab. Sukabumi
68. Kab. Sukoharjo
69. Kab. Sumedang
70. Kab. Tangerang
71. Kab. Tasikmalaya
72. Kab. Tegal
73. Kab. Temanggung
74. Kab. Trenggalek
75. Kab. Tuban
76. Kab. Tulungagung
77. Kab. Wonogiri
78. Kab. Wonosobo

**Nama Kota**

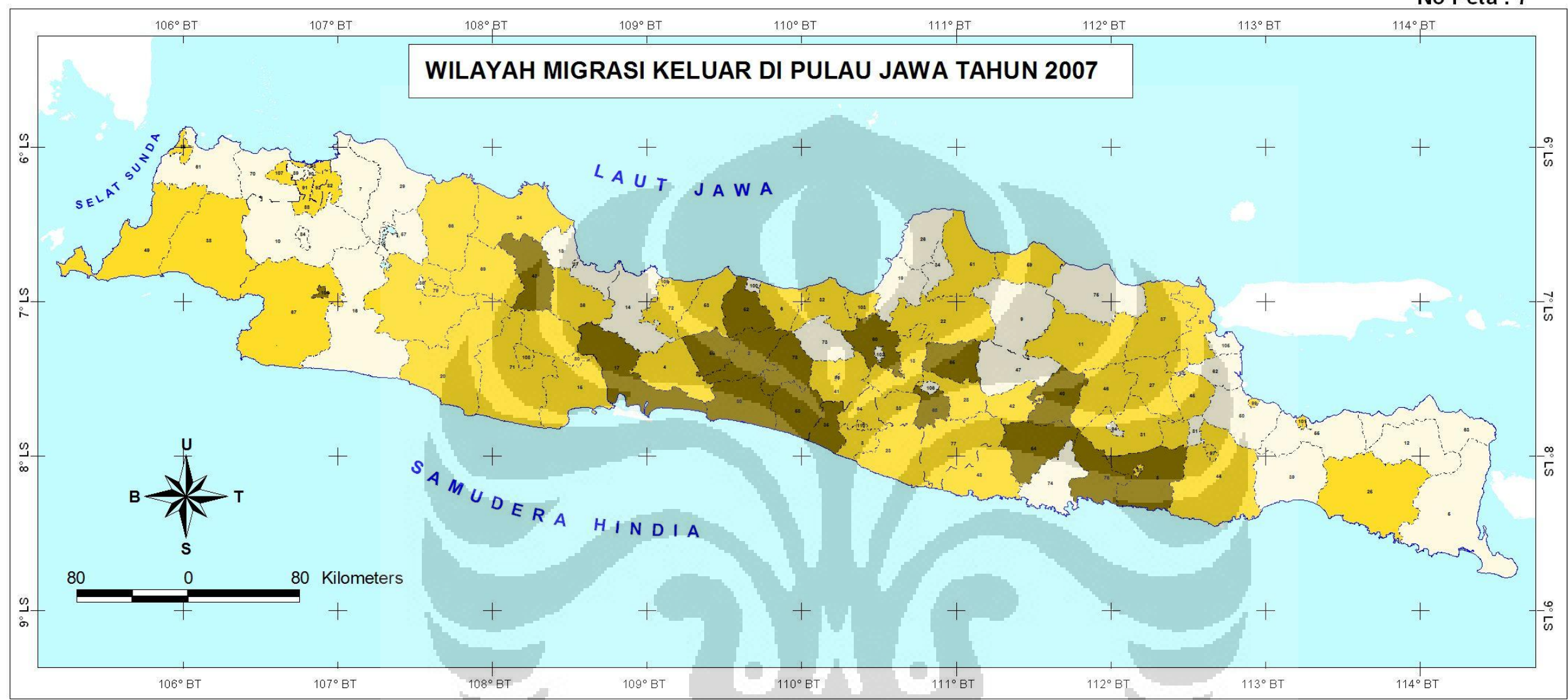
79. Kota Bandung
80. Kota Banjar
81. Kota Batu
82. Kota Bekasi
83. Kota Blitar
84. Kota Bogor
85. Kota Cilegon
86. Kota Cimahi
87. Kota Depok
88. Kota Cirebon
89. Kota Jakarta Barat
90. Kota Jakarta Pusat
91. Kota Jakarta Selatan
92. Kota Jakarta Timur
93. Kota Jakarta Utara

94. Kota Kediri
95. Kota Madiun
96. Kota Magelang
97. Kota Malang
98. Kota Mojokerto
99. Kota Pasuruan
100. Kota Pekalongan
101. Kota Probolinggo
102. Kota Salatiga
103. Kota Semarang
104. Kota Sukabumi
105. Kota Surabaya
106. Kota Surakarta
107. Kota Tangerang
108. Kota Tasikmalaya
109. Kota Tegal
110. Kota Yogyakarta



■ Pulau Jawa

Kartografer : Mentari DC Bangun  
 Sumber : - Administrasi Pulau Jawa, Bakosurtanal  
 - Badan Pusat Statistik, 2005  
 Sistem Proyeksi : GCS WGS 1984  
 Tahun Pembuatan : 2011



**Legenda**

- Batas Administrasi**
- Garis Pantai
  - - - Kabupaten/Kota
  - - - Propinsi

- Angka Migrasi Keluar (% Jiwa)**
- < 15
  - 15 - 30
  - > 30

- Nama Kabupaten**
1. Kab. Bandung
  2. Kab. Banjarnegara
  3. Kab. Bantul
  4. Kab. Banyumas
  5. Kab. Banyuwangi
  6. Kab. Batang

7. Kab. Bekasi
8. Kab. Blitar
9. Kab. Blora
10. Kab. Bogor
11. Kab. Bojonegoro
12. Kab. Bondowoso
13. Kab. Boyolali
14. Kab. Brebes
15. Kab. Ciamis
16. Kab. Cianjur
17. Kab. Cilacap
18. Kab. Cirebon
19. Kab. Demak
20. Kab. Garut
21. Kab. Gresik
22. Kab. Grobogan
23. Kab. Gunung Kidul
24. Kab. Indramayu

25. Kab. Jember
26. Kab. Jepara
27. Kab. Jombang
28. Kab. Karanganyar
29. Kab. Karawang
30. Kab. Kebumen
31. Kab. Kediri
32. Kab. Kendal
33. Kab. Klaten
34. Kab. Kudus
35. Kab. Kulon Progo
36. Kab. Kuningan
37. Kab. Lamongan
38. Kab. Lebak
39. Kab. Lumajang
40. Kab. Madiun
41. Kab. Magelang
42. Kab. Magetan

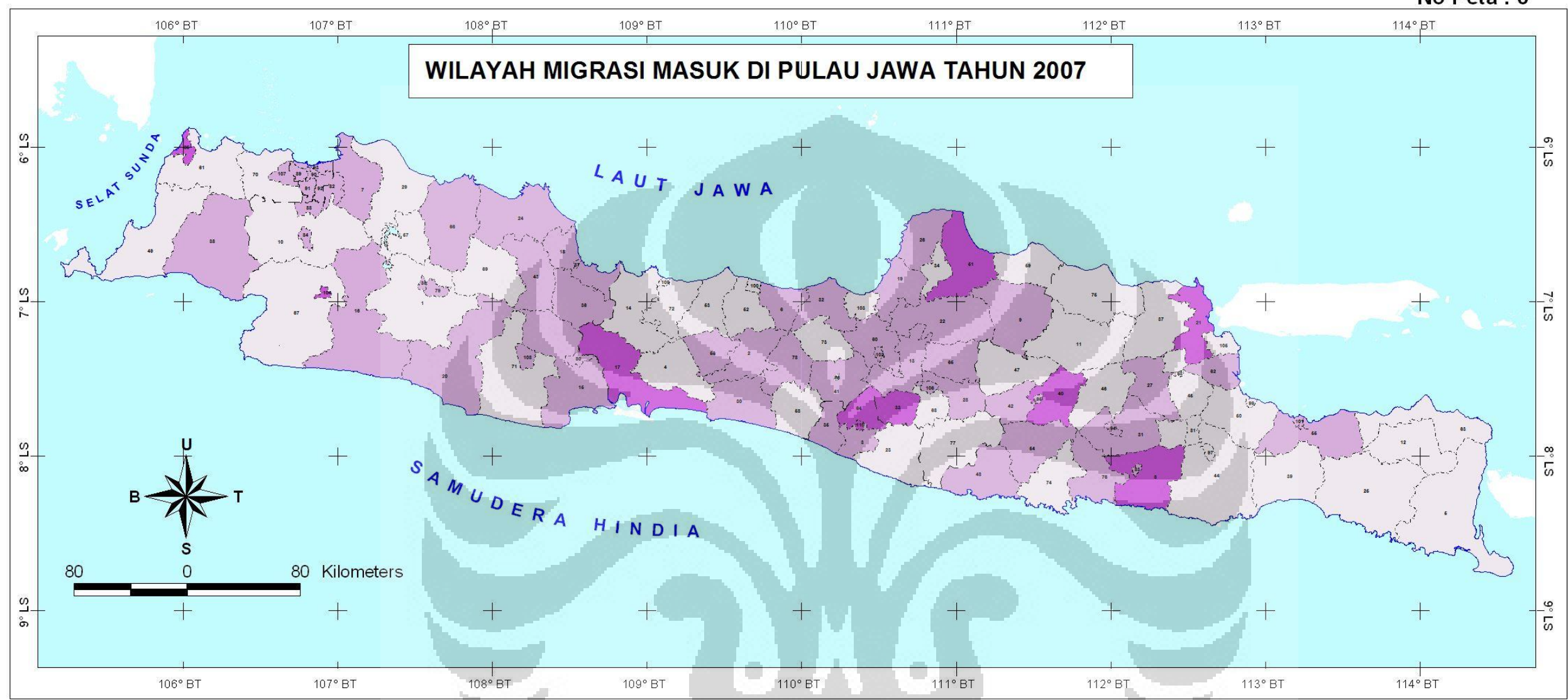
- Nama Kota**
43. Kab. Majalengka
  44. Kab. Malang
  45. Kab. Mojokerto
  46. Kab. Nganjuk
  47. Kab. Ngawi
  48. Kab. Pacitan
  49. Kab. Pandeglang
  50. Kab. Pasuruan
  51. Kab. Pati
  52. Kab. Pekalongan
  53. Kab. Pemasang
  54. Kab. Ponorogo
  55. Kab. Probolinggo
  56. Kab. Purbalingga
  57. Kab. Purwokerto
  58. Kab. Purworejo
  59. Kab. Rembang
  60. Kab. Semarang
  61. Kab. Serang
  62. Kab. Sidoarjo
  63. Kab. Situbondo
  64. Kab. Sleman
  65. Kab. Sragen
  66. Kab. Subang
  67. Kab. Sukabumi
  68. Kab. Sukoharjo
  69. Kab. Sumedang
  70. Kab. Tangerang
  71. Kab. Tasikmalaya
  72. Kab. Tegal
  73. Kab. Temanggung
  74. Kab. Trenggalek
  75. Kab. Tuban
  76. Kab. Tulungagung
  77. Kab. Wonogiri
  78. Kab. Wonosobo

79. Kota Bandung
80. Kota Banjar
81. Kota Batu
82. Kota Bekasi
83. Kota Blitar
84. Kota Bogor
85. Kota Cilegon
86. Kota Cimahi
87. Kota Depok
88. Kota Cirebon
89. Kota Jakarta Barat
90. Kota Jakarta Pusat
91. Kota Jakarta Selatan
92. Kota Jakarta Timur
93. Kota Jakarta Utara



**Kartografer** : Mentari DC Bangun  
**Sumber** : - Administrasi Pulau Jawa, Bakosurtanal  
 - Badan Pusat Statistik, 2005  
**Sistem Proyeksi** : GCS WGS 1984  
**Tahun Pembuatan** : 2011





**Legenda**

- Batas Administrasi**
- Garis Pantai
  - - - Kabupaten/Kota
  - - - Propinsi

- Angka Migrasi Masuk (% Jiwa)**
- < 8
  - 8 - 16
  - > 16

- Nama Kabupaten**
1. Kab. Bandung
  2. Kab. Banjarnegara
  3. Kab. Bantul
  4. Kab. Banyumas
  5. Kab. Banyuwangi
  6. Kab. Batang

7. Kab. Bekasi
8. Kab. Blitar
9. Kab. Blora
10. Kab. Bogor
11. Kab. Bojonegoro
12. Kab. Bondowoso
13. Kab. Boyolali
14. Kab. Brebes
15. Kab. Ciamis
16. Kab. Cianjur
17. Kab. Cilacap
18. Kab. Cirebon
19. Kab. Demak
20. Kab. Garut
21. Kab. Gresik
22. Kab. Grobogan
23. Kab. Gunung Kidul
24. Kab. Indramayu

25. Kab. Jember
26. Kab. Jepara
27. Kab. Jombang
28. Kab. Karanganyar
29. Kab. Karawang
30. Kab. Kebumen
31. Kab. Kediri
32. Kab. Kendal
33. Kab. Klaten
34. Kab. Kudus
35. Kab. Kulon Progo
36. Kab. Kuningan
37. Kab. Lamongan
38. Kab. Lebak
39. Kab. Lumajang
40. Kab. Madiun
41. Kab. Magelang
42. Kab. Magetan

43. Kab. Majalengka
44. Kab. Malang
45. Kab. Mojokerto
46. Kab. Nganjuk
47. Kab. Ngawi
48. Kab. Pacitan
49. Kab. Pandeglang
50. Kab. Pasuruan
51. Kab. Pati
52. Kab. Pekalongan
53. Kab. Pemasang
54. Kab. Ponorogo
55. Kab. Probolinggo
56. Kab. Purbalingga
57. Kab. Purwokarta
58. Kab. Purworejo
59. Kab. Rembang
60. Kab. Semarang

61. Kab. Serang
62. Kab. Sidoarjo
63. Kab. Situbondo
64. Kab. Sleman
65. Kab. Sragen
66. Kab. Subang
67. Kab. Sukabumi
68. Kab. Sukoharjo
69. Kab. Sumedang
70. Kab. Tangerang
71. Kab. Tasikmalaya
72. Kab. Tegal
73. Kab. Temanggung
74. Kab. Trenggalek
75. Kab. Tuban
76. Kab. Tulungagung
77. Kab. Wonogiri
78. Kab. Wonosobo

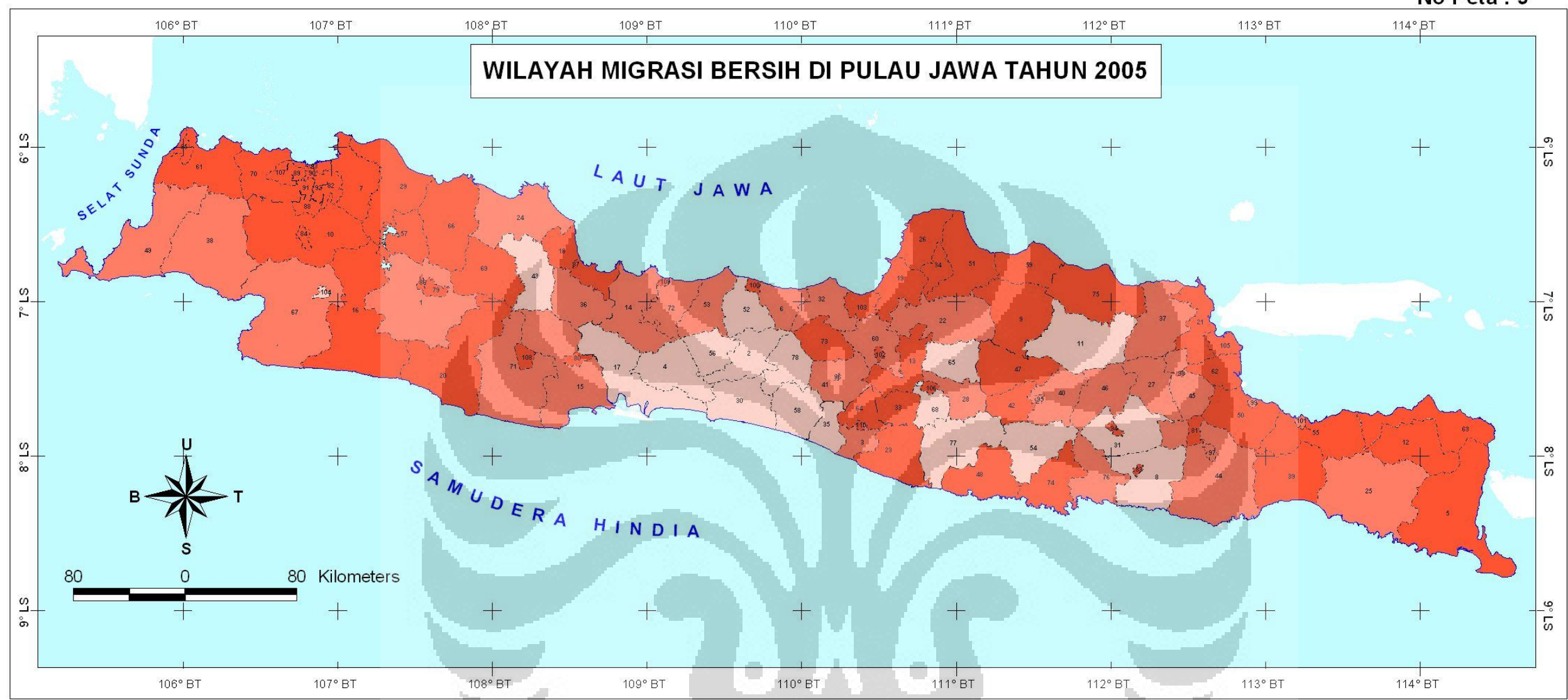
- Nama Kota**
79. Kota Bandung
  80. Kota Banjar
  81. Kota Batu
  82. Kota Bekasi
  83. Kota Blitar
  84. Kota Bogor
  85. Kota Cilegon
  86. Kota Cimahi
  87. Kota Depok
  88. Kota Cirebon
  89. Kota Jakarta Barat
  90. Kota Jakarta Pusat
  91. Kota Jakarta Selatan
  92. Kota Jakarta Timur
  93. Kota Jakarta Utara

94. Kota Kediri
95. Kota Madiun
96. Kota Magelang
97. Kota Malang
98. Kota Mojokerto
99. Kota Pasuruan
100. Kota Pekalongan
101. Kota Probolinggo
102. Kota Salatiga
103. Kota Semarang
104. Kota Sukabumi
105. Kota Surabaya
106. Kota Surakarta
107. Kota Tangerang
108. Kota Tasikmalaya
109. Kota Tegal
110. Kota Yogyakarta



Kartografer : Mentari DC Bangun  
 Sumber : - Administrasi Pulau Jawa, Bakosurtanal  
 - Badan Pusat Statistik, 2005  
 Sistem Proyeksi : GCS WGS 1984  
 Tahun Pembuatan : 2011

**WILAYAH MIGRASI BERSIH DI PULAU JAWA TAHUN 2005**



**Legenda**

**Batas Administrasi**  
 ——— Garis Pantai  
 - - - - - Kabupaten/Kota  
 - - - - - Propinsi

**Angka Migrasi Bersih (% Jiwa)**  
 < 30  
 30 - 45  
 > 45

**Nama Kabupaten**  
 1. Kab. Bandung  
 2. Kab. Banjarnegara  
 3. Kab. Bantul  
 4. Kab. Banyumas  
 5. Kab. Banyuwangi  
 6. Kab. Batang

7. Kab. Bekasi  
 8. Kab. Blitar  
 9. Kab. Blora  
 10. Kab. Bogor  
 11. Kab. Bojonegoro  
 12. Kab. Bondowoso  
 13. Kab. Boyolali  
 14. Kab. Brebes  
 15. Kab. Ciamis  
 16. Kab. Cianjur  
 17. Kab. Cilacap  
 18. Kab. Cirebon  
 19. Kab. Demak  
 20. Kab. Garut  
 21. Kab. Gresik  
 22. Kab. Grobogan  
 23. Kab. Gunung Kidul  
 24. Kab. Indramayu

25. Kab. Jember  
 26. Kab. Jepara  
 27. Kab. Jombang  
 28. Kab. Karanganyar  
 29. Kab. Karawang  
 30. Kab. Kebumen  
 31. Kab. Kediri  
 32. Kab. Kendal  
 33. Kab. Klaten  
 34. Kab. Kudus  
 35. Kab. Kulon Progo  
 36. Kab. Kuningan  
 37. Kab. Lamongan  
 38. Kab. Lebak  
 39. Kab. Lumajang  
 40. Kab. Madiun  
 41. Kab. Magelang  
 42. Kab. Magetan

43. Kab. Majalengka  
 44. Kab. Malang  
 45. Kab. Mojokerto  
 46. Kab. Nganjuk  
 47. Kab. Ngawi  
 48. Kab. Pacitan  
 49. Kab. Pandeglang  
 50. Kab. Pasuruan  
 51. Kab. Pati  
 52. Kab. Pekalongan  
 53. Kab. Pemasang  
 54. Kab. Ponorogo  
 55. Kab. Probolinggo  
 56. Kab. Purbalingga  
 57. Kab. Purwokarta  
 58. Kab. Purworejo  
 59. Kab. Rembang  
 60. Kab. Semarang

**Nama Kota**  
 61. Kab. Serang  
 62. Kab. Sidoarjo  
 63. Kab. Situbondo  
 64. Kab. Sleman  
 65. Kab. Sragen  
 66. Kab. Subang  
 67. Kab. Sukabumi  
 68. Kab. Sukoharjo  
 69. Kab. Sumedang  
 70. Kab. Tangerang  
 71. Kab. Tasikmalaya  
 72. Kab. Tegal  
 73. Kab. Temanggung  
 74. Kab. Trenggalek  
 75. Kab. Tuban  
 76. Kab. Tulungagung  
 77. Kab. Wonogiri  
 78. Kab. Wonosobo

79. Kota Bandung  
 80. Kota Banjar  
 81. Kota Batu  
 82. Kota Bekasi  
 83. Kota Blitar  
 84. Kota Bogor  
 85. Kota Cilegon  
 86. Kota Cimahi  
 87. Kota Depok  
 88. Kota Cirebon  
 89. Kota Jakarta Barat  
 90. Kota Jakarta Pusat  
 91. Kota Jakarta Selatan  
 92. Kota Jakarta Timur  
 93. Kota Jakarta Utara  
 94. Kota Kediri  
 95. Kota Madiun  
 96. Kota Magelang  
 97. Kota Malang  
 98. Kota Mojokerto  
 99. Kota Pasuruan  
 100. Kota Pekalongan  
 101. Kota Probolinggo  
 102. Kota Salatiga  
 103. Kota Semarang  
 104. Kota Sukabumi  
 105. Kota Surabaya  
 106. Kota Surakarta  
 107. Kota Tangerang  
 108. Kota Tasikmalaya  
 109. Kota Tegal  
 110. Kota Yogyakarta



**Indonesia**  
 Pulau Jawa

Kartografer : Mentari DC Bangun  
 Sumber : - Administrasi Pulau Jawa, Bakosurtanal  
 - Badan Pusat Statistik, 2005  
 Sistem Proyeksi : GCS WGS 1984  
 Tahun Pembuatan : 2011

